

**ANALISIS PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(SDGs) SEKTOR PUBLIK DI SULAWESI BARAT**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1

Departemen Ilmu Pemerintahan



Oleh

Dirvan Wahyudi

E121 16 501

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



LEMBARAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(SDGs) SEKTOR PUBLIK DI SULAWESI BARAT**

Dipersiapkan dan disusun oleh

DIRVAN WAHYUDI

E 121 16 501

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 10 Agustus 2020


Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H.A. Samsu Alam, M.Si
NIP. 196412311989031027


Dr. A. Lukman Irvan, S.IP. M.Si
NIP. 197901062005011001

Mengetahui,

Ketua Departemen

Imu Pemerintahan FISIP Unhas



Dr. A.M. Rusli, M.Si

NIP. 196407271991031001



LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(SDGs) SEKTOR PUBLIK DI SULAWESI BARAT**

Dipersiapkan dan disusun oleh

DIRVAN WAHYUDI

E 121 16 501


Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia
ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan


Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Makassar, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020


Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si ()

Sekretaris : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si ()

Anggota : Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si ()

Anggota : Dr. A.M. Rusli, M.Si ()

Pembimbing I : Dr. H.A. Samsu Alam, M.Si ()

Pembimbing II : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si ()



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Atas berkat rahmat dan pertolongan dari pada-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Sektor Publik di Sulawesi Barat**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan berbagai dinamika yang dihadapi, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak dapat dipungkiri, tantangan serta hambatan juga menjadi kawan berproses selama penyusunan skripsi ini. Akan tetapi hal tersebut yang lebih menguatkan usaha, niat serta tekad yang kuat dalam waktu penyelesaiannya. Dukungan serta doa dari berbagai pihak juga menjadi penyemangat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga pada penyelesaian masa studi akhir di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, izinkan juga penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terkira kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yustinus. R dan Mince Hendrik. P yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis sehingga dapat tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Terima kasih banyak atas segala cinta dan kasih sayang, dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Kuasa senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, dan mengi setiap langkah kehidupan kepada kedua orang tua penulis.



Teriring ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak (Alm) Dr. H.A. Samsu Alam, M.Si selaku pembimbing 1 yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan, gagasan serta pemikiran hingga akhir khayatnya kepada penulis. Abadi jasa-jasa ta Puang.
5. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si selaku Pembimbing 2 sekaligus Pembimbing Akademik (PA) penulis selama menjadi mahasiswa yang tak pernah lelah membantu mengarahkan, membimbing dan memberikan nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada seluruh Bapak/Ibu Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam segala urusan penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Bapak Drs. H. Andi Ali Baal Masdar M.Si selaku Gubernur Provinsi



Sulawesi Barat, Bapak Dr. Junda Maulana, M.Si selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Barat, Bapak Drs. H. Amir Maricar, MM selaku Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kooperasi dan UKM Sulawesi Barat, Bapak Sudra Satriadi selaku bidang bina marga Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Rifai Sahida selaku pendiri yayasan organisasi lingkungan Tangan Edukasi Indonesia, Bapak Darius H.P selaku pelaku usaha industri kecil menengah di Mamuju Sulawesi Barat.

9. Terima kasih untuk saudara kandung dan sepupu penulis Kakak Dian Pratiwi, Dedy Wardoyo, dan Dicky Triwelly serta Kakak Defri Wiji Grijo, Deflinda, Adik Ricky Elvadri, Diksen Anugrah, Jeane Gloria yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis dalam meraih segala mimpi dan cita-cita. Semoga kita semua selalu dapat menjadi anak yang membanggakan dan mengangkat derajat keluarga.
 10. Terima kasih untuk kedua anakku, keponakanku, Diego Rafael dan Divy Kimberly yang selalu mewarnai dan memberikan suntikan kebahagiaan bagi penulis tatkala menjalani penatnya hari-hari selama menjadi mahasiswa hingga pada penyelesaian skripsi ini. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menjaga dalam pertumbuhan dan perkembanganmu, nak.
 11. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) yang senantiasa menjadi rumah, tempat bercerita dan berbagi, tempat menempa dan mendewasakan diri, tempat melewati suka dan duka selama menjadi mahasiswa, dan segala hal lainnya yang penulis tidak bisa deskripsikan satu per satu selama berproses dan menjadi bagian dari keluarga besar ini. Rumah kecil berwarna orange yang akan selalu penulis rindukan.
- alam merdeka militan.



12. Terima kasih untuk kakak-kakakku Fidelitas Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 dan Federasi Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang selalu memberikan nasehat dan menjadi kawan berfikir bagi penulis selama menempuh perkuliahan dan proses berorganisasi.
13. Terima kasih untuk adik-adikku Kaizen Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 dan Eleftheria Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 yang selama ini membantu penulis dalam perkuliahan dan berbagi cerita selama proses berorganisasi. Sekiranya jiwa merdeka militan akan tetap terpatri di dalam diri kita.
14. Terima kasih kepada Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Periode 2018-2019 yang telah membantu penulis untuk bersama-sama berproses dan mengemban tanggung jawab dalam menjalankan amanah roda kepengurusan dan regenerasi organisasi.
15. Terima kasih untuk kawan-kawan sejawatku, para manusia hebat nan tangguh pada masanya, Ketua Humanis FISIP Unhas Periode 2018-2019 Jeri Mahjud, Ketua Himapol FISIP Unhas Periode 2018-2019 Widya Astuti, Ketua Human FISIP Unhas Periode 2018-2019 Miranda Malinda Hamka, Ketua Kemasos FISIP Unhas Periode 2018-2019 Ramdhan Syahroni atas segala kebaikan dan cerita selama menjadi mahasiswa terlebih saat menjalani suka duka berorganisasi di lembaga kemahasiswaan. Kita pernah hebat pada masanya, terpuruk pada kisah-kisahnyanya.
16. Terima kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Jepang Gel. 102 Grup C Muhammad Adhim Riangdi, Muhammad Arya Azzurba, Arfandy Arman, Asriyandi Catur Putra, Naufal Alviansyah, Arief Iskandar, Muhammad Anugerah, Iftahul Muflihin, M. Nur Mufaddal, Muh. Fathur Rachman, Adrianus Dipo, Muh. Ariandy, Zulfikar Suhardi, Malfin Malik, Rachmat Setiawan,angga Atrie, Valentini Febriani B Lande, Aqilla Ramadhani,elsyana Gosal, Narumi Ramadhani, Arlita Reggiana, Karina Elisabeth Lande, Tamara D Harun, Namirah Aisyah, Cheeryll



Fhariza, Andi Alisa, Aqilla Nadya. Terima kasih untuk semua cerita dan pengalaman selama proses pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Fukuoka dan Tokyo Jepang. Semoga waktu tetap sudi untuk mempertemukan.

17. Terima kasih teman-teman Sospol angkatan 2016 yang selalu berbagi canda dan tawa melewati dingin dan malamnya suasana kampus. Semoga kelak kita kembali ke biru kuning sebagai orang-orang sukses yang membanggakan. Salam bersama, bersatu, berjaya.

18. Terima kasih dan apresiasi tertinggi untuk diri sendiri yang telah mampu bertahan melewati berbagai rintangan dan tantangan selama ini. Terima kasih untuk selalu kuat dan menjadi seseorang yang paling bisa dipercayai. Tetap menjadi berkat bagi orang lain, tetap membumi.

Dengan berserah dan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan atas segala pertolongan dan hikmat dari pada-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Strata-1 di Universitas Hasanuddin Makassar. Semoga segala kebaikan dan bantuan dari setiap orang yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dapat bernilai ibadah dan diterima disisi Yang Maha Kuasa. Dengan harapan yang besar, melalui skripsi ini kiranya dapat membantu dan memberi manfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca.

Makassar, 12 Agustus 2020

Penulis,



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Matriks	xiv
Daftar Gambar	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan tentang Pemerintah Daerah	8
2.2 Tinjauan <i>Sustainable Development Goals</i>	19
2.3 Tinjauan Tentang Sektor Publik	24
2.4 Kerangka Pikir	37
METODE PENELITIAN	39
Tipe Penelitian	39



3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Informan Penelitian.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Jenis Data	41
3.6 Definisi Konsep	41
3.7 Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat	44
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat.....	44
4.1.2 Kondisi Geografis Dan Batas Wilayah Administrasi	47
4.1.3 Kondisi Topografi	51
4.1.4 Kondisi Iklim.....	54
4.1.5 Kondisi Demografi	57
4.1.6 Kondisi Sosial	60
4.1.7 Kondisi Ekonomi	67
4.2 Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat	72
4.2.1 Keselarasan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Terhadap Visi Pembangunan Sulawesi Barat	72
4.2.2 Arah Kebijakan Pencapaian SDGs Dalam Pilar Pembangunan Ekonomi.....	90
4.3 Kondisi Pencapaian SDGs Sektor Publik Di Sulawesi Barat	92
4.3.1 Analisis Pencapaian melalui Indikator SDGs.....	92
4.3.2 Capaian Indikator SDGs pada Urusan Perangkat Daerah.....	97



4.4 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur dalam Konsep SDGS di Sulawesi	
Barat.....	100
4.4.1 Pengembangan Kawasan Industri	100
4.4.2 Pengembangan Inovasi	126
4.4.3 Pengembangan Infrastruktur.....	131
BAB V PENUTUP	144
5.1 Kesimpulan.....	144
5.2 Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN.....	151



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Publik Versus Privat.....	27
Tabel 2. Luas dan Jarak ke Ibukota Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.....	48
Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Unit Pemukiman Transmigrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat.....	51
Tabel 4. Jumlah Gunung dan nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat	52
Tabel 5. Rata-Rata Suhu dan Kelembapan Udara Menurut Bulan Provinsi Sulawesi Barat.....	54
Tabel 6. Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Menurut Bulan Provinsi Sulawesi Barat	55
Tabel 7. Jumlah Curah Hujan Bulanan dan Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi Sulawesi Barat	55
Tabel 8. Rata Uraian Kondisi Iklim Provinsi Sulawesi Barat.....	56
Tabel 9. Jumlah Penduduk pada Tahun 2016 - 2018 Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat	57
Tabel 10. Kepadatan Penduduk dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat	58
Tabel 11. Jumlah penduduk dan Rasio Menurut Jenis kelamin Provinsi Sulawesi Barat.....	59
Tabel 12. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Barat.....	60
Tabel 13. Garis kemiskinan dan Angka Kemiskinan Tahun 2009-2018 Provinsi Sulawesi Barat	61
Tabel 14. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Tahun 2011-2016 Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat	62
Tabel 15. Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Barat	64
Tabel 16. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2018 Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat	65



Tabel 17. Jumlah Angka Partisipasi Kerja dan Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat	66
Tabel 18. Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2018..	67
Tabel 19. Persentase Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Total PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2018	68
Tabel 20. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Tahun 2017 dan 2018 Provinsi Sulawesi Barat	69
Tabel 21. Pendapatan Perkapita Menurut Kabupaten Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Barat.....	69
Tabel 22. Penjelasan Misi Pembangunan Daerah 2017-2022	73
Tabel 23. Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, RPJMD PROV. SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 dan TPB/SDGs.....	78
Tabel 24. Kebijakan Daerah yang Mendukung pencapaian SDGs pada Pilar Pembangunan Ekonomi khusus tujuan ke-sembilan.....	91
Tabel 25. Capaian Indikator SDGs Provinsi Sulawesi Barat	94
Tabel 26. Capaian Indikator Menurut Jenis Urusan yang Dirinci Berdasarkan Kelompok TPB di Provinsi Sulawesi Barat.....	98
Tabel 27. Target Peningkatan Perindustrian RPJMD Sulawesi Barat Tahun 2017-2022	103
Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Sektor Industri Di Sulawesi Barat..	104
Tabel 29. Implikasi Rencana Struktur Tata Ruang	108
Tabel 30. Kebutuhan Telekomunikasi Kawasan	128
Tabel 31. Capaian kondisi jalan provinsi Sulawesi Barat 2018-2019.....	134
Tabel 32. Target Infrastruktur RPJMD Sulawesi Barat 2017 – 2022.....	137



DAFTAR MATRIKS

Matriks 1. Inflasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018.....	71
Matriks 2. Indikator Tujuan ke-9 Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan data capaian target 5 tahun sebelumnya di Provinsi Sulawesi Barat	95
Matriks 3. Indikator Pada Tujuan ke-sembilan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Provinsi Sulawesi Barat.....	95
Matriks 4. Kondisi pengembangan industri, inovasi serta infrastruktur di Sulawesi barat 2020	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pikir	38
Gambar 2. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat	50
Gambar 3. Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat	53
Gambar 4. Peta Rencana Pembangunan Kawasan Industri Belang-Belang Provinsi Sulawesi Barat	102
Gambar 5. Kondisi Jalan Provinsi Sulawesi Barat 2018-2019.....	135
Gambar 6. Pembangunan Mamuju Arterial Road to Support Belang-belang International Port Tahap I.....	136



ABSTRAK

Dirvan Wahyudi, Nomor Induk Mahasiswa E12116501, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi yang berjudul “Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Sektor Publik di Sulawesi Barat, dibawah bimbingan Bapak Dr. H.A. Samsu Alam, M.Si sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si sebagai Pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menggambarkan pengembangan kawasan industri, pengembangan kapasitas inovasi teknologi, pengembangan infrastruktur dasar dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sulawesi Barat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan tipe penelitian deskriptif kualitatif ini didasarkan pada maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan serta pencapaian tujuan dari SDGs dalam sektor publik di Provinsi Sulawesi Barat. Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan memahami bagaimana peran segenap *stakeholder* dalam upaya untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam sektor publik dapat terwujud dan terimplementasikan dalam setiap rencana serta pelaksanaan proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa kondisi pembangunan di Provinsi Sulawesi barat secara keseluruhan hingga saat ini masih belum terlaksana secara optimal. Pengembangan dalam sektor industri, inovasi serta infrastruktur dengan ketercapaian pembangunannya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam tahap perampungan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sektor industri akan dikembangkan melalui pembangunan kawasan industri yang akan dipusatkan di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan pengembangan inovasi terkait sistem jaringan telepon yang lebih memadai dan terjangkau serta pengembangan dalam sektor infrastruktur dasar yang terus diupayakan berjalan sesuai dengan rencana pembangunan daerah untuk menopang keberlangsungan perputaran roda pembangunan di Sulawesi Barat. Faktor penghambat dalam pengembangan setiap pembangunan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini yaitu minimnya anggaran, pengkajian terhadap data terkait indikator pembangunan berkelanjutan, dan ketersediaan sarana prasarana. Sedangkan faktor lainnya yang menjadi pendukung yaitu potensi sumber daya alam, dan adanya program pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Kunci: Pembangunan, Industri, Inovasi, Infrastruktur, Pemerintah Provinsi



ABSTRACT

Dirvan Wahyudi, student number E12116501, Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis titled "The Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) The public sector in West Sulawesi, under the guidance of Mr. Dr. H.A. Samsu Alam, M.Si as a Supervisor 1 and Mr. Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si as Supervisor 2.

This research aims to describe the development of Industrial area, development of technological innovation capacity, development Of basic infrastructure with the concept of *Sustainable Development Goals* (SDGs) in West Sulawesi.

The type of research used in this research is the type of qualitative descriptive research. The use of this type of qualitative descriptive research is based on the purpose of this research, namely to know, understand, and analyze the implementation and achievement of the objectives of SDGs in the public sector in West Sulawesi province. The use of qualitative descriptive approaches in this study seeks to uncover and understand how the role of all *stakeholders* in the efforts to achieve the Goals Of *Sustainable Development Goals* (SDGs) in the public sector can be realized and implemented in every plan and implementation of the development process in West Sulawesi province.

The result of this research illustrates that the condition of development in West Sulawesi province as a whole until now is still not carried out optimally. Development in the industrial sector, innovation and infrastructure with the achievement of its construction on the *Sustainable Development Goals* (SDGs) in the completion stage by the provincial government of West Sulawesi. The industrial sector will be developed through the development of industrial areas that will be centered in the region of Mamuju regency, with the development of innovations related to the telephone network system that is more adequate and affordable and development in the basic infrastructure sector that continues to be sought in accordance with the plan of regional development to support the sustainability of construction wheel rotation in West Sulawesi. The inhibitory factor in the development of each development to achieve this *sustainable development Goals* (SDGs) is the lack of budget, assessment of data related to sustainable development indicators, and the availability of infrastructure. While other factors are supporting the potential of natural resources, and the formation of a more sustainable development program.

Keywords: Development, Industry, Innovation, Infrastructure, Local Government



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda pembangunan global tahun 2030 yang telah menjadi komitmen dari semua negara di dunia termasuk Indonesia. Sebanyak 193 negara dan pemerintahan dunia telah menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs (*Millenium Development Goals*), tujuan dari SDGs jauh lebih ambisius dan komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif dengan menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. SDGs menyatukan prinsip kesejahteraan untuk umat manusia melalui prinsip *no one left behind* dengan didukung oleh semua pemangku kepentingan pembangunan. SDGs memadukan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan yang diperkuat oleh tata kelola yang baik. Belajar dari pengalaman MDGs, keberhasilan pencapaian SDGs di tahun 2030 memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Bagian dari perencanaan ini sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian dokumen perencanaan: Peta Jalan SDGs sampai dengan tahun 2030, Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk periode 2017-2019 dan periode selanjutnya. Semua dokumen perencanaan ini harus dilakukan secara berjenjang dan sistematis.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan

ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5P



dan menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Segala bentuk agenda pembangunan yang tertuang dalam SDGs ini juga menjelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan kelompok-kelompok yang paling termarginalkan.

Di Indonesia, pelaksanaan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda MDGs dan dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2040. Selain itu, untuk menguatkan proses pelaksanaannya, SDGs kemudian lebih lanjut juga telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi sebuah konsistensi pemerintah dalam mengawal SDGs ini. Dengan target dan tujuan yang relevan dengan Agenda Pembangunan Nasional atau dikenal dengan Nawa Cita (sembilan), SDGs membawa kesamaan prioritas dan target pembangunan yang telah dijadikan sebagai agenda prioritas nasional yaitu kelompok beresiko dan menghadirkan pembangunan bagi semua (pembangunan yang inklusif). Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencapai tujuan dan target tersebut, pelaksanaan SDGs haruslah dilaksanakan oleh seluruh elemen tanpa terkecuali. Baik dari Pusat hingga ke daerah provinsi, kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Paling utama adalah sinergi antara setiap kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menjadi prioritas tinggi adalah bagaimana mempertajam sinkronisasi dan koordinasi dari kebijakan serta program yang ada antar pemerintah pusat dan daerah dengan pemangku kepentingan lainnya.

Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi termuda dan terkecil di Indonesia merupakan salah satu daerah hasil pemekaran pasca-reformasi, hingga kini terus melakukan proses pembangunan di segala lini aspeknya dalam sektor publik. Pembangunan dalam sektor publik ini



tentu saja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketercapaian SDGs. Dalam proses pelaksanaan SDGs tentu saja kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah akan banyak melibatkan ranah publik. Hal ini yang kemudian mendasari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menuangkan berbagai proses perencanaan pembangunan dalam sektor publik ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Sulawesi Barat dengan berpedoman pada muatan SDGs sebagai wujud kesatuan dari rencana pembangunan nasional. Tetapi sebagai daerah dengan pembangunan yang masih tergolong baru, Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan yang berat dalam pencapaian SDGs.

Tantangan berat ini didasarkan pada hasil analisis data yang dilakukan oleh *Center for Sustainable Development Goals Studies Universitas Padjajaran* terkait kesiapan daerah-daerah di Indonesia dalam merealisasikan target SDGs tahun 2030. Dengan pemetaan yang dilakukan berdasarkan asumsi skenario “*Business-as-usual* atau BAU” yang menggambarkan proyeksi kesiapan pencapaian SDGs secara umum, Provinsi Sulawesi Barat hanya mendapat nilai 1,6 (diantara C dan D), di bawah skor nasional yang bernilai 1,85. Jelas ini mengindikasikan bahwa mayoritas indikator-indikator SDGs di Provinsi Sulawesi Barat diproyeksikan baru setengah jalan untuk dapat memenuhi targetnya pada tahun 2030.¹ Bahkan lebih lanjut data tersebut menyebutkan Provinsi Sulawesi Barat tergabung ke dalam kategori sebagai provinsi yang relatif paling tidak siap dengan dilihat dari ketercapaian terhadap indikator SDGs yang telah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) hanya sekitar 15,15%.² Provinsi Sulawesi Barat tergabung ke dalam kategori sebagai provinsi yang relatif paling tidak siap bersama dengan Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.



enyongsong SDGs, *center for sustainable development goals UNPAD*, hal.223
poran KLHS terhadap Perubahan RPJMD Sulawesi Barat

Dari data tersebut, mengisyaratkan kembali bahwa Provinsi Sulawesi Barat masih harus berbenah dalam lebih menyiapkan proyeksi pembangunan berkelanjutannya. Beberapa tujuan SDGs yang perlu disoroti dan menjadi fokus utama dalam mendongkrak laju pertumbuhan pembangunan di Sulawesi Barat saat ini ialah berfokus pada tujuan ke-9 SDGs dengan ketercapaian tujuan yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta lebih mendorong peningkatan kapasitas inovasi dalam proses pembangunan. Membangun Sulawesi Barat dengan melihat dari aspek ini sangat penting, karena sebagai salah satu provinsi termuda, masalah pembangunan yang sering ditemui di daerah ini ialah ketimpangan pembangunan antar setiap sektor publik yang disertai dengan belum adanya inovasi yang mumpuni untuk mengolah setiap sektor tersebut. Hingga saat ini, sektor publik yang ada di Sulawesi Barat masih bergantung pada sektor yang mengandalkan sumber daya alam semisal pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Hal tersebut mendorong lahirnya potensi baru dari sektor industri untuk dapat menjadi satu sektor kekuatan baru bagi Sulawesi Barat dalam meningkatkan dan mengembangkan produksi sektor yang sudah ada. Namun lahirnya potensi baru dari sektor industri ini belum didukung dengan kekuatan sumber daya manusia yang baik. Data Badan Pusat Statistik (2019) menyebutkan bahwa Sektor industri merupakan sektor yang memiliki serapan tenaga kerja paling rendah di Sulawesi Barat dengan jumlah 90.541.³ Dengan jumlah ini, pemerintah provinsi Sulawesi Barat harus menyusun strategi agar sektor industri dapat meningkat lebih maksimal seiring berkembangnya sektor-sektor yang lain. Tidak hanya sampai pada kendala inovasi serta peningkatan sektor industri saja, pembangunan sektor publik di Sulawesi Barat juga masih terfokus pada pembangunan infrastruktur yang dinilai masih kurang untuk menunjang keterbukaan akses bagi pembangunan berbagai sektor yang lebih merata.

pembangunan di berbagai sektor publik ini, secara tidak langsung lebih mendekatkan pemerintah Sulawesi Barat sebagai pemangku

³ BPS Sulawesi Barat, 2019. Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2019, Mamuju: BPS Sulawesi Barat.



kebijakan dengan berbagai *stakeholder* yang lainnya dalam pelayanan untuk bersama membangun SDGs dari tingkatan daerah.

Dengan potensi pembangunan dalam berbagai sektor publik yang dimiliki Provinsi Sulawesi Barat serta perhatian pemerintah pusat kepada daerah ini, mengingat akan menjadi pintu gerbang ke ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur, menjadikan Sulawesi Barat daerah yang akan terus berkembang dengan diiringi pengkajian terhadap implementasi nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan dalam SDGs. Peran segenap *stakeholder*/pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun berbagai strategi inovasi yang terbaru dalam mengembangkan sektor industri dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan sangat diharapkan untuk melihat wajah Sulawesi Barat menjadi Provinsi yang maju serta terdepan dalam mencapai tujuan akhir pembangunan yang berkelanjutan/SDGs Indonesia 2030.

Fokus kajian dalam penelitian ini akan membahas banyak tentang gambaran kondisi sektor publik diatas melalui pengembangan industri, inovasi serta infrastruktur dalam pembangunan di Sulawesi Barat hingga dapat mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang belum berjalan dengan baik. Dengan menganalisis persoalan-persoalan yang telah dijabarkan, penulis kemudian tertarik mengkaji permasalahan tentang peranan pemerintah provinsi dalam membangun potensi daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Penulis kemudian mengangkat judul **“Analisis Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Sektor Publik di Sulawesi Barat”**



1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pengembangan kawasan industri dengan konsep *Sustainable Development Goals* di Sulawesi Barat ?
- 2) Bagaimana pengembangan kapasitas inovasi teknologi dengan konsep *Sustainable Development Goals* di Sulawesi Barat ?
- 3) Bagaimana pengembangan infrastruktur dasar dengan konsep *Sustainable Development Goals* di Sulawesi Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi bagaimana kondisi kekinian dan ketercapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam sektor publik di Sulawesi Barat. Sedangkan mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menggambarkan pengembangan kawasan industri dengan konsep *Sustainable Development Goals* di Sulawesi Barat.
- 2) Untuk menggambarkan pengembangan kapasitas inovasi teknologi dengan konsep *Sustainable Development Goals* di Sulawesi Barat.
- 3) Untuk menggambarkan pengembangan infrastruktur dasar dengan konsep *Sustainable Development Goals* di Sulawesi Barat.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan serta saran kepada pemerintah daerah setempat (pemerintah provinsi Sulawesi Barat) mengenai upaya-upaya strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Barat, juga menambah sumbangsi pemikiran terkait kajian dan studi ilmu pemerintahan secara khusus, serta dapat menjadi langkah awal penelitian serupa di daerah lain.
- 2) Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis, nantinya hasil penelitian tersebut dapat diterapkan di kampus Universitas Hasanuddin dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengkaji tentang capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi barat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

2.1.1 Konsep Pemerintah Daerah/Provinsi

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Menurut Suhady dalam Riawan (2009) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan

nya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan



sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Riawan, 197:2009).⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



awan Tjandra, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

2.1.2 Tugas dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat. Untuk membentuk institusi- institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau adalah konflik kontrak sosial (*social contract*)⁵. Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kemampuannya demi mencapai kemajuan bersama. Osborne dan Gaebler

⁵ Rousseau, J.J. *Social Contract*. 1762.



dalam Rasyid (2000:192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya⁶.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum⁷. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat



Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000, *Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi
a dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.
an Poelje, G.A., Prof. Dr., 1959. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:
Soroengan.

pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.

Sejalan dengan itu, Kaufman dalam Thoha menyebutkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan *power* yang melekat pada posisi jabatan birokrasi⁸. Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung meningkatkan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.



⁸ Rasyid, Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003

Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid, menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh Ndraha, fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan⁹.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekuensi logis bagi distribusi urusan-urusan pemerintahan negara kepada pemerintah daerah (Sarundajang, 2000:16)¹⁰.

Salah satu faktor yang menyebabkan telah mendorong peningkatan distribusi kewenangan pusat kepada daerah ialah terlihat dalam sektor publik dimana berkembangnya sistem komunikasi yang cepat dan langsung, transportasi yang lebih baik, meningkatnya profesionalisme,



Rasyid, M. Ryaas. 1996. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Yasif Watampone
Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar harapan,
Jakarta, 2000.

tumbuhnya asosiasi-asosiasi, pelayanan menjadi lebih baik, dan tuntutan masyarakat yang semakin gencar akan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Beberapa hal tersebut turut menciptakan semakin perlunya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan umum di tingkat daerah. Fungsi-fungsi tersebut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan daya saing daerah dan juga kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dalam sektor publik secara berkelanjutan.

2.1.3 Koordinasi Lembaga-Lembaga Yang Berwenang

Program pembangunan dan pengembangan sektor publik di Sulawesi Barat tidak terlepas dari koordinasi dari peran lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berwenang dalam mengurus permasalahan yang terjadi dalam pembangunan sektor publik terkhususnya dalam pengembangan inovasi, industri, serta infrastruktur daerah. Lembaga pemerintah daerah yang berwenang dan memiliki peran penting dalam mengurus masalah ini ialah :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.

Berdasarkan peraturan gubernur Sulawesi barat nomor 45 tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Bina Marga, Cipta Karya, Pengelolaan Sumber Daya Air, Tata Ruang, dan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan Bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- b) penyelenggaraan Bidang urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan dan penyusunan



- program, Bidang Bina Marga, cipta karya, pengelolaan sumberdaya air, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- c) penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang perkerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan dan penyusunan program, bina marga, cipta karya, pengelolaan sumberdaya air, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
 - e) penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi dinas.
 - f) Penyelenggaraan pengoordinasian dan pembinaan UPTD.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, terdiri atas :

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Bina Marga;
- c) Bidang Cipta Karya;
- d) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e) Bidang Tata Ruang; dan
- f) Bidang Jasa Konstruksi.

2. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan

pemerintahan dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi kebijakan teknis urusan bidang Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi dan pengembangan usaha;
- b) penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian bidang Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi dan pengembangan usaha;
- c) memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Provinsi;
- d) pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi dan pengembangan usaha;
- e) penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- f) menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintahan dan Pembangunan dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota; dan
- g) pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

Sedangkan untuk bidang Perindustrian sendiri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama dalam bidang perindustrian, menyiapkan bahan perumusan, dan penjabaran kebijakan teknis dibidang perindustrian. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan

:



- a) pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Standardisasi dan mutu industri;
- b) pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi industri kecil menengah serta pengawasan;
- c) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dalam pembentukan dan pengembangan dibidangstandardisasi dan mutu industri;
- d) pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan mutu industri;
- e) penyelenggaraan serta fasilitasi standardisasi dan mutu industri;
- f) pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha standardisasi dan mutu industri;
- g) pelaksanaan pengembangan standardisasi dan mutu industri;
- h) pelaksanaan pengembangan badan layanan umum promosi dan dana bergulir sosialisasi standardisasi dan mutu industri;
- i) pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- j) pelaksanaan pengembangan sarana dan penyelenggaraan standardisasi dan mutu industri;
- k) pelaksanaan pengembangan peta pasar produk standardisasi dan mutu industri;
- l) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- m) pengoordinasian dengan unit kerja terkait.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut adalah pemerintah daerah



harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2009 telah diuraikan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah provinsi Sulawesi Barat yakni melaksanakan kewenangan pemerintah provinsi di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tingkat provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- b) Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah meliputi kesekretariatan, penelitian atau pengkajian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan.
- c) Pengelolaan data dan informasi pembangunan dan mengkomunikasikan hasil-hasil perencanaan daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan.
- d) Pengkoordinasian dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan Provinsi dengan nasional serta kabupaten/kota.



2.2 Tinjauan tentang *Sustainable Development Goals*

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai *development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*¹¹. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam *Our Common Future*, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan *The World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. Sejak kemunculannya, pembangunan berkelanjutan mempunyai banyak definisi dan konsep itupun menjadi cair. Meskipun demikian, beberapa hal prinsipil mendapatkan penekanan. Pertama, komitmen pada keadilan dan fairness, dimana prioritas seyogyanya diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi yang akan datang. Kedua, sebagai suatu pandangan jauh ke depan (*long-term*) yang menekankan prinsip-prinsip precautionary, yaitu, dimana ada ancaman serius atau sesuatu yang tidak bisa dicegah, kekurangan kepastian pengetahuan secara penuh seyogyanya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda ukuran-ukuran biaya efektif (*cost-effective measures*) guna mencegah degradasi lingkungan. Ketiga, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan, dan memahami, sekaligus bertindak dalam kesalinghubungan yang kompleks yang ada di antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial ini menjadi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Atas dasar tersebutlah kemudian melandasi sebuah upaya untuk membangun sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Pada tahun 2000, secara resmi digagas *Millenium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang bertujuan untuk

...ai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada
...ngan berbagai tujuan dan target yakni :

...runtland, G. H. (1987), "*World Commission on Environment and Development*",
...am "*Our Common Future*", Oxford: Oxford University



- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem
- 2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Kedelapan tujuan tersebut bila melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kritik-kritik tersebut antara lain tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang sangat birokratis dan teknokatis. Kedua, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif. Sebagai misal, tidak ada perhatian yang cukup terhadap persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender dalam tujuantujuan MDGs. Ketiga, tujuan, targer, dan indikator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Keempat, kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs.

Nah, setelah era MDGs yang telah berakhir pada 2015, kini sedang disusun sebuah dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan selanjutnya bagi rakyat. Oleh karena itu, pembangunan pasca-2015 mulai disusun dengan mengatasi berbagai hambatan-hambatan



untuk kemajuan pembangunan termasuk soal ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif, masyarakat damai dan beberapa persoalan lainnya. Penyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030, diantara target tersebut yakni :

- a. tanpa kemiskinan.
- b. tanpa kelaparan.
- c. kehidupan sehat dan sejahtera.
- d. pendidikan berkualitas.
- e. kesetaraan gender.
- f. air bersih dan sanitasi layak.
- g. energi bersih dan terjangkau.
- h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
- i. industri, inovasi dan infrastruktur.
- j. berkurangnya kesenjangan.
- k. kota dan pemukiman yang berkelanjutan.
- l. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
- m. penanganan perubahan iklim.
- n. ekosistem laut.
- o. ekosistem daratan.
- p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan tangguh.
- q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

Bila disimpulkan tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain. Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah



proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan.

2.2.1 Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal, (Fauzi, 2004) Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi: Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan¹². Pezzey (1992) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah¹³.

Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”

Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep brunland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well-



Fauzi.A. 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi, media Pustaka Utama, Jakarta
Pezzey, John. 1992. Sustainability: An Interdisciplinary Guide. Environmental Issues 1 (4): 321-62.

being) generasi mendatang. Heal (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar; (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic well being*; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan¹⁴.

Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman (1997) dalam Fauzi (2004) mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian: (1) Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*), (2) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang, (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*non declining*), (4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan (5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi¹⁵.

Senada dengan pemahaman diatas, Daly (1990) menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- a) Untuk sumber daya alam yang terbarukan: laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari)
- b) Untuk masalah lingkungan: laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.



Heal, G. 1998 *Valuing the Future : Economic Theory and Sustainability*. Columbia University Press. New York.
Fauzi, A. 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, media Pustaka Utama, Jakarta

- c) Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara *quasisustainable*, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi¹⁶.

Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. (3). Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik¹⁷.

2.3 Tinjauan tentang Sektor Publik

2.3.1 Konsep Dasar Publik

Dalam terma sehari-hari di Indonesia, “publik” dipahami sebagai “negara” atau “umum”. Hal ini dapat kita lihat dalam pola bahasa Indonesia dalam menterjemahkan *public transportation* yang dimaknai sebagai kendaraan umum atau *public transportation* yang diterjemahkan sebagai administrasi negara.

Secara etimologis publik berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yakni “*pubes*” yang berarti kedewasaan secara fisik, emosional



aly, Herman E, (1990). *Sustainable Development: From Concept and Theory to Operational Principles*. Resources, Environment, and Population. 16 (1990): 25-43.
aris, (2000), *Konsep Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan*, Tiga Aspek pemahaman Ekonomi berkelanjutan.

maupun intelektual. Dalam perspektif sosiologi dan psikologi istilah “*pubes*” seringkali disebut dalam terma lain yakni “*puber*”. Terma *pubes* kemudian diinterpretasikan sebagai tahapan kehidupan sosial dalam masa transisi dimana yang mulanya berorientasi pada diri sendiri menjadi memikirkan orang lain di luar dirinya.

Dalam bahasa Yunani istilah publik seringkali dipadankan pula dengan istilah *koinon* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *common* yang bermakna hubungan antar individu. Oleh karenanya, publik seringkali dikonsepsikan sebagai sebuah ruang yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh sebuah institusi kekuasaan atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama. Dalam tulisan Bovaird dan Loffler (2003) dijelaskan bahwa ranah publik merupakan sebuah arena dimana pilihan publik dijalankan dengan harapan untuk mencapai maksud bersama (*collective purpose*)¹⁸. Publik juga dipandang dalam konteks pemahaman politik kelompok dan kelompok-kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk memasuki ruang dialogis dan membuat keputusan terkait dengan kebutuhan komunitas mereka.

Terdapat dua hal yang digaris bawahi melalui konsep ini. *Pertama*, memasuki ruang dialogis. Maksudnya adalah suatu entitas politik dapat dikategorikan sebagai publik manakala mereka melakukan proses dialog dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, bilamana berbagai aspek kehidupan bersama sebuah komunitas menggunakan metode diluar dialogis seperti pemaksaan kehendak atau tindakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah maka komunitas tersebut belum dapat dikategorikan sebagai publik.



ovaird, T & Loffler, E (ed.) (2003) Public Management and Governance.
don: Routledge.

Kedua adalah membuat keputusan. Seringkali kita berpikiran bahwa mengambil keputusan hanyalah sekedar fenomena kehidupan sehari-hari yang biasa. Padahal sebagai manusia yang rasional sesungguhnya pengambilan keputusan merupakan tahapan akhir setelah melampaui rangkaian proses berpikir. Keputusan adalah tindakan mengaktualisasikan produk yang dihasilkan dari proses berpikir yang runtut dan serius. Oleh karenanya, untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang mampu menjawab kebutuhan suatu komunitas tentunya tidaklah mudah. Bahkan dalam konteks masyarakat yang apatis keterlibatan untuk memikirkan dan mengambil keputusan tentang kebutuhan komunitas terkadang kurang diperhatikan. Oleh karenanya, suatu entitas politik dapat dikategorikan publik manakala setiap anggota komunitasnya terlibat secara aktif dan menjadi pelaku utama dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan komunitas mereka.

Selain sejumlah pendekatan di atas, untuk memahami konsep publik dapat dilakukan dengan cara membedaakannya dengan konsep privat. Namun, hingga saat ini masih terdapat perbedaan argumen yang mendasar diantara kalangan akademisi tentang apa yang dianggap sebagai “publik” dan apa yang dianggap sebagai “privat”. Oleh karenanya, kita perlu memilih pijakan awal yang tepat untuk memulai pengkajian kita terhadap perbedaan konsep publik dan privat.

Titik awal yang cukup representatif adalah Yunani dan Romawi kuno. Bangsa Romawi mendefinisikan istilah publik dan privat dalam terma *res publica* dan *res priva*. Gagasan publik dan privat pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah *koinion* (yang dapat diartikan publik) dan *idion* (yang diartikan privat). Analisis Arendt (1983) terhadap dikotomi publik dan privat dapat ditinjau melalui daftar pasangan berlawanan berikut:



Tabel 1. Publik versus Privat

Publik	Privat
Polis	Rumah tangga
Kebebasan	Keharusan (<i>necessity</i>)
Pria	Wanita
Kesetaraan	Kesenjangan
Keabadian	Kesementaraan
Terbuka	Tertutup

Namun, karakterisasi dalam tabel di atas memang masih sederhana dalam menentukan garis demarkasi diantara ruang privat dan ruang publik. Oleh karenanya, berbagai upaya untuk memahami secara lebih *rigid* tentang perbedaan antara ruang privat dan publik terus berkembang. Salah satunya dapat ditemui dalam karya Aristoteles melalui gagasan "*polis*" sebagai bentuk tertinggi asosiasi manusia.

Pada perkembangan berikutnya di awal abad ke-19, para *scholars* ekonomi-politik menggagas bahwa konsep pasar (*market*) merupakan konsep yang dapat mendamaikan konflik antara ruang publik dan privat. Salah satu *scholars* yang memiliki keyakinan tersebut adalah Habermas. Habermas (1989) menyatakan bahwa perkembangan ruang publik pada abad ke-19 di Inggris berasal dari perbedaan yang tegas antara kekuasaan publik dan dunia privat.¹⁹ Cara memaksimalkan kepentingan individual yang sepaket dengan mempromosikan kepentingan publik adalah melalui penggunaan kekuatan pasar. Berfungsinya kebebasan (*freedom*) dan kebebasan individu dalam mengambil pilihan bisa memenuhi kepentingan individu sekaligus meningkatkan ketersediaan barang publik dan kesejahteraan publik. Oleh karenanya, peran Negara dan politik adalah menciptakan kondisi dimana kepentingan publik dapat



Habermas, Jürgen. (1989). *The Structural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into Category of Bourgeois Society*, Thomas Burger (terj.). Cambridge: Cambridge University Press.

terjamin. Konsekuensinya bahwa pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak ikut campur tangan dalam pasar. Namun demikian, bukan berarti pemerintah tidak terlibat dalam penyediaan fasilitas publik. Dalam hal ini yang menjadi pembatas penting bagi peran pemerintah adalah kebebasan ekonomi. Sebab, Habermas berhipotesis bahwa kepentingan publik akan terlayani dengan baik apabila kepentingan kebebasan ekonomi dan pasar difasilitasi oleh negara, bukannya dibatasi oleh negara.

Pendapat ini mengasumsikan bahwa ketertiban merupakan hasil Spontan dari pilihan privat. Oleh karena nya, intervensi publik dipersilahkan saja sepanjang mampu menjamin penegakan hukum, menjamin hak hak asasi dan ketertiban, akan tetapi intervensi sama sekali tidak diperkenankan untuk mencampuri Equilibrium alami yang muncul dari kepentingan individu (*self interest*). Oleh karena nya, konsep ini disebut dengan Utilitarianisme, yakni memaksimalkan nilai kegunaan bagi individu. Pada dasarnya konsep Utilitarian yang ditawarkan Habermas tersebut bersandar pada gagasan liberalisme yang dapat kita temui pula dalam karya Adam Smith, atau tulisan tulisan James mill, Torens, McCulloch atau Parsons.

Akan tetapi, gagasan liberalisme mengenai pembedaan yang tegas antara ruang publik dan privat mulai runtuh sejak memasuki abad ke 19. Infiltrasi kebijakan publik ke dalam ruang privat mulai terjadi di hampir semua bidang kehidupan sosial. Proses Kolektivisasi dalam ruang publik ini terjadi karena alasan bahwa jenis jenis problem tertentu tak lagi bisa dianggap sebagai persoalan privat secara murni. Mill (1968) menyatakan bahwa pemberangusan yang dilakukan oleh sektor publik ini sebagai "*harm*" (merugikan), sebab ruang privat adalah ruang yang tidak merugikan orang lain. Namun, permasalahannya adalah "tidak merugikan" merupakan konsep yang tidak statis dan terus berubah seiring dengan

lahan informasi sosial. Kedinamisan konsep tersebut mendorong a reformasi. Oleh karena nya, menjelang awal abad ke-20, perbedaan antara publik dan privat mengalami perubahan yang



cukup signifikan. Neoliberalisme seperti yang dipopulerkan oleh Dewey di Amerika atau Hobbhouse dan Keynes di Inggris menyatakan bahwa pasar semakin sulit untuk menciptakan titik temu (*convergence*) antara kepentingan privat dan publik. Pasar tidak lagi mampu menciptakan ketertiban secara Spontan. Menurut Dewey dan Keynes, yang bisa menjadi penyeimbang dan sekaligus memenuhi kepentingan ruang publik dan privat adalah *knowledge* atau Dewey menyebutnya sebagai *organized Intelegence*²⁰. Dengan demikian, Era Laissez-faire telah berlalu, semua hal sah saja di intervensi oleh sektor publik selama tindakan yang diambil oleh pemerintah dinilai “cerdas” dan mendatangkan keuntungan. Oleh karena nya, pendamai perseteruan antara ruang privat dan ruang publik adalah pemerintah yang berpengetahuan (*knowledgeable government*). Hal ini bukanlah sesuatu yang baru sebab Plato pernah menyatakan bahwa: *philosophers would make the best of kings* (seorang raja yang baik adalah seorang filsuf)²¹.

Dalam tulisan Barber sebagaimana dikutip oleh Massey (1993) dikemukakan bahwa sektor publik memiliki 10 (sepuluh) ciri penting yang membedakannya dengan sektor privat, yaitu:

- a) Sektor publik lebih kompleks dan menjalankan aktivitas yang lebih ambigu.
- b) Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam mengimplementasikan keputusan keputusannya.
- c) Sektor publik berurusan dengan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam.
- d) Sektor publik lebih fokus terhadap usaha mempertahankan peluang dan kapasitas.
- e) Sektor publik lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar.



Dewey, John, 1966. *Democracy and Education*. London: Collier Macmillon
Publisher
Plato, 2002, *Republik*, Terjemahan Sylvester G. Sukur, Bintang Budaya,
Jakarta.

- f) Sektor publik lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki signifikansi Simbolik.
- g) Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas.
- h) Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu-isu keadilan dan kejujuran (*fairness*).
- i) Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik.
- j) Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta²².

2.3.2 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3)²³. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2006:16-17)²⁴. Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak (*Intangible*).

Pelayanan merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan diantaranya adalah Moenir (Harbani Pasolong, 2007:128). Harbani Pasolong menjelaskan pelayanan pada dasarnya dapat



Hassey, Andrew (edt). (2012). *International Handbook on Civil Service Systems*.
 eltenham. Edward Edgar Publishing.
 inambela, L.P. 2010. Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan
 lementasi, cetakan kelima Jakarta: PT. Bumi Aksara
 Moenir, H.A.S. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta:Bumi
 ara.

didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Hasibuan mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik, sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima (Harbani Pasolong, 2007:4)²⁵.

Menurut Kotler dalam (Sampara Lukman, 2000:8) mengemukakan, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara Lukman menambahkan bahwa, pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sampara Lukman, 2000:5)²⁶. Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005:2), yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan²⁷. Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara.

Kata *public* sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik, yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu, 2001:781-782) berarti umum, orang banyak, ramai²⁸. Dengan demikian, maka pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

²⁵ Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung
Sampara Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: Stia Lan
ss.
atik, dan ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan
del konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*.
Jakarta: Pustaka Pelajar
Badudu, 2001:781-782)



mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto, 2005:5)²⁹.

Menurut Batinggi, pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum (Batinggi, 1998:12)³⁰. Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara. Sedangkan menurut Agung Kurniawan, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Harbani, 2007:135)³¹. Sedangkan menurut Sadu Wasistiono dalam Handyaningrat (1994:64), pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat³².

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

²⁹ Atik, dan ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*.

Jakarta: Pustaka Pelajar

Batinggi, Ahmad. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Universitas Pustaka Bentley.

Asolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung

Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.



oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 diuraikan bahwa: “Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah”.

Secara garis besar jenis-jenis layanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a) Kelompok Pelayanan Administratif

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya (sertifikat hak cipta). Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Membangun Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dsb.

b) Kelompok Pelayanan Barang



Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang digunakan oleh publik misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga kerja bersih, dsb.

c) Kelompok Pelayanan Jasa

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

Kegiatan pelayanan publik pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak masyarakat. Seperti yang dilaksanakan pada instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh pemerintah haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dengan waktu yang singkat, mudah serta dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat yang menikmati layanan itu. Adapun layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya berbeda-beda. Moenir (2000:190)³³, menyatakan bahwa bentuk pelayanan umum dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

a) Layanan dengan Lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang hubungan masyarakat, bidang informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan:

- Memahami masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat dan jelas, sehingga memuaskan bagi mereka yang memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.



Moenir. 2000. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bina Aksara.

- Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
- Memiliki kedisiplinan dalam melayani.

b) Layanan melalui Tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan tulisan terbagi atas dua bagian yaitu:

- Layanan berupa petunjuk yaitu informasi dan yang sejenisnya ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan supaya memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi.
- Layanan berupa berkas tertulis atas permohonan yaitu berupa laporan, keluhan, pemberian dan pemberitahuan.

Adapun kegunaan layanan melalui tulisan antara lain:

- Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan.
- Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas.
- Mampurlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan.
- Menuntun orang ke arah yang tepat.

c) Layanan Bentuk Perbuatan

Layanan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan lisan, hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi tujuan utama orang yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan tanggapan secara lisan.



Umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-petugas yang memiliki faktor keahlian dan keterampilan. Dalam kenyataan sehari-sehari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan pelayanan secara umum banyak dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak.

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar atau asas-asas dasar pelayanan umum yaitu sebagai berikut:

- Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegangan pada efisiensi dan efektifitas.
- Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan supaya dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan mendasar mengapa pelayanan umum harus diberikan adalah adanya *public interest* atau kepentingan umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena memiliki tanggung jawab



atau *responsibility*. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan.

2.4 Kerangka Pikir

Pemerintah memiliki peran dalam proses pembangunan suatu daerah. Peran pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjadi peran yang utama dalam proses ketercapaian indikator pembangunan di suatu daerah terlebih dalam pembangunan pada sektor publik. Pembangunan daerah diharapkan terwujud melalui sektor publik untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. (Peraturan Daerah Sulawesi Barat nomor 3 tahun 2017).

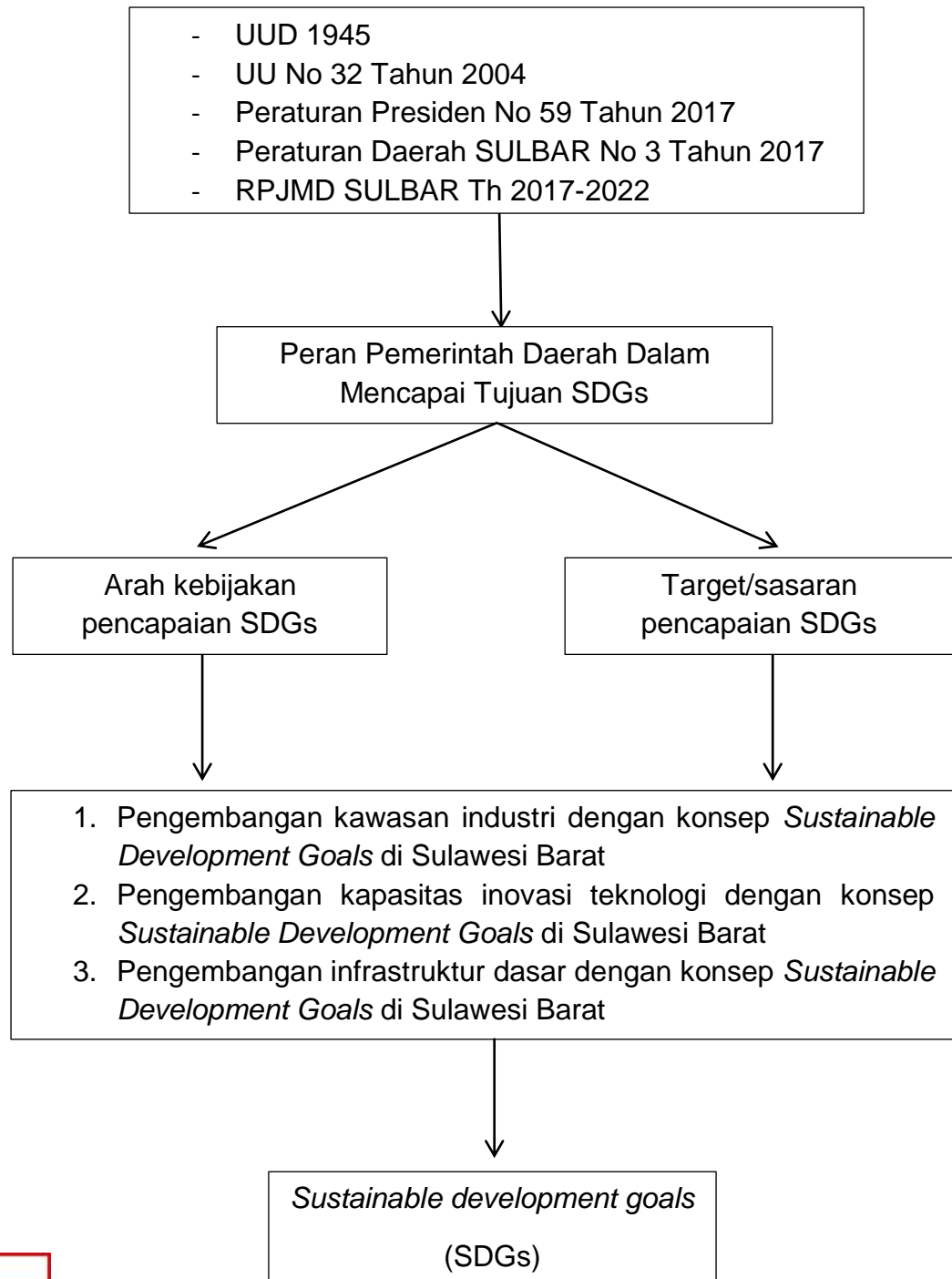
Dalam upaya ketercapaian pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi barat, dapat diukur melalui seberapa besar ketercapaian setiap indikator SDGs terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan. Serta bagaimana pemerintah daerah dapat menyelaraskan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan tujuan dan nilai yang telah dibawah di dalam SDGs. Hal ini termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2018. Salah satu tujuan yang akan dianalisis secara lebih komprehensif dari 17 tujuan SDGs di Provinsi Sulawesi Barat ialah tujuan ke-sembilan yakni inovasi, industri, dan infrastruktur. Dimana dalam mencapai keberhasilan tujuan SDGs tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Terkhusus pemerintah daerah Sulawesi Barat harus memiliki peran serta analisis yang lebih

agar proses implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat lokal. Maka untuk melihat dan menganalisis capaian tujuan ke-sembilan SDGs dalam sektor publik di Sulawesi



Barat dalam proses pelaksanaannya maka diperlukan kerangka konsep sebagai berikut ini:

Gambar 1. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada arah pembangunan sektor publik di daerah Sulawesi barat. Agar dapat menerapkan metode ilmiah dalam penelitian ini maka diperlukan suatu desain penelitian, yang mampu memahami situasi secara mendalam, menemukan pola dan sesuai dengan kondisi penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Komponen yang perlu diperhatikan dalam mengadakan penelitian antara lain:

3.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperoleh suatu gambaran, pengetahuan dan dan memperoleh pemahaman. Oleh sebab itu, tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan tipe penelitian deskriptif kualitatif ini didasarkan pada maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan serta pencapaian tujuan dari SDGs dalam sektor publik di Provinsi Sulawesi Barat. Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan memahami bagaimana peran segenap *stakeholder* dalam upaya untuk mencapai tujuan SDGs dalam sektor publik dapat terwujud dan terimplementasikan dalam setiap rencana serta pelaksanaan proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di wilayah Ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang berfokus pada data di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Badan naan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Barat.



3.3. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang memiliki peran dalam pembuatan kebijakan dan pembangunan sektor publik di daerah Sulawesi barat. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Gubernur Sulawesi Barat
- b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Barat
- c) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulawesi Barat
- d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulawesi Barat
- e) Pelaku Usaha di Sulawesi Barat
- f) Organisasi/Yayasan Pecinta Lingkungan di Sulawesi Barat

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Obsevasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap pembangunan sektor publik di daerah ibukota Sulawesi barat.
- b) Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan.

studi kepustakaan (*library research*) yaitu, dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan



media informasi lain yang ada hubungannya dengan pembangunan sektor publik di Provinsi Sulawesi Barat.

- d) Dokumentasi data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti studi kepustakaan di atas. Namun yang akan membedakan hanya media tempat pengambilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas internet.

3.5. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

- a) Data primer

Data yang di peroleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan berupa data *interview* (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

- b) Data sekunder

Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

3.6. Defenisi Konsep

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian yang dioperasikan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a) Pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh gubernur, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.



- b) Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- c) Sektor publik adalah sebuah arena dimana pilihan *public* dijalankan dengan harapan untuk mencapai maksud bersama (*collective purpose*). Publik juga dipandang dalam konteks pemahaman politik kelompok dan kelompok-kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk memasuki ruang dialogis dan membuat keputusan terkait dengan kebutuhan komunitas mereka.
- d) Infrastruktur dasar diartikan sebagai sebuah sarana dan prasarana umum. Dimana sarana yang dimaksud berupa fasilitas publik seperti jalan, saluran air, zonasi dan sebagainya. Infrastruktur dasar juga merupakan wujud dari modal publik (*public capital*) dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- e) Inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya.
- f) Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.



3.7. Analisis Data

Berangkat dari penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ketingkat abstraksi yang lebih tinggi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat adalah Provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Dengan Ibukota Provinsi terletak di Mamuju. Serta terdiri dari 6 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Luas wilayah provinsi Sulawesi Barat sekitar 16,796.19 km². Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%).

Bertolak dari semangat "*Allamungan Batu di Luyo*" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "*Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu*" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar. Semangat "Sipamandar" inilah, sehingga sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Mandar yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1960 diumumkan dan diumumkan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru dan perjuangan tetap berjalan, namun selalu menemui jalan buntu yang



akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok, kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polman. Pada masa penjajahan, wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah bagian dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang meliputi empat onder afdeling, yaitu Onder Afdeling Majene beribukota Majene, Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju, Onder Afdeling Polewali beribukota Polewali, Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa. Onder Afdeling Majene, Mamuju dan Polewali yang terletak di sepanjang garis pantai barat pulau Sulawesi mencakup 7 wilayah kerajaan (Kesatuan Hukum Adat) yang dikenal dengan nama Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai) yang meliputi : Balanipa di Onder Afdeling Polewali (dipimpin oleh Ambo Caca Daeng Magasing), Binuang di Onder Afdeling Polewali, Sendana di Onder Afdeling Majene, Banggae/Majene di Onder Afdeling Majene, Pamboang di Onder Afdeling Majene, Mamuju di Onder Afdeling Mamuju, Tappalang di Onder Afdeling Mamuju.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulawesi Selatan sebagaimana di atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.

ak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali) resmi terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi i Barat, dengan ibukota Provinsi di kota Mamuju. Selanjutnya,



Kabupaten Polewali Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa). Adapun Gubernur pertama yakni Oentarto Sindung Mawardi, yang memimpin sejak tanggal 16 oktober 2004 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2005, kemudian digantikan oleh Syamsul Arif Rivai sejak tanggal 21 Oktober 2005 sampai dengan 14 Desember 2006, kemudian di gantikan oleh H. Anwar Adnan Saleh sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan 14 Desember 2016 selama sepuluh tahun menjabat sebagai gubernur, setelah masa jabatannya selesai kemudian digantikan oleh Sekretaris Daerah Ismail Zainuddin mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, setelah itu digantikan lagi pejabat Gubernur Irjen Pol Carlo Brix Tewu sampai hasil pemilihan gubernur diumumkan dan dilantik.

Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau 'yang terlupakan' di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting yaitu jaraknya yang cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan sarana prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar dan beberapa kelompok sub etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) pada awal tahun 1960an.

Sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999 – 2000, dan sempat menjadi 'aikon nasional' gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan 'Risalah Demokrasi' menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan

ar; serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama pembelot' (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan



kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).

4.1.2 Kondisi Geografis Dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Barat terletak antara antara $0^{\circ}46'13,03''$ - $03^{\circ}46'13,4''$ Lintang Selatan (LS) dan $116^{\circ}47'22,6''$ - $119^{\circ}52'17,07''$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Sulawesi Barat berupa daratan $16.787,18$ km² sedangkan luas wilayah lautan $20.851,00$ km² dengan panjang garis pantai 677 km serta jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 40 pulau. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Barat memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Sejak awal terbentuk pada tahun 2004, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satunya ditandai di bidang pemerintahan, pada awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari lima kabupaten. Pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari enam wilayah kabupaten yaitu Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamuju Tengah dengan Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2017 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61, Kabupaten Mamuju Utara berubah nama menjadi Kabupaten Pasangkayu. Dengan posisi geografis setiap kabupatennya sebagai berikut:



- Kabupaten Majene dengan ibukota Majene. Terletak pada posisi 0° 46' 13,03" - 3° 46' 13,4" LS dan 116° 47' 22,6" - 119° 52' 17,07" BT.
- Kabupaten polewali mandar dengan ibukota polewali. Terletak pada posisi 03° 40' 00" - 3° 32' 5,28" LS dan 118° 53' 58,2" - 119° 29' 35,8" BT.
- Kabupaten mamasa dengan ibukota mamasa. Terletak pada posisi 2° 39' 216" - 3° 19' 288" LS dan 119° 0' 216" BT - 119° 38' 144" BT.
- Kabupaten mamuju dengan ibukota mamuju. Terletak pada posisi 1° 38' 110" - 2° 54' 552" LS dan 11° 54' 47" - 13° 5' 35" BT.
- Kabupaten mamuju utara dengan ibukota pasangkayu. Terletak pada posisi 0° 40' 10" - 1° 50' 12" LS dan 119° 25' 26" - 119° 50' 20" BT.
- Kabupaten mamuju tengah sebagai daerah otonom baru (DOB) dengan ibukota tobadak. Terletak pada posisi 1° 43' 42,90" - 2° 18' 30,08" LS dan 119° 25' 26" - 119° 50' 20" BT.

Adapun rincian luasan masing-masing Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 2.

**Tabel 2. Luas dan Jarak ke Ibukota Menurut Kabupaten
Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Kabupaten	Ibukota Kabupaten	Luas (km ²)	Presentase (%)	Jarak ke Ibukota (km ²)
1	Majene	Majene	947,84	5,64	143
2	Polewali Mandar	Polewali	1.775,65	10,58	199
3	Mamasa	Mamasa	3.005,88	17,91	292
4	Mamuju	Mamuju	4.999,69	29,78	-
5	Pasangkayu	Pasangkayu	3.043,75	18,13	276
	Mamuju Tengah	Tobadak	3.014,37	17,96	115
	Provinsi Sulawesi Barat		16.787,18	100,00	-

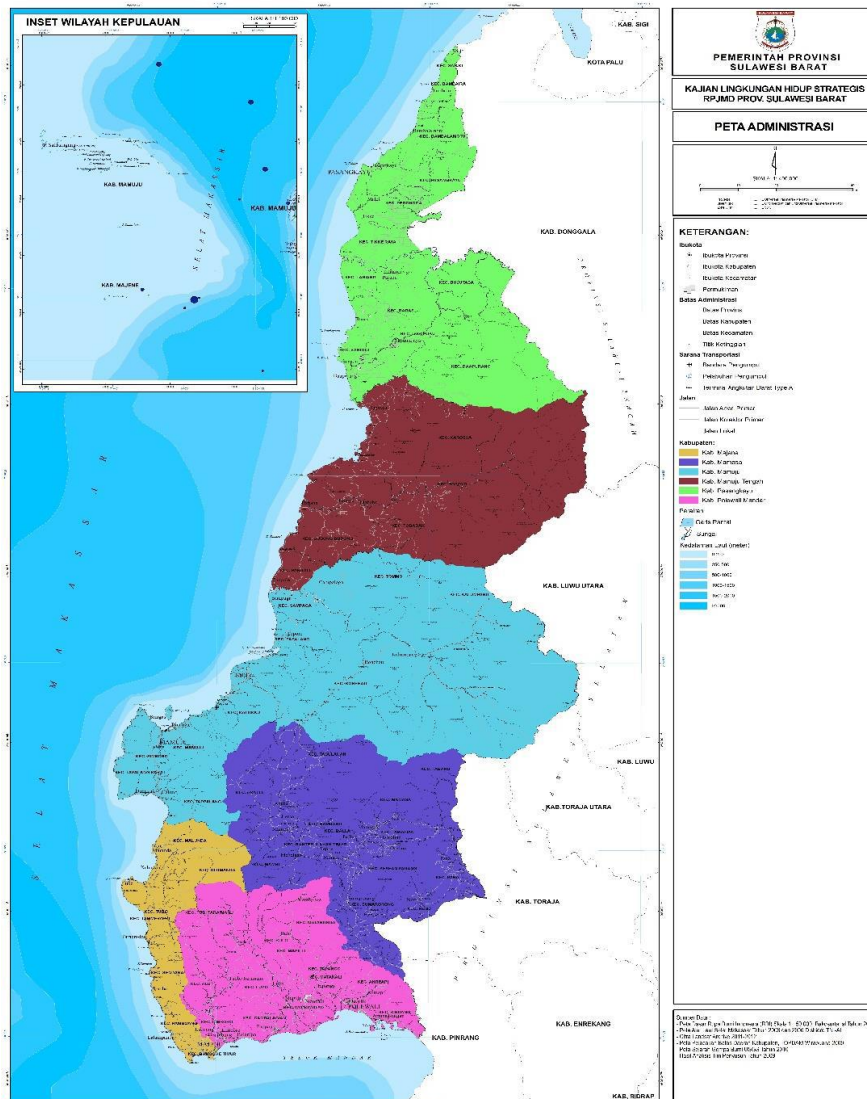
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019



Berdasarkan data luas setiap Kabupaten tersebut, Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah administrasi terluas diantara lima kabupaten lainnya dengan luasan 4.999,69 km² dan persentase 29,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Barat. Adapun kabupaten yang memiliki luasan terkecil di Provinsi Sulawesi Barat adalah kabupaten Majene dengan luasan kurang dari 1.000 km² dan persentase 5,64 persen dari luas Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan Kabupaten yang memiliki jarak terjauh ke Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah kabupaten Mamasa yang hampir mencapai jarak 300 km.

Berdasarkan data pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa memiliki jumlah kecamatan terbanyak yang terdiri atas 17 kecamatan, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki jumlah kecamatan paling sedikit yang terdiri atas 5 kecamatan. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki wilayah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dengan 3 UPT. Adapun rincian jumlah kecamatan, desa, kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 2.





Gambar 2. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat

(Bappeda Sulawesi Barat, 2014)



Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Unit Pemukiman Transmigrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)
1	Majene	8	82	20	-
2	Polewali Mandar	16	167	23	-
3	Mamasa	17	181	13	-
4	Mamuju	11	101	13	-
5	Pasangkayu	12	63	4	-
6	Mamuju Tengah	5	54	-	3
Sulawesi Barat		69	638	73	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

4.1.3 Kondisi Topografi

Provinsi Sulawesi Barat memiliki kondisi topografi yang bervariasi mulai dari pesisir, dataran rendah, perbukitan, daerah dataran tinggi sampai pada daerah pegunungan. Daerah pesisir dapat ditemukan di semua kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Barat kecuali Kabupaten Mamasa yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu memiliki topografi dari daerah pesisir hanya sampai pada daerah yang agak berbukit. Sedangkan untuk Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Tengah memiliki kondisi topografi yang lengkap dari wilayah pesisir hingga daerah pegunungan.

Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk diirigasi. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu 30 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian barat dan timur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah



yang terbentuk merupakan wilayah yang curam. Adapun rincian kondisi topografi disajikan pada Gambar 3.

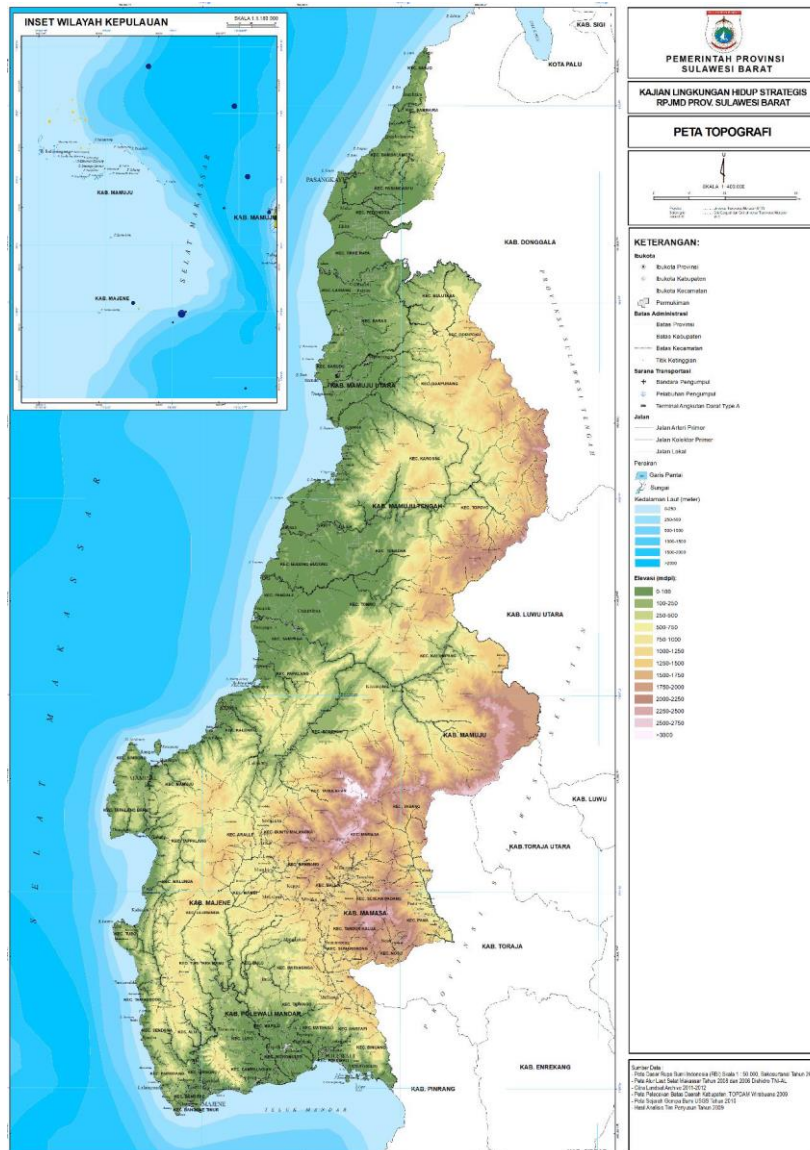
Tabel 4. Jumlah Gunung dan nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten	Jumlah Gunung	Nama Gunung Tertinggi	Ketinggian Gunung (mdpl)
Majene	11	Seteng	1.001
Polewali Mandar	28	Tetuh	1.448
Mamasa	31	Mambuliling	2.873
Mamuju	109	Ganda Dewata	3.037
Mamuju Tengah	14	Pandabatu	2.840

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 gunung yang tersebar di beberapa kabupaten. Kabupaten Mamuju memiliki jumlah gunung terbanyak diantara kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat dengan 109 gunung. Salah satu gunung di Kabupaten Mamuju merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat yaitu gunung Ganda Dewata yang memiliki tinggi sekitar 3.037 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Mamasa memiliki jumlah gunung 31 gunung dengan nama gunung tertinggi Mambuliling yang memiliki tinggi sekitar 2.873 meter diatas permukaan laut. Sementara itu, Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah gunung sebanyak 28 gunung, Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah 14 gunung dan Kabupaten Majene 11 gunung. Adapun rincian jumlah gunung dan naman gunung tertinggi menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 4 diatas.





Gambar 3. Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat

(Bappeda Sulawesi Barat, 2014)



4.1.4 Kondisi Iklim

Iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan, khususnya terhadap siklus hidrologi, sumber daya tanah, air dan tanaman. Ketersediaan air bagi kepentingan makhluk hidup di atas permukaan tanah sangat ditentukan oleh keadaan iklim dan ekosistemnya. Berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan tinggi, seringkali mengakibatkan terjadinya pencucian hara dan translokasi partikel-partikel tanah, baik secara lateral yang membawanya ke daerah aliran, maupun vertikal pada tubuh tanah dari horison atas ke horison tanah di bawahnya. Data iklim Provinsi Sulawesi Barat diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Majene. Data iklim tersebut meliputi suhu, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan penyinaran matahari.

Kondisi iklim Provinsi Sulawesi Barat diperoleh pada tahun 2016. Iklim di wilayah Sulawesi Barat umumnya tropis karena berada dibawah garis khatulistiwa dan mempunyai kelembapan udara yang relatif tinggi. Sebagaid daerah dengan pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, maka Sulawesi Barat memiliki pola suhu udara yang bergantung kepada angin laut. Adapun kondisi iklim Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 5, 6, dan Tabel 7.

Tabel 5. Rata-Rata Suhu dan Kelembapan Udara Menurut Bulan Provinsi Sulawesi Barat

Bulan	Suhu (°C)			Kelembapan udara (%)
	Max	Min	Rata-rata	
Januari	35,0	22,0	27,7	77,0
Februari	33,4	23,0	27,2	81,0
Maret	33,4	22,4	27,6	79,0
April	33,0	22,8	27,9	80,0
Mei	32,8	23,6	28,4	80,0
Juni	32,2	23,4	27,6	80,0
Juli	31,5	23,4	27,5	77,0
Agustus	32,8	23,2	28,0	75,0
September	34,0	22,0	28,4	72,0



Oktober	34,6	23,0	28,4	77,0
November	33,4	23,8	28,3	79,0
Desember	33,8	22,6	27,6	80,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Tabel 6. Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Menurut Bulan Provinsi Sulawesi Barat

Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	1.009,50	315/3	58,80
Februari	1.011,70	315/2	66,30
Maret	1.010,90	360/3	66,30
April	1.010,90	060/2	83,80
Mei	1.011,20	110/4	85,00
Juni	1.012,20	110/5	75,00
Juli	1.011,70	90/6	78,80
Agustus	1.012,30	90/3	91,30
September	1.012,60	90/5	88,80
Oktober	1.012,50	90/3	92,50
November	1.011,70	90/3	80,00
Desember	1.010,90	270/3	56,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Tabel 7. Jumlah Curah Hujan Bulanan dan Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi Sulawesi Barat

Bulan	Curah hujan (mm3)	Hari hujan
Januari	189,4	20
Februari	212,8	19
Maret	146,2	20
April	172,1	22
Mei	60,2	16
Juni	119,1	14
Juli	44,1	10



Agustus	0,5	3
September	11,3	5
Oktober	226,0	14
November	106,8	19
Desember	310,3	21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Majene pada tahun 2018, suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 22°C hingga 35°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,90°C. Kelembaban udara dalam satu tahun berkisar antara 33 persen sampai dengan 100 persen. Pada tahun tersebut pula, Sulawesi Barat memiliki jumlah hari hujan tertinggi terjadi di bulan April yaitu 22 hari hujan dan terendah pada bulan Agustus yaitu 3 hari hujan. Adapaun uraian kondisi iklim Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Rata Uraian Kondisi Iklim Provinsi Sulawesi Barat

Kondisi Cuaca	Deskripsi
Suhu/Temperature (oC)	-
Maksimum/Maximum	22
Minimum/Minimum	35
Rata-rata/Average	27,90
Kelembaban Udara (persen)	-
Maksimum	100
Minimum	33
Rata-rata/Average	79
Tekanan Udara (mb)	1.010,10
Kecepatan Angin (knot)	4
Curah Hujan (mm3)	140,25
Jumlah Sinar Matahari (persen)	77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019



4.1.5 Kondisi Demografi

Penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi tahun 2018 sebanyak 1.355.554 jiwa yang terdiri atas 680.325 jiwa penduduk laki-laki dan 675.229 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 1,85 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan tahun 2018 adalah 100,75.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 mencapai 81 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,45 orang. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 246 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 43 jiwa/km². Adapun data jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 menurut kabupaten disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Jumlah Penduduk pada Tahun 2016 - 2018 Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Kabupaten (ribu)						Sulawesi Barat
	Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah	
2016	166,40	427,48	154,93	272,26	161,03	124,38	1.306,48
2017	169,07	432,69	156,97	279,39	165,23	127,60	1.330,96
2018	171,27	437,66	159,20	286,39	170,20	130,83	1.355,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Berdasarkan data kependudukan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terus mengalami penambahan jumlah penduduk di setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap jumlah penduduk pada Provinsi Sulawesi Barat yang terus meningkat dengan rata-rata penambahan jumlah penduduk setiap tahun



sekitar 20.000 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk terbesar berada pada Kabupaten Mamuju dengan pertambahan jumlah penduduk kurang lebih 7.000 penduduk setiap tahunnya. Sedangkan Kabupaten Majene dan Mamasa hanya memiliki pertambahan penduduk kurang lebih 2.000 jiwa setiap tahunnya. Adapun kepadatan penduduk dan distribusi penduduk menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Kepadatan Penduduk dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Distribusi Penduduk (%)
1	Majene	181	12,63
2	Polewali Mandar	246	32,29
3	Mamasa	53	11,74
4	Mamuju	57	21,13
5	Pasangkayu	56	12,56
6	Mamuju Tengah	43	9,65
Sulawesi barat		81	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Berdasarkan data tahun 2018, kepadatan jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan penduduk 246 jiwa/km² dengan distribusi sebesar 32,29 persen dari penduduk Provinsi Sulawesi Barat. Kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Mamuju Tengah dengan kepadatan penduduk 43 jiwa/km² dan distribusi penduduk dibawah 10 persen dari penduduk provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Majene memiliki kepadatan terbesar kedua setelah Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan penduduk 181 jiwa/km², namun nilai distribusi penduduknya kecil di Sulawesi Barat yang memiliki distribusi 12,63 persen. Adapun Jumlah penduduk dan menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada



**Tabel 11. Jumlah penduduk dan Rasio Menurut Jenis kelamin
Provinsi Sulawesi Barat**

Jenis kelamin	Kabupaten (ribu)						Sulawesi Barat
	Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah	
Laki-Laki	83.910	214.684	80.678	145.479	88.164	67.410	680.325
Perempuan	87.362	222.978	78.523	40.910	82.039	63.417	675.229
Jumlah	171.272	437.662	159.201	286.389	170.203	130.827	1.355.554
Rasio	96,05	96,28	102,74	103,24	107,47	106,30	100,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Rasio jenis kelamin di Provinsi Sulawesi barat sebesar 100,75 dengan penduduk laki-laki lebih banyak sekitar satu persen dari penduduk perempuan. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten, ada empat kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Mamasa, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah yang memiliki jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jenis kelamin perempuan.. Adapun Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene memiliki jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Struktur Usia penduduk Provinsi Sulawesi Barat dibagi kedalam 16 kelompok umur dengan interval umur lima tahun. Kelompok umur usia muda memiliki jumlah penduduk yang besar yaitu umur 0-40 tahun. Kelompok umur usia muda tersebut disetiap kelompok umur penduduknya lebih dari 100.000 penduduk. Sedangkan kelompok umur diatas 40 tahun disetiap kelompok umur tidak mencapai 100.000 penduduk. Kelompok umur dengan jumlah penduduk terbesar pada kelompok umur 10-15 tahun yang mencapai 130.000 penduduk. Jumlah penduduk terkecil pada kelompok umur 70-74 tahun dibawah 20.000 penduduk. Adapun rincian

penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Barat pada Tabel 12.



**Tabel 12. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	<4	76.334	73.809	150.143
2	5-9	71.537	68.743	140.280
3	10-15	67.467	63.630	131.097
4	15-19	66.206	62.929	129.135
5	20-24	61.499	59.452	120.951
6	25-29	54.086	54.758	108.844
7	30-34	50.887	52.731	103.618
8	35-39	49.428	51.399	100.827
9	40-44	47.595	47.761	95.356
10	45-49	41.199	40.420	81.619
11	50-54	30.179	29.871	60.050
12	55-59	22.072	22.493	44.565
13	60-64	16.082	16.823	32.905
14	65-69	11.181	12.172	23.353
15	70-74	7.403	8.760	16.163
16	>75	7.170	9.478	16.648

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

4.1.6 Kondisi Sosial

Kondisi sosial suatu daerah dilihat dari kondisi kehidupan masyarakatnya. Kondisi kehidupan masyarakat tersebut dapat dilihat dari agama, budaya, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, tingkat kesejahteraan, nilai norma dan lain sebagainya. Kemiskinan merupakan salah satu penilaian untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan salah satu permasalahan sosial, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan atau persoalan yang kompleks dan harus diselesaikan di segala aspek kehidupan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pada



umumnya pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluarannya perkapitanya dibawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah. Hal yang perlu dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, memerlukan keterpaduan dan terintegrasi. Namun isu permasalahan dalam penanggulangannya belum terintegrasi di beberapa aspek. Sehingga angka kemiskinan cenderung lambat penurunannya. Adapun rincian data garis kemiskinan dan angka kemiskinan tahun 2009-2018 disajikan pada Tabel 13.

**Tabel 13. Garis kemiskinan dan Angka Kemiskinan Tahun 2009-2018
Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase Penduduk Miskin
2009	163.224	158,23	15,29
2010	171.356	141,33	13,58
2011	186.041	164,14	13,89
2012	198.792	159,51	13,24
2013	213.403	151,11	12,30
2014	233.838	153,89	12,27
2015	261.881	160,48	12,40
2016	286.840	152,73	11,74
2017	302.852	149,76	11,30
	319.121	151,78	11,25

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019



Berdasarkan data garis kemiskinan dan angka kemiskinan Tahun 2009-2018 tersebut, garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2009, garis kemiskinan mencapai angka 163.224. Pada Akhir tahun 2018 garis kemiskinan meningkat, sehingga garis kemiskinan mencapai angka 319.121. Sementara itu angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tersebut, namun berdasarkan persentase jumlah penduduk terus mengalami penurunan kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin tahun 2017-2018 menurut kabupaten disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Tahun 2011-2016 Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	2017	2018
1	Majene	23,48	23,53
2	Polemali Mandar	69,25	69,68
3	Mamasa	21,14	21,22
4	Mamuju	19,11	20,42
5	Pasangkayu	7,96	7,65
6	Mamuju Tengah	8,82	9,28
Sulawesi Barat		149,76	151,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Angka kemiskinan disetiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan jika dilihat dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Semua kabupaten mengalami peningkatan angka kemiskinan kecuali Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2018 Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan angka kemiskinan lebih dari 300.

Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan

an dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota di Indonesia. Pendidikan mempunyai peranan



yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi pula secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA yang ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah, yang pada gilirannya berujung pada peningkatan sumberdaya manusia. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari persentase tidak atau belum sekolah, masih sekolah dan tidak sekolah lagi. Pada jenis kelamin laki-laki pada penduduk berumur 7-24 tahun memiliki partisipasi sekolah terendah dengan 1,08 persen yang belum atau tidak sekolah. Pada penduduk umur yang sama yang berjenis kelamin perempuan memiliki partisipasi sekolah 0,78 persen yang tidak atau belum bersekolah. Pada Provinsi Barat dapat dideskripsikan bahwa semakin meningkat kelompok umur, maka akan semakin rendah angka partisipasi sekolah. Hal tersebut dilihat dari turunnya angka penduduk sementara sekolah dan semakin meningkatnya angka penduduk yang tidak sekolah lagi. Pada kelompok umur 19-24 tahun yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang tidak bersekolah lagi berada pada angka sekitar 75 persen. Penduduk yang tidak atau belum sekolah pada jenis kelamin dan kelompok umur relatif tidak berbeda yang berada pada kisaran 0,06 persen sampai 1,5 persen. Adapun partisipasi sekolah menurut jenis kelamin dan kelompok umur sekolah disajikan pada Tabel 15.



Tabel 15. Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah Provinsi Sulawesi Barat

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah		
		Tidak/belum Pernah Sekolah	Sementara Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-laki	7-12	1,25	98,12	0,63
	13-15	1,41	86,93	11,66
	16-18	0,00	64,46	35,54
	19-24	1,29	21,62	77,09
	7-24	1,08	68,12	30,79
Perempuan	7-12	1,41	98,39	0,20
	13-15	0,66	92,94	6,40
	16-18	0,12	73,20	26,68
	19-24	0,47	26,70	72,83
	7-24	0,78	72,29	26,93
Laki-laki & Perempuan	7-12	1,33	98,25	0,42
	13-15	1,03	89,95	9,02
	16-18	0,06	68,69	31,25
	19-24	0,89	24,10	75,01
	7-24	0,94	70,16	28,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Dalam melihat kembali partisipasi sekolah perlu dilihat dari angka partisipasi sekolah secara murni maupun angka partisipasi secara kasar berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan. Pada Provinsi Sulawesi Barat memiliki angka partisipasi secara murni yang semakin menurun, jika semakin meningkat jenjang pendidikan. Namun tidak terjadi pada partisipasi secara kasar yang cenderung stabil pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajatnya dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajatnya. Pada jenjang



pendidikan Sekolah Dasar (SD) angka partisipasi murni sebesar 95,83 persen sedangkan angka partisipasi kasar sebesar 108,56 persen.

Kualitas kesejahteraan manusia Provinsi Sulawesi Barat sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2013, capaian IPM Sulawesi Barat sebesar 61,53, kondisi ini meningkat menjadi 65,10 pada tahun 2018. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada level Menengah berada pada peringkat ke 30 dari seluruh provinsi tahun 2018. Adapun rincian indeks pembangunan manusia (IPM) menurut kabupaten mulai tahun 2013 sampai tahun 2018 Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2018 Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	IPM					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Majene	63,32	63,74	64,40	64,80	65,40	66,01
2	Polewali Mandar	59,27	60,09	60,87	61,51	62,35	63,14
3	Mamasa	62,57	62,85	63,17	63,51	63,92	64,66
4	Mamuju	64,17	64,71	65,09	65,65	66,32	67,11
5	Pasangkayu	63,76	64,04	64,69	65,17	65,67	66,60
6	Mamuju Tengah	61,05	61,48	62,22	62,89	63,64	64,43
Sulawesi Barat		61,53	62,24	62,96	63,60	64,30	65,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Angka partisipasi kerja dan pengangguran adalah suatu indikator yang sering digunakan dalam melihat kondisi suatu komunitas masyarakat

suatu daerah sampai pada tingkat nasional. Tingkat partisipasi kerja dilihat dari selisih kegiatan utama masyarakat yang meliputi jumlah n kerja, yang bekerja, pengangguran terbuka, bukan angkatan



kerja, yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan ada beberapa kegiatan tambahan lainnya. Pada tahun 2018, Provinsi Sulawesi Barat memiliki penduduk 639.622 jiwa yang termasuk angkatan kerja dengan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yang termasuk angkatan kerja sebesar 387.733 jiwa dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan banyaknya penduduk yang bekerja adalah 619.395 jiwa, sehingga banyaknya pengangguran terbuka sebesar 20.277 jiwa. Pengangguran terbuka tersebut terdiri dari berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10.639 jiwa dan perempuan 9.588 jiwa. Berdasarkan selisih kegiatan utama tersebut, maka didapatkan tingkat partisipasi angkatan kerja pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 66,30 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 81,25 persen sedangkan perempuan sebesar 51,53 persen. Adapun rincian jumlah angka partisipasi kerja dan pengangguran menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Jumlah Angka Partisipasi Kerja dan Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan utama	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	387.733	251.889	639.622
Bekerja	377.094	242.301	619.395
Pengangguran Terbuka	10.639	9.588	20.227
Bukan Angkatan Kerja	76.355	218.304	294.659
Sekolah	38.970	47.899	86.869
Mengurus Rumah tangga	16.107	160.235	176.342
Lainnya	21.278	10.170	31.448
Jumlah	464.088	470.193	934.281
Tingkat Partisipasi	81,25	51,53	66,30
Partisipasi Kerja			
Tingkat Pengangguran	2,29	2,04	2,16

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019



4.1.7 Kondisi Ekonomi

Sektor ekonomi merupakan salah satu Indikator dalam penilaian kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dalam melihat keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan ekonominya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, pendapatan per kapita dan inflasi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perekonomian Sulawesi Barat 2018 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 43.563,03 milyar Rupiah atau terjadi peningkatan sekitar 8,91 persen dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, dan atas dasar harga konstan sebesar 31.536,42 milyar rupiah atau terjadi peningkatan sekitar 5,78 persen. Adapun nilai PDRB Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2018

Tahun	Rupiah (Milyar)	
	PDRB Berlaku	PDRB Konstan
2015	33.071,35	26.135,30
2016	36.069,66	27.793,05
2017	39.679,75	29.713,09
2018	43.563,03	31.536,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Barat tentunya dipengaruhi oleh PDRB disetiap Kabupaten. Pada tahun 2015 sampai tahun 2018, PDRB Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Tengah PDRB nya mengalami fluktuasi. Sedangkan Kabupaten Pasangkayu terus mengalami peningkatan PDRB. Adapun presentase kontribusi setiap kabupaten



terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012-2015 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Persentase Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Total PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2018

No	Kabupaten	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Majene	10,53	10,54	10,57	10,60
2	Polewali Mandar	28,34	28,60	28,67	28,70
3	Mamasa	6,43	6,47	6,39	6,34
4	Mamuju	24,85	25,20	25,33	25,35
5	Pasangkayu	22,89	22,30	22,24	22,19
6	Mamuju Tengah	6,96	6,89	6,80	6,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, akan tetapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, namun masih selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Adapun pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten tahun 2017 dan tahun 2018 disajikan pada Tabel 20.



Tabel 20. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten Tahun 2017 dan 2018 Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Majene	6,46	6,06
2	Polewali Mandar	7,33	6,26
3	Mamasa	6,10	6,05
4	Mamuju	7,39	6,22
5	Pasangkayu	6,68	6,17
6	Mamuju Tengah	5,70	5,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya menggunakan angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Ini disebabkan karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk. Adapun pendapatan perkapita tahun 2018 menurut kabupaten dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Pendapatan Perkapita Menurut Kabupaten Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Pendapatan (Perkapita)
1	Majene	24,81
2	Polewali Mandar	26,31
3	Mamasa	16,14
4	Mamuju	35,98
	Pasangkayu	53,43
	Mamuju Tengah	21,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019



Pada tahun 2014 pendapatan perkapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 23,36 juta meningkat sebesar 32,12 juta pada tahun 2018. Pendapatan perkapita wilayah kabupaten, terjadi Ketimpangan yang tinggi antar Kabupaten dimana Pasangkayu sebesar 53,43 juta dan Mamasa hanya sebesar 16,14 juta. Tingginya pendapatan perkapita masyarakat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS).

Selama tahun 2018 berdasarkan pemantauan BPS, di kota Mamuju terjadi inflasi tahunan sebesar 1,80 persen. Inflasi ini ditandai dengan peningkatan IHK (dengan tahun dasar 2012) dari 130,28 pada Desember 2017 menjadi 132,62 di Desember 2018. Inflasi ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,79 persen. Jika dibandingkan dengan Indonesia, inflasi tahun 2018 Mamuju berada di bawah inflasi Indonesia yaitu lebih tinggi 1,33 poin. Dalam enam tahun terakhir, sebanyak dua kali inflasi tahunan Mamuju berada di atas inflasi tahunan Indonesia yakni di tahun 2015 dan tahun 2017. Selanjutnya perkembangan inflasi Mamuju dan Indonesia dalam enam tahun terakhir.

Pada tahun 2018 secara umum menunjukkan adanya inflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan

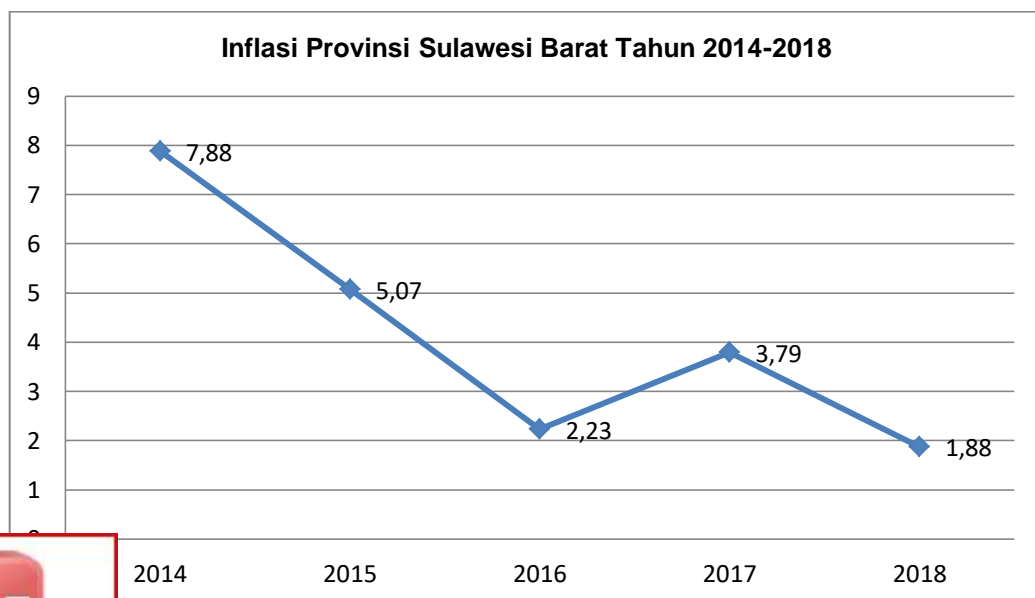
1,11 persen dengan andil sebesar 0,27 persen; kelompok bahan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,49 persen andil sebesar 0,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas



dan bahan bakar sebesar 1,77 persen dengan andil sebesar 0,48 persen; kelompok sandang sebesar 1,09 persen dengan andil sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,88 persen dengan andil sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 4,17 persen dengan andil sebesar 0,24 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,86 persen dengan andil sebesar 0,45 persen. Adapun inflasi yang terjadi dari tahun 2014 sampai 2018 di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada matriks 1.

Perkembangan inflasi tahunan di Sulawesi Barat sangat berfluktuatif dan terkadang lebih tinggi dari inflasi rata-rata nasional, pada tahun 2014 inflasi Sulawesi Barat sebesar 7,88 persen berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,36 persen. Inflasi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2016 yang sebesar 2,23 persen namun pada saat itu inflasi nasional juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 3,02 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 inflasi tahunan di Sulawesi Barat sebesar 1,88 persen berada di bawah angka nasional sebesar 3,13 persen dan merupakan inflasi terendah dari tahun 2009.

Matriks 1. Inflasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018



4.2 Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat

4.2.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Visi Pembangunan Sulawesi Barat

Dengan memperhatikan keterkaitan visi pembangunan tersebut diatas, serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, dan isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yaitu: **“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”**. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan Sebagai berikut :

- Sulawesi Barat Maju: Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.
- Sulawesi Barat Malaqbi: Komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.

Rumusan visi tersebut menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan periode RPJMD Tahun 2017-2022 nantinya, yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan dan rumusan kebijakan berupa misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan sampai kepada program dan kegiatan.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

- Misi Pertama:

Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya.

- Misi Kedua:

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya.



- Misi Ketiga:
Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis.
- Misi Keempat:
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.
- Misi Kelima:
Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk lebih jelasnya makna dari masing-masing misi, dapat dilihat pada tabel 22 berikut ini.

Tabel 22. Penjelasan Misi Pembangunan Daerah 2017-2022

NO	POKOK VISI	MISI	PENJELASAN MISI
1.	Malaqbiq	Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. • Alam dan lingkungan yang terkelolah dengan baik dan profesional untuk kesejahteraan rakyat • Dalam hubungan dunia luar dan provinsi lainnya dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya dengan tujuan



NO	POKOK VISI	MISI	PENJELASAN MISI
			<p>untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih maju.</p>
2.	Malaqbiq	<p>Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi pemerintahan dimana para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. • Masyarakat dan



NO	POKOK VISI	MISI	PENJELASAN MISI
			<p>pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan berbudaya dan religius</p> <ul style="list-style-type: none"> • mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
3.	Maju	Membangun dan Menguatkan Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis	<p>Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan (bukan keseragaman), dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui <i>inter-moda supply chain system</i> yang menghubungkan <i>hinterland</i></p>



NO	POKOK VISI	MISI	PENJELASAN MISI
			<p>dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar sehingga diperoleh manfaat pembangunan</p>
4.	Maju	<p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi yang dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas agar berdaya saing tinggi. Peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang diinginkan adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para pelaku ekonomi, inovasi yang dimaksudkan ialah adanya perbaikan dalam arti luas, seperti : adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.</p>



NO	POKOK VISI	MISI	PENJELASAN MISI
5.	Maju	Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan	Isu lingkungan hidup menjadi isu utama untuk memastikan terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan yang mencakup integrasi antara aspek biofisik, aspek sosial, dan aspek ekonomi dalam mendukung penghidupan (<i>livelihood</i>) yang berkelanjutan.

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global, pemerintah Sulawesi Barat terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Drs. H. Andi Ali Baal Masdar M.Si, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini pembangunan yang dilakukan di Sulawesi Barat terkhususnya dalam ranah publik selalu kita usahakan agar sinergis dengan setiap kebijakan maupun agenda-agenda pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah baik pusat hingga ke kabupaten/kota. Tentu itu dengan harapan, bahwa wajah Sulawesi Barat hari ini akan lebih baik kedepannya dengan pembangunan yang merata dan berkelanjutan”.

Pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat tersebut, mengingatkan kembali bahwa agenda pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global ini menunjukkan visi yang positif mulai dari tingkat daerah hingga ke pusat sebagai kepentingan yang saling bersama wajib menyukseskan dalam proses Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development*



Goals (SDGs) 2030.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang disusun di tingkat daerah beriringan dengan periode Pemerintahan Gubernur menyusun RPJMD 2017-2022. Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMN 2015-2019, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keaneka ragaman hayati. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diarusutamakan dalam RPJMD 2017-2022, target SDGs telah tercantum dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Sinergi antara Visi Misi Gubernur Sulawesi Barat, RPJMD 2017-2022 dan SDGs ditunjukkan pada tabel 23 berikut.

Tabel 23. Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, RPJMD PROV. SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 dan SDGs

Nawa Cita	RPJMN	RPJMD	SDGs
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan	Bab 6.1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan 	Misi I Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya dan Misi II Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan	G1 Tanpa Kemiskinan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G10 Berkurangnya Kesenjangan G14 Ekosistem Laut G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang



Nawa Cita	RPJMN	RPJMD	SDGs
	<p>an politik luar negeri bebas aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat sistem pertahanan • Memperkuat jati diri sebagai negara maritim • Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri • Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran • Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional • Meminimalisasi dampak globalisasi • Membangun industri pertahanan nasional • Membangun Polri yang profesional 	<p>terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilar Pembangunan Sosial 5 Goals, 47 Target, 77 Indikator • Goal 1: Tanpa Kemiskinan; • Goal 2: Tanpa Kelaparan; • Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera; • Goal 4: Pendidikan Berkualitas; • Goal 5: Kesetaraan Gender; 	<p>Tanggung G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</p>



Nawa Cita	RPJMN	RPJMD	SDGs
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan kualitas data sertainfor masi Kependudukan 		
<p>2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya</p>	<p>Bab 6.2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik 	<p>Misi IV Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan erdaya saing tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilar Pembangunan Ekonomi 5 Goals, 54 Target, 72 Indikator Goal 7: Energi Bersih & Terjangkau; Goal 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi; Goal 9: Industri, Inovasi, & Infrastruktur; Goal 10: Berkurangnya Kesenjangan; Goal 17: 	<p>G5 Kesetaraan Gender G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh</p>



Nawa Cita	RPJMN	RPJMD	SDGs
		Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	



Nawa Cita	RPJMN		SDGs
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan • Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan • Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional(RBN) • Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan Publik 		



Nawa Cita	RPJMN		SDGs
<p>3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</p>	<p>Bab 6.3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meletakkan dasar- dasar dimulainya desentralisasi asimetris • Memeratakan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia • Menanggulangi kemiskinan 	<p>Misi III Membangun dan meningkatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis Misi IV Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan erdaya saing tinggi Misi V Mengurusutama kan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilar Pembangunan Lingkungan 6 Goals, 56 Target, 68 Indikator • Goal 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak; 	<p>G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan</p>



Nawa Cita	RPJMN		SDGs
		<ul style="list-style-type: none"> • Goal 11: Kota% permukiman yang Berkelanjutan • Goal 12: Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab; • Goal 13: Penanganan Perubahan Iklim; • Goal 14: Ekosistem Lautan; • Goal 15: Ekosistem Daratan; 	
<p>4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,</p>	<p>Bab 6.4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan • Pencegahan dan 	<p>Misi II Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilar Tata Kelola 1 Goals, 12 Target, 23 Indikator • Goal 16: Perdamaian, Keadilan, 	<p>G1 Tanpa Kemiskinan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G5 Kesetaraan Gender G14 Ekosistem Laut G15 Ekosistem Darat G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh</p>



Nawa Cita	RPJMN		SDGs
	<p> pemberantasan korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan Penambangan Liar • Pemberantasan penyalahgunaan narkoba • Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah • Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal 	<p> dan Kelembagaan yang Tangguh;</p>	
<p>5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</p>	<p>Bab 6.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kependudukan dan keluarga berencana • Membangun pendidikan: Melaksanakan Program Indonesia Pintar • Membangun kesehatan: Melaksanakan 		<p>G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p>



Nawa Cita	RPJMN		SDGs
	Program Indonesia Sehat <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal: Melaksanakan Program Indonesia Kerja • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan 		
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	Bab 6.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional <ul style="list-style-type: none"> • Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan • Membangun transportasi umum masal perkotaan • Membangun perumahan dan kawasan permukiman 		G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G14 Ekosistem Laut G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



Nawa Cita	RPJMN		SDGs
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur • Menguatkan investasi • Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan • Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi • Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional • Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional • Meningkatkan daya saing tenaga kerja • Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016 		



Nawa Cita	RPJMN		SDGs
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Bab 6.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kedaulatan pangan • Membangun ketahanan air • Membangun kedaulatan energi • Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana • Mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan 		G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat sektor keuangan • Memperkuat kapasitas fiskal Negara 		G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan G13 Penanganan Perubahan Iklim G14 Ekosistem Laut G15 Ekosistem Daratan G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



Nawa Cita	RPJMN		SDGs
8. Melakukan revolusi karakter bangsa	Bab 6.8. Melakukan revolusi karakter bangsa		G4 Pendidikan Berkualitas G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan strat strategi.	Bab 6.9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia		G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G10 Berkurangnya Kesenjangan G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sumber: Buku Konvergensi Agenda Pembangunan: Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, dan SDGs - yang telah disempurnakan.

Dengan menyelaraskan visi misi Provinsi Sulawesi barat akan nilai dan tujuan yang dibawa oleh konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs), menjadikan peran pemerintah Provinsi selanjutnya ialah bagaimana menyusun dan mengembangkan nilai dan tujuan tersebut menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan di Sulawesi barat. Keselarasan

maksud ialah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan baik tingkat pusat dan maupun pemerintah daerah dapat menghadirkan



nilai-nilai keberlanjutan di setiap program pembangunan yang menjadi tolak ukur dari ketercapaian keberhasilan suatu daerah.

4.2.2 Arah Kebijakan Pencapaian SDGs Dalam Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan terdiri dari lima tujuan yang meliputi Energi Bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, **industri, inovasi dan infrastruktur**, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Arah kebijakan dalam pilar pembangunan ekonomi pada tahun mendatang adalah pengoptimalan pelaksanaan program-program yang telah digagas sebelumnya untuk mempertahankan capaian yang berhasil diraih hingga tahun 2017 hingga 2018 dan merumuskan program-program baru untuk mengatasi berbagai masalah/kendala/tantangan yang masih dihadapi pada masing-masing aspek pembangunan.

Dalam pencapaian tujuan ke-sembilan dalam SDGs yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan masih adanya kendala yang harus diselesaikan melalui Kebijakan yang mendorong pada pengembangan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat yang sekaligus mengatur yang masih jauh capaiannya dibandingkan target nasional. Oleh karena itu pemerintah melalui instansi terkait perlu untuk merumuskan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur jalan (sarana dan prasarana) sehingga sebelum akhir SDGs sudah dapat terlaksana sepenuhnya. Adapun arah kebijakan pada pilar ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan terkhususnya pada pencapaian tujuan ke-sembilan disajikan pada Tabel 24 berikut.



Tabel 24. Kebijakan Daerah yang Mendukung pencapaian SDGs pada Pilar Pembangunan Ekonomi khusus tujuan ke-sembilan

Tujuan	Arah kebijakan nasional	Arah kebijakan daerah
Ke-9: Industri, Inovasi, & Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur. 2. Pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur. 3. Implementasi prinsip <i>Value for Money</i> (VfM). 4. Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur. 5. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan. 6. Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi. 7. Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam. 8. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar. 9. Pembangunan taman 	<p>Tujuan 9 (industri Inovasi dan Infrastruktur) mendukung Misi III (Membangun dan meningkatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis dan Misi IV (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan berdaya saing tinggi).</p>



	<p>teknologi dan taman Sains.</p> <p>10. Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang.</p> <p>11. Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur.</p> <p>12. Akselerasi pertumbuhan pariwisata.</p> <p>13. Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif.</p> <p>14. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.</p>	
--	---	--

4.3 Kondisi Pencapaian SDGs Sektor Publik Di Sulawesi Barat

4.3.1 Analisis Pencapaian melalui Indikator SDGs

Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pelaksanaan SDGs di tingkat daerah ditentukan oleh tingkat capaian pelaksanaan indikator SDGs terhadap target yang telah ditentukan baik target daerah maupun

nasional. Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 dan 169 target untuk pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut



dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB/SDGs yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD.

Penilaian terhadap pencapaian tersebut dilakukan dengan mengelompokkan indikator TPB berdasarkan kategori analisis data yang terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)
2. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)
3. Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB)
4. Indikator Belum Memiliki Data (NA)

Pengelompokkan indikator dilakukan untuk mengidentifikasi indikator-indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana indikator yang akan dianalisis selanjutnya dan menjadi isu strategis adalah indikator-indikator yang masuk dalam kelompok SB. Indikator-indikator yang termasuk dalam kelompok SS, karena telah mencapai target TPB sampai diakhir tahun RPJMD tidak dianalisis lebih lanjut, namun program-program yang telah dilaksanakan dilanjutkan pada sisa periode RPJMD.

Indikator-indikator yang termasuk dalam kelompok BB dan NA belum akan difokuskan pada periode RPJMD 2017-2022 mengingat waktu pelaksanaannya hanya tersisa sekitar 2,5 tahun. Indikator SB ini kemudian akan ditindaklanjuti melalui rancangan RPJMD, indikator-indikator SDGs yang belum mencapai target ini dapat diakomodir ke

kebijakan, rencana dan program yang dapat merealisasikan indikator tersebut. Adapun capaian dan hasil pengelompokkan di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 264 indikator akan diuraikan

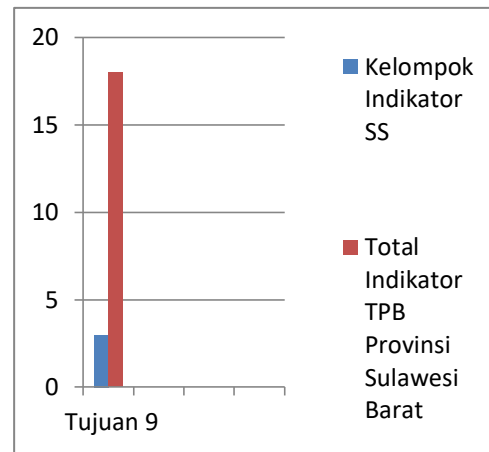
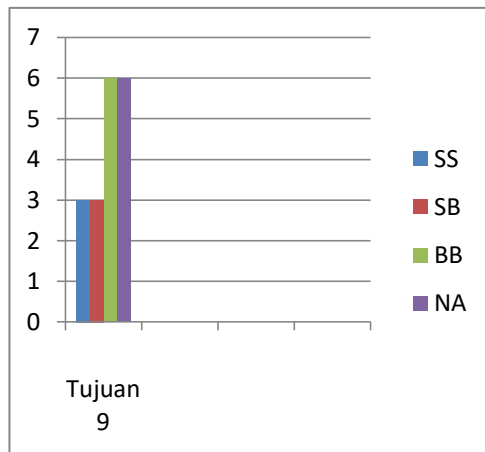


dalam tabel 25 berikut. Serta capaian penilaian indikator tujuan kesembilan terhadap total indikator yang ditetapkan akan dilihat pada matriks 2 dan 3.

Tabel 25. Capaian Indikator SDGs Provinsi Sulawesi Barat

No	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase
1	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)	40	15,15%
2	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)	97	36,74%
3	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB)	40	15,15%
4	Indikator Belum Memiliki Data (NA)	87	32,95%
Total Indikator		264	100%





Matriks 2. Indikator Tujuan ke-9 Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan data capaian target 5 tahun sebelumnya di Provinsi Sulawesi Barat.

(sumber: Laporan KLHS Perubahan RPJMD Sulbar)

Matriks 3. Indikator Pada Tujuan ke-sembilan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Provinsi Sulawesi Barat.

(sumber: Laporan KLHS Perubahan RPJMD Sulbar)

Dari data tersebut, diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan sekitar 51,89% indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS) dan Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)), namun presentase indikator Belum Mencapai Target (SB) masih lebih tinggi dari Sudah mencapai target (SS) yang baru hanya berjalan sekitar 15,15%. Serta masih ada sekitar 48,11% indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum dilaksanakan yang tersebar pada kelompok Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB) dan Indikator Belum Memiliki Data (NA). Sedangkan untuk tujuan ke-sembilan, dari total 18 indikator yang ditetapkan hanya terdapat 3 indikator yang telah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) atau hanya 5% dari total indikator. 3 indikator lainnya masuk ke dalam kategori

melaksanakan namun belum memenuhi target (SB), 6 indikator ke dalam kelompok belum dilaksanakan dan belum mencapai (BB) serta 6 indikator lainnya belum memiliki data (NA). Target,



sasaran serta program yang mendukung capaian tujuan ke-sembilan di dalam SDGs di Sulawesi Barat (*terlampir*).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Barat Bapak Dr. Junda Maulana, M.Si, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini proses pembangunan yang dilakukan di Sulawesi Barat terus digenjut. Angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 5,6% sedangkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu sebesar 7%. Jika berbicara mengenai pembangunan SDGs yang sudah dilaksanakan sampai tahun ini namun ada yang belum mencapai target karena memang rata-rata pembangunannya itu kita mulai dari tahapan awal yang secara waktu pelaksanaan terkadang melebihi dari batas rencana sebelumnya. Kemudian, kendala lainnya itu adalah karena minimnya anggaran. Kita kan masih termasuk sebagai provinsi muda di Indonesia, jadi anggaran yang minim itu harus dibagi lagi ke dalam beberapa perencanaan pembangunan dan butuh strategi serta usaha yang ekstra untuk bisa capai itu”.

Lanjutnya lagi beliau menyampaikan bahwa:

“Pembangunan yang berkelanjutan dengan mewujudkan SDGs di Sulawesi Barat juga sudah diupayakan dengan salah satunya yakni dengan adanya Rancangan Aksi Daerah (RAD) terkait SDGs. Harapan kami ialah proses pembangunan di Sulawesi kini lebih terarah lagi dengan melihat sisi keberlanjutan dari sebuah pembangunan. Juga apa yang dianggap masih kurang dapat ditingkatkan lagi melalui Rancangan Aksi Daerah (RAD) ini. Sedangkan jika melihat indikator dari SDGs yang ada, memang masih jauh dari yang diharapkan. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkhusus pada indikator yang belum memiliki data”.



Dari hasil wawancara tersebut dan dengan melihat proses perkembangan pembangunan di Sulawesi Barat secara langsung saat ini, dapat dianalisis bahwa salah satu penyebab ketercapaian indikator SDGs di Sulawesi Barat belum memenuhi target karena pelaksanaan pembangunan belum didasarkan secara baik dengan perencanaan serta kajian yang lebih mendalam terhadap setiap indikator-indikator SDGs. Selain itu, masih perlu adanya sinergitas dari semua *stakeholder* untuk dapat bersama-sama memahami tentang substansi dan tujuan pembangunan dari setiap indikator yang ada di dalam SDGs. Melalui pembuatan Rancangan Aksi Daerah (RAD) Provinsi Sulawesi barat terkait SDGs, Pemerintah Provinsi dapat lebih efektif menjalankan segala perencanaan pembangunan secara lebih tersistematis dan memiliki indikator pencapaian yang lebih terarah. Rancangan Aksi Daerah (RAD) diharapkan oleh segenap pemerintah dapat mewujudkan Sulawesi Barat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan secara efektif, efisien dan berkeadilan.

4.3.2 Capaian Indikator SDGs pada Urusan Perangkat Daerah

Analisis capaian indikator pada perangkat daerah dilakukan untuk melihat proyeksi kedepan, dimana hasil proyeksi didasarkan pada target dan realisasi capaian dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan data Provinsi Sulawesi Barat untuk masing-masing indikator yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Drs. H. Andi Ali Baal Masdar M.Si, dalam wawancara bersama mengatakan:

“Di sisa periode saya dan Ibu Hj. Eni Anggraeni Anwar yang tersisa 2 tahun lagi, kami akan terus mengevaluasi kinerja dari setiap OPD. Tentunya untuk memastikan bahwa arah dari pembangunan ataupun program yang dilaksanakan oleh setiap OPD itu tetap menjunjung nilai-nilai keberlanjutan supaya Sulawesi barat juga bisa segera memantapkan diri dalam konsep SDGs hingga beberapa tahun kedepan. Dan untuk saat ini langkah yang sudah dilakukan oleh kami sebagai pemerintah itu dalam SDGs ialah telah



rampungnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang SDGs yang kami susun. Sehingga sudah ada landasan serta pedoman yang dijadikan oleh setiap OPD untuk bergerak”. Pungkas beliau yang lahir di Makassar, 29 Mei 1960, 60 tahun silam tersebut.

Adapun hasil penilaian dan analisis capaian indikator pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah per urusan indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel 26 berikut.

Tabel 26. Capaian Indikator Menurut Jenis Urusan yang Dirinci Berdasarkan Kelompok TPB di Provinsi Sulawesi Barat

Jenis Urusan	Kelompok Indikator TPB				Total
	SS	SB	BB	NA	
Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	2	0	0	0	2
Balitbang Daerah	0	0	0	1	1
Energi & Sumber Daya Mineral	0	4	0	3	7
Kehutanan	1	4	0	4	9
Kelautan & Perikanan	0	1	6	1	8
Kesehatan	3	37	6	3	49
Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	5	3	7	7	22
Keuangan	1	1	0	8	10
Komunikasi & Informatika	1	1	4	5	11
Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah	0	1	1	0	2
Lingkungan Hidup	8	4	1	7	20
Pangan	0	4	0	0	4
Perencanaan	1	3	0	0	4
Perencanaan Umum & Penataan Ruang	2	4	2	14	22
Perencanaan Masyarakat & desa	1	2	1	0	4



Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	5	0	9	16
Penanaman Modal	0	0	0	2	2
Pendidikan	4	7	4	2	17
Perencanaan	0	0	0	1	1
Perhubungan	0	2	3	3	8
Perindustrian	1	0	0	3	4
Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	0	0	0	1	1
Sosial	1	5	2	5	13
Statistik	4	3	2	3	12
Tenaga Kerja	3	6	1	5	15
Total	40	97	40	87	264

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa urusan perangkat daerah Sulawesi Barat dalam tujuan ke-sembilan SDGs yang meliputi industri, inovasi dan infrastruktur juga belum sepenuhnya dikatakan berjalan sesuai dengan kesesuaian indikator yang ditetapkan. Mengenai urusan perindustrian sendiri, hanya terdapat 2 indikator yang sampai sejauh ini telah dilaksanakan dan tercapai dari total jumlah kesesuaian indikator sebanyak 22. Sementara untuk urusan infrastruktur juga belum mencapai target indikator dari total indikator kesesuaian sebanyak 4 indikator. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara setiap Organisasi Perangkat Daerah sehingga kewenangan yang dilahirkan tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.



4.4 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur dalam Konsep SDGS di Sulawesi Barat

4.4.1 Pengembangan Kawasan Industri

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya perkembangan sektor industri yang masuk di daerah tersebut. Di sisi lain, kondisi sektor industri di Sulawesi Barat saat ini masih didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Sedangkan, besaran kontribusi setiap sektor akan menjadi salah satu penilaian atau aspek terhadap ketercapaian tujuan dalam SDGs. Hal ini lah yang melatarbelakangi pembangunan kawasan industri yang nantinya akan dipusatkan di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku dengan pertimbangan kemudahan akses terhadap Bandara dan Pelabuhan. Rencana pembangunan kawasan industri tersebut menjadi bagian dari isu strategis yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi barat terkait sektor industri dalam tujuan ke-sembilan SDGs yang juga telah sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten serta telah melalui berbagai kajian baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Kementerian Perindustrian dan telah dibuat *Masterplan* dan Rencana Strategis Kawasan Industri tersebut oleh pihak Kementerian Perindustrian. Dengan dikembangkannya industri nantinya dapat memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional dan pemerataan industri yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa. Pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat memberi dampak positif pada daerah/kabupaten tertinggal walaupun lokasinya tidak berada pada daerah tertinggal. Dengan beroperasinya kawasan industri belang-belang diharapkan akan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal di Provinsi Sulawesi Barat. Selain tenaga kerja, sektor pemasaran produksi hasil bumi menjadi lebih baik dan berkontribusi

o pembangunan di daerah/kabupaten tertinggal. Melalui
ara bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,



Kooperasi dan UKM Sulawesi Barat Bapak Drs. H. Amir Maricar, MM mengatakan bahwa:

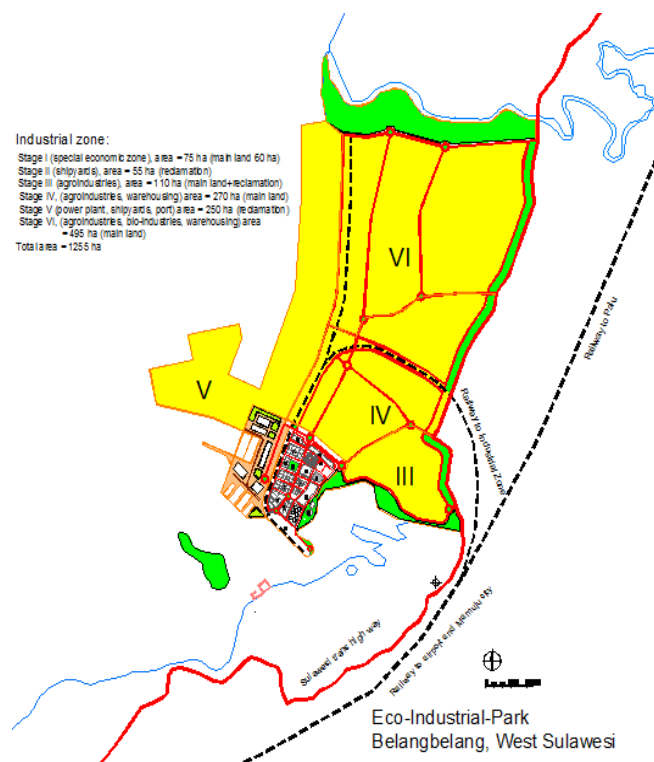
“Saat ini sektor industri di Sulawesi Barat tengah di dorong untuk menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB dengan cara membina UKM –UKM untuk siap masuk menghadapi pengembangan kawasan industri semata-mata dengan harapan sebagaimana yang saya bilang tadi. Tapi kendala selanjutnya itu, mengenai masa jabatan Gubernur & Wakil Gubernur yang hanya menyisakan 2 tahun lagi. Jadi pengerjaan terhadap rencana kawasan industri itu harus dirampungkan segera mungkin. Karena dengan adanya kawasan industri ini juga akan menjadi potensi besar bagi Sulawesi Barat untuk mendatangkan investor dan meningkatkan industrialisasi di Sulawesi Barat.”

Pembangunan berkelanjutan dalam sektor industri di Sulawesi Barat telah diatur dalam RPIP (Rencana pembangunan Industri Provinsi) yang memiliki jangka waktu 25 tahun kedepan yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembangunan industri di Sulawesi Barat dengan target peningkatan perindustrian berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kooperasi dan UKM tengah mengkaji terhadap akses serta infrastruktur yang nantinya akan menjadi penunjang dari dibangunnya kawasan industri ini seperti ketersediaan fasilitas sarana prasarana jalan, sistem pengolahan air limbah, serta sarana infrastruktur penunjang lainnya yang dianggap akan menjadi jalan baik untuk investor mengembangkan potensi industri yang ada di Sulawesi Barat. Gubernur Sulawesi Barat Bapak Drs. H. Andi Ali Baal Masdar M.Si juga dalam wawancara bersama yang dilakukan menambahkan bahwa:



“Proses pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat yang rencananya akan dipusatkan di kabupaten Mamuju sejauh ini sudah rampung hampir 70 persen. Sisa yang menjadi kendalanya itu bagaimana kembali pemerintah daerah untuk mendapatkan investor yang tepat untuk bisa diajak kerjasama dalam mengisi kawasan industri yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan serta menjadi tujuan dari Sulawesi Barat kedepannya. Tinggal bagaimana nanti Dinas terkait, mematangkan lagi ini perencanaan. Kami upayakan kawasan industri ini sudah bisa mulai dibangun sebelum masa periode saya bersama Ibu Hj. Eni Anggraeni berakhir. Karena harapan kami, melalui rencana pembangunan ini masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya dan masyarakat sekitar daerah pengembangan kawasan industri pada khususnya, perekonomiannya dapat lebih terangkat.”

Peta rencana pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat dapat dilihat melalui gambar 4 berikut.



**Gambar 4. Peta Rencana Pembangunan Kawasan Industri
Belang-Belang Provinsi Sulawesi Barat**

Sumber: Bidang Fispra Bappeda Prov. Sulawesi Barat

Tabel 27. Target Peningkatan Perindustrian RPJMD Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	9,42	9,48	9,67	9,93	10,32	10,79	10,79
2	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (milyar Rupiah)	3.693	4.023	4.423	4.865	5.394	5.989	5.989
3	Jumlah PDRB (milyar Rupiah)	39.187	42.454	45.729	48.988	52.255	55.522	55.522
4	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri (%)	60,81	61,44	62,13	62,18	64,97	66,71	66,71
5	Pertumbuhan Industri (%)	9,52	9,75	9,95	10,1	10,7	11,3	11,3

Di dalam RPJMD Sulawesi Barat Sektor Industri diharapkan dapat menyumbang PDRB sebesar 10,79 di tahun 2022, jika dihitung dalam milyar rupiah, maka kontribusi di sektor industri diharapkan mencapai 55, 522 milyar dalam lima tahun. Sementara itu pertumbuhan industri di Sulawesi Barat di target mencapai 11,3 persen dari kondisi awal yang 9,52 persen di tahun 2017. Untuk mendukung peningkatan di sektor industri kecil maupun industri besar maka pemerintah Sulawesi Barat aktif akan industri kecil dengan melakukan pembinaan-pembinaan



terutama pada industri kecil sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kooperasi dan UKM Sulawesi Barat mengenai fokus tujuan pembangunan di sektor industri saat ini. Adapun beberapa sektor industri utama yang akan dikembangkan ialah sektor komoditi unggulan di Sulawesi Barat seperti pengolahan kakao, pengolahan ikan, pengolahan kopi, selain komoditi yang telah berjalan seperti kelapa sawit.³⁴ Pada tempat yang berbeda Bapak Darius Hendrik P selaku salah seorang pengusaha industri perkebunan kakao di Kabupaten Mamuju juga menyambut baik akan rencana pengembangan kawasan industri yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam waktu dekat ini. Dalam wawancara bersama beliau mengatakan:

“Kalau kami dari pengusaha, sangat senang jika memang kawasan industri itu akan dibuat sama pemerintah. Apalagi selama ini juga pemerintah sudah lakukan mi beberapa kali kegiatan pembinaan-pembinaan. Jadi sangat senang kalau hal itu dilanjut lagi dalam kawasan industri. Terutama bagi teman-teman yang memang belum terlalu banyak tau tentang macam proses untuk mengolah hasil kebun supaya bisa lebih menjual. Harapan saya sendiri, semoga pemerintah betul-betul bisaji perhatikan kami sama bantu juga semua teman-teman pelaku usaha dari yang paling kecil sampai besar untuk bisa terlibat di dalam kawasan industri itu. Tidak hanya beberapa saja”.

Dengan hasil wawancara bersama informan terkait, adanya pengembangan kawasan industri ini juga menjadi angin segar tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Barat yang menjadi pelaku usaha industri ditengah kendala yang masih dirasakan antara lain seperti peningkatan nilai produksi terhadap industri, ketersediaan sarana prasarana yang lebih memadai, dan masih minimnya pendapatan yang didapatkan oleh pelaku industri.



asil wawancara bersama Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kooperasi
UKM Sulawesi Barat

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Sektor Industri Di Sulawesi Barat

URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industry	-	-	-	-	-
Cakupan bina kelompok pengrajin (keg)	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kooperasi, Dan UKM.

Dari uraian wawancara dan ringkasan analisis kondisi di atas juga dapat dikatakan bahwa pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat hingga saat ini sudah menunjukkan proses peningkatan yang cukup baik. Walaupun ada beberapa kendala yang masih dihadapi. Hal ini terlihat dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang secara serius merampungkan segala rencana pengembangan kawasan industri hingga benar-benar siap untuk dilaksanakan. Melalui pengembangan kawasan industri ini juga, dapat terlihat ternyata Pemerintah Sulawesi Barat tidak hanya berfokus pada mempersiapkan kawasan industrinya saja tetapi juga bagaimana melalui hal tersebut nantinya dapat berdampak positif terhadap masyarakat Sulawesi Barat yang tentunya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah tenaga kerja di Sulawesi Barat.



4.4.1.1 Konsep Dasar Pengembangan Kawasan

Pengembangan Kawasan Industri di Sulawesi Barat mengacu kepada prinsip-prinsip logika ekonomi, teknis dan sosial berdasarkan pengalaman dari Kawasan sejenis lainnya.

1. Konsep Pengembangan Berdasarkan Industri Yang Berawal Dari Produk Kompetensi Inti Daerah :

Berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Mamuju dan sekitarnya serta potensi dan permintaan akan suatu kawasan industri yang ada disekitar maupun di wilayah *hinterland* kawasan industri yang akan direncanakan diperoleh informasi komoditas lokal yang paling potensial dikembangkan adalah produk hasil perkebunan, kelautan dan pertambangan.

Industri-industri yang berbasis komoditas unggulan lokal inilah yang akan pertama dikembangkan sebagai pemicu aktivitas ekonomi di kawasan. Industri yang bersifat lokal base ini secara ekonomi akan cukup kompetitif, disebabkan ongkos produksi yang relatif rendah. Setelah industri-industri yang bersifat lokal base telah cukup berkembang, diharapkan dinamika ekonomi yang ada mampu dikembangkan ke arah industri-industri yang lebih bersifat *foot lose*.

2. Konsep Green Industri :

Lokasi Kawasan perencanaan di Kabupaten Mamuju khususnya di Kawasan Belang-Belang ini cukup sarat dengan berbagai batasan fungsi di kawasan sekitarnya. Keberadaan Kawasan perlindungan setempat dengan adanya sempadan panta, kawasan perairan/pantai serta kawasan pemukiman penduduk eksisting, mengharuskan kawasan ini untuk direncanakan dengan cukup cermat di dalam aspek ekologisnya. Prinsip *Green* Industri perlu diterapkan di sini, khususnya menyangkut tiga aspek utama:



- Aspek konsumsi air dan sumber daya alam lainnya oleh industri. Konsumsi air untuk industri diharapkan mampu dicukupi dari sumber-sumber yang ada, dengan mencoba menciptakan reservoir air berupa danau-danau buatan atau embung, ataupun dengan melakukan bendung pada sungai papalang untuk mendapatkan debit air yang mencukupi untuk kegiatan industri. Prinsip re-cycle water juga diterapkan agar volume air yang dibutuhkan mampu dicukupi, tanpa tergantung suplai dari luar kawasan.
- Aspek pengelolaan limbah industri. Limbah industri diolah berdasarkan masing-masing jenis limbah, yang diolah dengan sistem jaringan dan treatment yang terpisah dan dapat dimanfaatkan kembali oleh industri sebagai bahan baku air.
- Aspek manajemen daur air yang ada di kawasan Keseimbangan daur air di kawasan eksisting dipertahankan, melalui sistem jaringan drainase yang tetap mempertahankan alur sungai-sungai eksisting yang dikembangkan menjadi grid-grid kanal yang saling terhubung satu sama lain.

3. Konsep Kawasan Dengan *Cluster* Tertutup :

Kawasan perencanaan sebagai sebuah kawasan yang akan memiliki beberapa insentif khusus di bidang perpajakan, infrastruktur dan lain-lain yang memerlukan batas fisik yang jelas agar penerapan insentif tersebut tepat sasaran.

Pola tata ruang yang direncanakan berpola klaster besar tertutup, yang terbagi lagi ke dalam beberapa klaster yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki gerbang sendiri. Pola ini memungkinkan sub-sub klaster dibangun secara bertahap, sesuai dengan konsep pentahapan dalam pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang.

konsep pengembangan kawasan industri belang-belang ini dapat dari beberapa aspek, antara lain permintaan dan minat pelaku ketersediaan lahan pengembangan di masa depan, serta



kemungkinan melakukan diversifikasi dan pengembangan usaha lain yang masih berkaitan dengan bisnis inti. Pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang menggunakan skenario pengembangan yaitu:

- Pengembangan kawasan manufaktur dari produk olahan”agro dan logam” dan kebutuhan lain disekitar kawasan industri;
- Kawasan logistik dengan pengembangan sebagai *Dry Port* dan *Landing Port Destination Logistic Center*.
- Dalam skenario pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang sebagai hilirisasi industri agro dan logam serta SDA lainnya, maka menjadikan Kawasan Industri Belang-Belang menjadi kawasan industri aneka industri turunannya dengan asumsi pemanfaatan keunggulan daerah yaitu agro dan logam, serta sumber daya alam lain beserta turunannya, menjadikan sebagai : **”Green Industri Belang-Belang Estate”**.

Skenario pengembangan kawasan di titik beratkan pada zona industri terlebih dahulu karena industri merupakan kegiatan investasi yang dapat menghidupkan kawasan ini, terlebih peruntukan lahan telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014.

4. Konsep Struktur Ruang Kawasan

Konsep struktur ruang kawasan dipengaruhi oleh jaringan jalan yang saling menghubungkan antar pusat kegiatan, sub pusat kegiatan dan pusat lingkungan. pusat kegiatan utama kawasan ini adalah kawasan industri pengolahan yang berfungsi menjadi pusat aktifitas kegiatan kawasan tersebut. Pusat kegiatan utama ini didukung dengan kawasan-kawasan industri berikut dengan zona-zona industri, pergudangan dan pengolahan ekspor sedangkan komersial dan perumahan merupakan pendukung dari sub kegiatan utama. Konsepsi rencana struktur tata ruang akan mendatangkan implikasi terhadap pembangunan kawasan industri di

asa mendatang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 29.



Tabel 29. Implikasi Rencana Struktur Tata Ruang

No	Aspek	Implikasi
1.	Penyediaan Lapangan Kerja	Penyediaan lapangan kerja akan lebih menyebar di kawasan industri karena pengalokasian jenis dan skala kegiatan ekonomi lebih menyebar di seluruh kawasan bahkan di provinsi
2.	Pertumbuhan Ekonomi	Dengan alokasi aktivitas yang disebarkan di seluruh kawasan, maka potensi kawasan industri manufaktur dan agro akan lebih berkembang. Diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan dan kabupaten atau provinsi secara keseluruhan menjadi lebih optimal dan merata.
3.	Percepatan Pertumbuhan Pembangunan	Dengan dialokasikannya pusat pelayanan pada kawasan industri, ditambah dengan lebih mengembangkan keunikan lokasi di pintu masuk kawasan, diharapkan percepatan pertumbuhan pembangunan akan lebih menyebar.
4.	Kesenjangan Sosial	Pengembangan kawasan-kawasan yang menyebar ke seluruh wilayah akan meningkatkan pendapatan, perekonomian, dan pendidikan masyarakat di luar kawasan,



		sehingga diharapkan kesenjangan sosial dapat dikurangi atau bahkan dihindari.
5.	Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan	Pemanfaatan lahan untuk kawasan terbangun yang lebih menyebar (tentunya dengan tetap memperhatikan kesesuaian fisiknya) membuat beban daya dukung lingkungan yang lebih proporsional, sehingga tidak akan terjadi kerusakan lingkungan.

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Barat (2016).

Melihat dari bentuk tapak yang ada serta karakteristik topografis dan jaringan jalan serta kondisi geologi kawasan, maka ada dua pola struktur ruang kawasan yang secara teoritik dapat digunakan untuk menstrukturkan tapak, yaitu :

1. Pola *linear zone*, dimana pada posisi kurang lebih bagian utara tapak, dapat dilalui jalur pergerakan utama tapak yang kemudian dihubungkan dengan feeder way menuju zona-zona pemanfaatan ruang.
2. Pola *loop-core*, yang menekankan pada pembentukan sub-sub pusat kawasan pada tapak dimana untuk menghubungkan sub-sub pusat ini direncanakan jalan loop. Pola ini yang akan digunakan dalam perencanaan struktur ruang di Kawasan Industri Belang-Belang.
3. Setiap sub-pusat kawasan akan menjadi simpul/*nodes* bagi masing-masing zona dan terhubung oleh jaringan jalan.
4. Masing-masing sub-pusat kawasan akan menjadi ruang penerima dan pusat orientasi bagi kawasan sekitarnya.

Seberapa fungsi akan menjadi sentral bagi kawasan industri ini, oleh karena itu konsep struktur ruang harus memberikan kejelasan akan eksistensi fungsi ini.



Struktur ruang kawasan industri berdasarkan pola *loop-core*, maka di Kawasan Industri Belang-Belang memiliki struktur sebagai berikut :

1. Pusat 1 merupakan pusat inti dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi bahan baku industri dan hasil produksi pengolahan industri.
2. Sub Pusat 1 merupakan penunjang atau pendukung dari pusat inti dengan fungsi sebagai kawasan agro industri yang memasok bahan baku kegiatan industri.
3. Sub Pusat 2 merupakan penunjang atau pendukung dari pusat inti dengan fungsi sebagai kawasan industri pengolahan agro dan kegiatan industri manufaktur.
4. Sub Pusat 3 merupakan penunjang atau pendukung dari pusat inti dengan fungsi sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri dan permukiman pekerja.

Konsep struktur ruang lainnya dalam pengembangan kawasan industri Belang-Belang di Kabupaten Mamuju, dapat dilakukan dengan skenario pengembangan kawasan berawal dari ketersediaan infrastruktur khususnya energi, akses dan air baku, apa yang ada dimanfaatkan se efisien mungkin, ini menjadi awal pengembangannya yang dikonvert ke dalam luasan lahan. Ilustrasi skenario pengembangan kawasan, adalah :

1. Konektivitas

Sistem transportasi yang menuju Kawasan Industri mempunyai aksesibilitas yang cukup baik, karena berada dekat dengan jalan nasional yaitu Jalan Trans Sulawesi, selain itu lokasi industri direncanakan akan dilalui oleh jaringan Kereta Api Trans Sulawesi. Sarana pergerakan baik barang dan penumpang dari wilayah Mamuju dilakukan melalui transportasi darat. Dengan keberadaan kawasan yang dilakului oleh dua

transportasi tersebut memiliki kemudahan terkait infrastruktur yang dapat memudahkan pergerakan orang dan barang dari dan ke kawasan industri. Keberadaan infrastruktur ini direncanakan akan



membelah kawasan industri sehingga jaringan transportasi tersebut berada di tengah-tengah kawasan.

- a. **Transportasi dan sarana/prasarana penunjang** sangat memperlancar hubungan antara kawasan peruntukan industri ini dengan kota-kota lain baik di tingkat kabupaten maupun dengan kota-kota lain misalnya: akses ke Mamuju, Palu, Makassar, Manado, Bitung, sehingga arus lalu-lintas perdagangan dan jasa serta berbagai kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar. Selain itu juga dengan keberadaan pelabuhan laut yang ada juga memudahkan akses pergerakan dari laut sehingga memudahkan pergerakan antar pulau seperti dari dan ke Kalimantan Timur dan pulau-pulau lain seperti ke Pulau Jawa, Sumatera maupun ke Pulau Maluku dan Papua.
- b. **Angkutan kereta api** merupakan bagian dari lintasan kereta api trans sulawesi. Bila dilihat dari konteks industri maka jaringan kereta api adalah jaringan yang paling murah dan sangat potensial sebagai pemicu dan pendukung pertumbuhan perindustrian. Dengan adanya jalur ini akan menjadi titik tumbuh yang dapat diandalkan terutama untuk proses lalu-lintas barang yang sangat dibutuhkan oleh industri.
- c. **Angkutan Udara** merupakan bagian dari sistem kawasan industri Belang-Belang yang berada di Tampa Padang. Bila dilihat dari konteks industri maka jaringan transportasi udara merupakan salah satu alternatif aksesibilitas dar dan keluar kawasan yang potensial sebagai pemicu dan pendukung pertumbuhan perindustrian. Dengan adanya jalur ini akan menjadi titik tumbuh yang dapat diandalkan terutama untuk proses lalu-lintas barang yang sangat dibutuhkan oleh industri.

Penggunaan sistem konektivitas yang ada juga memiliki beberapa yang perlu diperhitungkan dalam penggunaannya sehingga dapat menunjang kegiatan kawasan, untuk itu perlu menjadi pertimbangan menggunakan sistem jaringan yang ada dengan alasan:



- a. Jalan Trans Sulawesi harus dapat memiliki lebar jalan yang memadai sehingga tidak menimbulkan dampak kepada pengguna yang lain. Lebar yang disarankan sekitar 14 meter, sistem perkerasan jalan juga menjadi factor penting dikarenakan beban muatan dalam proses distribusi hingga mencapai 60 - 80 ton. Bila kondisi perkerasan jalan tidak memungkinkan, maka perlu dibatasi penggunaan jalan bagi industrihanya sekitar 30 ton, hal ini dapat dimungkinkan hanya untuk distribusi dari kawasan industri sekitar dalam memasok bahan baku.
- b. Perlu dikembangkan jaringan jalan bagi proses distribusi bagi kendaraan tonase besar yang mencapai sekitar 60–80 ton. Untuk itu perlu dikembangkan pelabuhan yang berlokasi didekat kawasan atau dalam kawasan, sehingga penggunaan lahan dan jalan dapat dikembangkan khusus bagi kebutuhan industri.
- c. Penggunaan sarana kereta api dalam melakukan distribusi hasil produksi industri juga merupakan bukan sebagai faktor utama dalam pendistribusian barang. Hal ini dikarenakan keterbatasan prasarana kereta api yang dapat memungkinkan untuk mengangkut tonase yang lebih besar, untuk itu sarana kereta api dapat dipergunakan bagi peruntukkan aneka industri yang akan melakukan distribusi ataupun industri agro dan aneka industri dengan tonase antara 10 - 30 ton.

2. Energi / Listrik

Sumber tenaga listrik di Kabupaten Mamuju berasal dari PLN yang ada di Kabupaten Mamuju. Jaringan listrik ini dapat dikatakan telah cukup menjangkau daerah yang agak terpencil. Akan tetapi kebutuhan akan listrik bagi kepentingan industri tidak dapat bersumber dari PLN saja dikarenakan kapasitas yang ada tidak memenuhi kebutuhan industri.

Pihak pemerintah telah mencanangkan pembangunan pembangkit

listrik sebesar 2 X 25 MW sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat. Pembangunan pembangkit ini sejalan dengan adanya rencana



pengembangan berbagai kegiatan di kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat diantaranya adalah kawasan industri, bandara dan lain sebagainya. Pembangkit listrik yang dikembangkan berupa PLTU Belang-Belang dan listrik bersumber energi terbarukan. Adapun lokasi PLTU Belang-Belang ini tidak terlalu jauh lokasinya dengan kawasan industri yang direncanakan, sehingga kebutuhan akan listrik untuk Kawasan Industri Belang-Belang ini dapat dipasok dari PLTU Belang-Belang.

3. Air Bersih/Air Baku

Peruntukkan sumber air baku bagi kawasan industri tergolong besar dan tidak memungkinkan menggunakan air pengolahan milik Negara maupun masyarakat. Dengan keberadaan Sungai Papalang yang memiliki debit yang relatif kecil sekitar 60 - 100 m³/detik yang berada di sekitar Industri, maka penggunaan sumber air baku dapat menggunakan dari Sungai Papalang yang terlebih dahulu dilakukan bendung untuk dapat memenuhi kapasitas air yang dibutuhkan. Pengembangan sumber air ini yang di ambil dari Sungai Papalang dilakukan dengan sistem perpipaan yang dibantu dengan mesin pendorong untuk dapat masuk ke dalam sistem pengolahan air bersih didalam kawasan industri yang kemudian didistribusikan ke masing-masing water intake tiap kawasan.

5. Konsep Pembagian Kawasan

Untuk tema konsep keseluruhan dalam perencanaan Master Plan Kawasan Industri Mamuju ini didasarkan pada tema "Green Industri Belang-Belang Estate". Tema ini diangkat dengan ekpektasi agar kawasan industri ini menjadi suatu kawasan yang ramah lingkungan hemat energi dan berkelanjutan. Selama ini industri selalu identik dengan produk limbah yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, dalam masterplan ini berusaha untuk mengambil tema "Green Industri" yang dijabarkan melalui prinsip-prinsip pengembangan kawasan.

Kawasan industri adalah kawasan yang direncanakan dengan cara komprehensif, sehingga kegiatan industri dapat sejalan dengan kegiatan masyarakat di lokasi tersebut. Rencana komprehensif tersebut harus



mencakup rencana jaringan jalan untuk kendaraan angkutan, garis sempadan bangunan yang sesuai, ukuran kapling yang minimum, ratio tata guna tanah minimum, kelengkapan arsitektur, kebutuhan landscape, yang semuanya dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan ruang dan kemampuan tanah yang memberikan hubungan yang harmonis terhadap lingkungan sekeliling. Kawasan industri haruslah mempunyai luas yang cukup dan diletakkan pada zona yang sesuai untuk menghindari lingkungan sekeliling menjadi lebih buruk. Manajemen bertanggung jawab seterusnya untuk menjaga hubungan yang sesuai antara kawasan industri dengan masyarakat sekeliling dan sekaligus melindungi investasi yang telah dibuat (Hartshon dalam Lisdiyono, 2006).

Menurut *National Industrial Zoning Committee's* (USA) 1967, yang dimaksud dengan Kawasan Industri atau Industrial Estate atau sering juga disebut sebagai Industrial Park adalah sebuah kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administrasi dikontrol oleh seorang atau lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, ketersediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.

Bila berdasarkan jenis dari kawasan industri dan memperhatikan bentuk dan skala industri yang dapat dikembangkan di Kawasan Industri Belang-Belang di Mamuju, luasan kapling pada Kawasan Industri ditetapkan secara fleksibel, dimana luasan kapling akan ditentukan sesuai permintaan pembeli/penyewa berdasarkan kebutuhan ruang kegiatan industri yang akan dikembangkan. Pengembangan peruntukkan Kawasan Industri Belang-Belang ditetapkan berdasarkan peruntukkan dari masing-masing kawasan. Adapun luasan dari peruntukkan kawasan industri pengolahan yang akan dikembangkan di Kabupaten Mamuju mencapai 1.255 Ha yang terdiri dari 3 kelompok industri berdasarkan karakteristik pengolahan antara lain :



Industri Besar seluas 454.21 Ha.

Industri Sedang seluas 211.87 Ha.

Industri Kecil seluas 51.38 Ha.

Keragaman aktivitas yang ada di dalam Kawasan Industri menjadi hal pokok dalam menentukan proses perencanaan berikutnya. Berikut ini adalah beberapa jenis aktifitas yang akan ditampung di kawasan ini :

1. Komponen utama kegiatan industri meliputi :
 - a. Kelompok industri Besar
 - b. Kelompok industri Sedang
 - c. Kelompok industri Kecil
2. Komponen pelengkap (ruang terbuka) meliputi :
 - a. *Open space (green area)*
 - b. Jalur Hijau (*greenbelt*)
3. Komponen Penunjang meliputi :
 - a. Pergudangan; merupakan lahan yang disediakan untuk penyimpanan dan penyediaan bahan baku pabrik dan barang produksi jadi (*stock yard*). Di lokasi ini juga biasanya disediakan alat berat yang bisa disewa untuk pengangkutan barang di lahan *stock yard*.
 - b. Pemadam kebakaran; fasilitas pemadam kebakaran harus disediakan dalam suatu kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi secara dini bila terjadi kebakaran di kawasan ini, meskipun masing-masing pabrik sudah dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhannya.
 - c. Kantor Badan Pengelola Kawasan; merupakan fasilitas perkantoran bagi badan yang mengelola kawasan industri secara keseluruhan.
 - d. Area Perkantoran (Komersil); unit-unit perkantoran merupakan fasilitas utama bagi suatu kawasan industri, karena dari perkantoran ini berbagai program kegiatan industri dikomandokan. Unti perkantoran harus ditata sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan tinggal dan bekerja bagi para karyawannya.



- e. Area inovasi; merupakan area yang digunakan sebagai lokasi pusat pengembangan inovasi baik SDM maupun inovasi produk industri yang pelayanan kawasan, berupa area sekolah, akademi, universitas maupun training center serta pusat riset.
 - f. Lingkungan Permukiman; disediakan bagi para pegawai yang bekerja di kawasan industri ini. Jarak tempuh dan waktu yang diperlukan bagi para pekerja menjadi pertimbangan utama penyediaan perumahan karyawan ini.
 - g. Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial; suatu kawasan industri harus menyediakan berbagai sarana umum lainnya seperti sarana komersial, rumah sakit/klinik, tempat peribadatan, hotel, perekonomian/pujasera, lapangan olahraga dan lainnya. Fasilitas-fasilitas ini nantinya akan menambah daya tarik calon pembeli / pemakai kawasan industri.
4. Sarana dan Prasarana pendukung lainnya meliputi :
- a. Jaringan jalan
 - b. Jaringan air bersih Dan Pengolahan Air Bersih
 - c. Jaringan pengolah air limbah
 - d. IPAL
 - e. Drainase
 - f. Jaringan listrik dan Powerplan / Gardu Induk
 - g. Jaringan telepon dan Rumah Telpon

6. Konsep Zonasi Kawasan

Konsep zonasi akan mengarahkan bagaimana fungsi-fungsi yang ada ditempatkan dan dikelompokkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Pertimbangan utama dari perencanaan zonasi adalah bagaimana penempatan masing-masing fungsi mendapatkan hasil yang

berdasarkan kondisi tapak dan persyaratan teknis yang tnya.



Jalan Trans Sulawesi merupakan jaringan jalan yang membelah kawasan perencanaan dan adanya 3 kegiatan kawasan yang berbeda dalam satu kawasan Industri yang menjadi pertimbangan utama dan mendasar dalam menentukan konsep zonasi di Kawasan Industri Belang-Belang ini.

Di dalam pembagian zona untuk kawasan industri tersebut memiliki beberapa zona peruntukkan disesuaikan berdasarkan fungsi dari zona itu sendiri. Adapun pembagian zona dalam Kawasan Industri Belang-Belang ini adalah :

a. Zona Industri dan Bahan Baku

- Diarahkan penempatannya di lokasi yang agak jauh dari permukiman penduduk untuk menghindari terganggunya kegiatan industri maupun kehidupan sosial masyarakat sekitarnya.
- Lokasi dekat dengan jalur utama pergerakan di luar kawasan, untuk memudahkan aksesibilitas kendaraan industri yang keluar maupun masuk ke dalam kawasan industry.
- Ditempatkan pada lahan yang datar, selain untuk mengurangi biaya pematangan lahan yang tinggi, juga dengan mempertimbangkan kelancaran dan keamanan pergerakan kendaraan industri yang umumnya mempunyai berat maksimal 20 ton.

Zona Industri secara aktifitas sangat berbeda dengan dengan zona lain, karena merupakan aktifitas produksi sehingga menghasilkan produk yang akan dikirim kembali dengan aktifitas kendaraan yang besar. Zona industri juga menghasilkan limbah yang sangat berbahaya dan pencemaran udara serta pencemaran suara, sehingga zona ini ditempatkan jauh dari Zona Pemukiman. Kemudian zona industri tersebut didukung pula oleh zona bahan baku sebagai penyuplai bahan baku bagi kegiatan industri yang ada.



b. Zona Eksport dan Pergudangan

Pada zona ini merupakan zona yang dijadikan sebagai pusat penyimpanan bahan baku maupun hasil dari kegiatan industri yang sebelumnya akan didistribusikan melalui jalur laut/pelabuhan dalam kawasan industri, melalui jalur rel, dan melalui jalur darat.

Kemudian pada zona ini di alokasikan di bagian barat daya kawasan yang berdekatan dengan pesisir pantai, dikarenakan di dalam zona ini merupakan kegiatan pelabuhan tempat bersandar kapal dan aktivitas bongkar muat muatan yang merupakan sumber bahan baku ataupun hasil dari pengolahan dari kegiatan industri pada kawasan industri mamuju.

c. Zona Pelayanan/Sarana Penunjang

Zona ini merupakan zona yang digunakan oleh seluruh pengguna Kawasan industri baik industri besar, sedang dan industri kecil yang ada, sehingga diletakan pada posisi yang akan merupakan center point atau berada posisi strategis dalam membentuk kawasan industri jauh lebih indah dan baik tanpa harus terlihat lebih dahulu industrinya. Zona ini akan mendistribusikan seluruh fungsinya baik ke zona – zona Industri maupun ke Zona lainnya. Dalam zona pelayanan ini meliputi sarana dan prasarana bagi pendukung kegiatan industri maupun perumahan bagi karyawan.

Menurut Inskeep (1991:432), zonasi diciptakan/dibuat dengan maksud untuk membatasi daerah-daerah dengan jenis penggunaan lahan yang berbeda-beda sehingga kepentingan masing-masing penggunaan lahan tidak bertabrakan dan lebih dapat dikendalikan serta diawasi. Selain itu juga zonasi diperlukan sebagai suatu usaha meminimalan dampak kerusakan yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat adanya kunjungan. Zonasi ini berguna dalam membagi konsentrasi pengunjung, sehingga terjadi konsentrasi di satu tempat yang dapat mengakibatkan anan pengunjung menjadi berkurang.



7. Konsep Skenario Pengembangan Kawasan

Skenario pengembangan kawasan di titik beratkan pada zona industri terlebih dahulu karena industri merupakan kegiatan investasi yang dapat menghidupkan kawasan ini, terlebih peruntukan lahan telah ditetapkan oleh peraturan daerah No. 01 Tahun 2014.

Skenario pengembangan kawasan berawal dari ketersediaan infrastruktur khususnya energi, akses dan air bersih, apa yang ada dimanfaatkan se efisien mungkin, ini menjadi awal pengembangannya yang dikonvert ke dalam luasan lahan. Ilustrasi skenario pengembangan kawasan, adalah memanfaatkan secara optimal sumber energi, PLTU Belang-Belang yang memiliki kapasitas 2 X 25 MW yang nantinya sebagai pemasok dari sumber energi listrik untuk kawasan industri ini.

Dengan adanya sumber energi listrik yang dapat diperuntukkan bagi kawasan industri, skenario kedua adalah dengan pengembangan akses masuk kawasan yang keberadaan sekarang masih baru bisa dicapai melalui jalan Trans Sulawesi dengan lebar 8 meter yang kondisi perkerasan masih menggunakan aspal. Keberadaan kondisi jalan tersebut memang masih sangat terbatas, terlebih bagi peruntukan akses untuk kawasan industri, untuk itu perlu adanya skenario pengembangan jalan antara lain :

- a. Peningkatan jalan Trans Sulawesi dengan melakukan pelebaran jalan hingga 14 meter serta menggunakan perkerasan betonisasi, hal ini dimungkinkan untuk kendaraan industri yang melalui jalan tersebut sebagai akses utama.
- b. Pembangunan jalan utama di dalam kawasan untuk memudahkan akses ke kawasan industri, hal ini dikarenakan disekitar kawasan belum memiliki jalan yang dapat dilalui oleh alat berat sebagai sarana pendukung kegiatan industri.
- c. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan khusus sebagai pergerakan barang-barang industri baik ekspor maupun impor bagi kegiatan industri.



- d. Skenario ketiga dalam pengembangan kawasan industri adalah ketersediaan air bersih, dimana kebutuhan akan air bersih dalam kawasan industri cukup besar terlebih kegiatan tersebut sebagai industri pengolahan dan manufaktur. Kebutuhan akan air bersih diperkirakan hingga 2.500 m³/hari yang memerlukan WTP sekitar 5 hingga 7 Ha dalam kawasan dengan sumber yang dimungkinkan diambil dari Bendung Sungai Papalang. Dengan kebutuhan tersebut, maka keberadaan bendung sungai papalang minimal harus dapat menyuplai air bersih sekitar 5.000 m³/hari, untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama pemerintah daerah maupun pusat dalam pengembangan dan pembangunan Bendung Sungai Papalang yang saat ini belum ada dan perlu melakukan upaya untuk pembangunan. Apabila kebutuhan akan air tidak dapat di pasok dari air Sungai Papalang meskipun sudah dilakukan pembendungan, maka mau tidak mau perlu melakukan pengolahan air laut menjadi air baku industri dengan cara destilasi air laut.

Uraian beberapa konsep yang diusung dalam rangka pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat di atas akan terus dikembangkan hingga pada akhirnya kawasan industri “**Green Industri Belang-Belang Estate**” menjadi pelopor pembangunan industri yang berkelanjutan di Indonesia. Harapan lain, Pemerintah Provinsi dapat melihat momentum pembangunan ini untuk mengejar dan mencapai setiap indikator yang dinilai masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

4.4.1.2 Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Industri

Visi dan misi Kawasan Industri Sulawesi Barat harus memiliki tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan berprinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan gan stakeholders.



Dalam skenario pengembangan Kawasan Industri Sulawesi Barat sebagai hilirisasi industri agro, logam serta SDA lainnya, maka menjadikan Kawasan Industri Sulawesi Barat menjadi kawasan industri aneka industri turunannya dengan asumsi pemanfaatan keunggulan daerah yaitu agro dan logam, serta sumber daya alam lain beserta turunannya dengan memperhatikan lingkungan menjadikan sebagai :

”Green Industri Belang-Belang Estate”

Skenario pengembangan kawasan di titik beratkan pada zona industri terlebih dahulu karena industri merupakan kegiatan investasi yang dapat menghidupkan kawasan ini, terlebih peruntukan lahan telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014.

- **Visi Kawasan Industri Mamuju**

Visi pengembangan kawasan industri Mamuju adalah :

“Kawasan Industri Mamuju Sebagai Kawasan Ekonomi Modern di Pulau Sulawesi ”

- **Misi Kawasan Industri Mamuju**

- 1) Menyediakan kawasan industri modern berbasis pengolahan sumber daya alam dari sektor perkebunan, pertambangan dan sumber daya alam lokal lainnya dengan orientasi pada penguatan nilai tambah;
- 2) Mengembangkan Kawasan Industri secara terpadu, seimbang dan selaras sebagai satu kesatuan ekonomi wilayah.
- 3) Menyediakan kawasan industri dengan ruang kawasan-kawasan pengembangan bagi investasi sektor/sub-sektor ekonomi secara terpadu, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dengan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
- 4) Menyediakan kawasan industri modern dengan akses ke pintu gerbang perdagangan internasional.
- 5) Menggalang kerjasama kemitraan yang setara antara pelaku industri (sektor swasta) dengan masyarakat dalam



pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan perkotaan serta pemberdayaan masyarakat.

- 6) Mewujudkan inovasi teknologi dalam pengembangan produk – produk dan SDM bagi industri sehingga mampu meningkatkan pengembangan di sektor industri yang lain.
- 7) Menciptakan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing bagi terciptanya iklim usaha dan investasi yang mendorong tumbuhnya kesempatan kerja dan berkembangnya perekonomian daerah.

Dari beberapa konsep diatas yang akan menjadi prinsip-prinsip acuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam proses pembangunan kawasan industri, juga ditanggapi oleh aktivis lingkungan Saudara Muh. Rifai Sahida. Selaku pendiri yayasan organisasi Tangan Edukasi Indonesia yang berfokus pada gerakan lingkungan hijau dan bebas sampah, beliau dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Kalau melihat dari konsep-konsep yang dibawa, sangat bagus menurutku. Apalagi ini kan kalau kita mau pandang dari *Sustainable Development Goals* (SDGs)nya memang paling utama itu yang harus dilihat yah, keberlanjutan dan bagaimana dampaknya juga terhadap lingkungan. Dan menurut saya sendiri konsep-konsep itu sudah sangat bagus sisa bagaimana penerapannya nanti. Ini Sulawesi Barat kan masih sangat baru, kawasan terbuka hijaunya itu masih sangat berpotensi untuk dirusak jika tidak ada pengkajian yang lebih matang terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan. Terkait bagaimana dampak ke lingkungannya dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Belum lagi kalau kita bahas dari aspek sampahnya, pasti mi akan selalu terlihat ketika itu tidak diantisipasi memang di awal sama pemerintah. Karena kalau boleh jujur, kami dari kalangan teman-teman aktivis pecinta lingkungan di Sulawesi Barat terutama yang



ada di Mamuju itu belum pernah dilibatkan secara langsung oleh pemerintah Provinsi dalam proses pengkajian bersama terhadap analisis dampak lingkungan terlebih terkait pembangunan kawasan industri ini. Semoga berjalan sesuai yang diharapkanji semua kedepannya”.

Dengan hasil wawancara tersebut, ternyata dapat dilihat bahwa proses keterlibatan oleh seluruh *stakeholder* dalam penggeneralisiran *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam setiap rencana pembangunan terkhusus dalam proses pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat belum dilaksanakan dengan cukup baik. Dan hal ini terlihat jelas dampaknya pada beberapa ruas pembangunan yang telah dilaksanakan, dimana tidak mempertimbangkan konsekuensi aspek keberlangsungan lingkungan yang lebih matang dan dari segi aspek pemeliharannya. Seperti ruas jalan arteri, wilayah penggerukan tambang, dan sebagainya. Dengan masih adanya kendala yang ditemukan, tentu ini menjadi Pekerjaan Rumah tambahan bagi Pemerintah Provinsi dalam upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam pembangunan sektor publik di Sulawesi Barat.

4.4.1.3 Rencana Peruntukan Industri

Berdasarkan hasil analisis dan pengelompokkan Industri yang ada dalam Kawasan Industri Provinsi Sulawesi Barat, maka peruntukan industri didasarkan atas kluster yang akan dikembangkan, adapun pengelompokkan tersebut meliputi :

1) Industri Besar

Merupakan pengelompokkan industri dari potensi yang akan dikembangkan di dalam kawasan industri kebutuhan lahan dan tenaga kerja yang besar. Kluster industri yang masuk ke dalam kelompok industri

meliputi :

Industri Kapal Baja dan Reperasi Kapal

Industri Kapal Fiber



- c. Industri smelter Nikel
- d. Industri smelter Tembaga
- e. Industri smelter baja
- f. Industri Particle Board
- g. Industri Pipa baja
- h. Industri Konstruksi
- i. Industri Otomotif
- j. Industri Elektronika
- k. Industri Makanan dan Minuman
- l. Industri CPO
- m. Industri PKO
- n. Industri Pengolahan Kakao
- o. Industri Minyak Olahan
- p. Industri Kimia
- q. Industri Kosmetik
- r. Industri Farmasi

2) Industri Sedang

Merupakan pengelompokan industri dari potensi yang akan dikembangkan di dalam kawasan industri kebutuhan lahan dan tenaga kerja yang sedang. Kluster industri yang masuk ke dalam kelompok industri sedang, meliputi :

- a. Industri Particle Board
- b. Industri Pipa baja
- c. Industri Otomotif
- d. Industri Elektronika
- e. Industri Kapal Fiber
- f. Industri Alat Pertanian
- g. Industri Makanan dan Minuman
- h. Industri Pengolahan Kakao
- Industri Minyak Olahan
- Industri Kimia
- Industri Kosmetik



- l. Industri Pengolahan Daging
- m. Industri Pengolahan Ikan
- n. Industri Farmasi

3) Industri Kecil

Merupakan pengelompokan industri dari potensi yang akan dikembangkan di dalam kawasan industri kebutuhan lahan dan tenaga kerja yang sedikit/kecil. Kluster industri yang masuk ke dalam kelompok industri kecil, meliputi :

- a. Industri Makanan dan Minuman
- b. Industri Minyak Olahan
- c. Industri Kimia
- d. Industri Furniture

Dari uraian peruntukan industri di atas, sampai sejauh ini jenis industri yang bertumbuh secara pesat dan berkembang dengan baik di Sulawesi Barat masih terkonsentrasi pada jenis industri kluster besar sedangkan untuk jenis industri sedang dan kecil masih belum signifikan pertumbuhannya. Hal ini dikarenakan sarana prasarana penunjang terhadap industri sedang dan kecil masih masuk kategori minim sehingga perlu adanya kembali upaya untuk menambah sarana prasarana yang dapat kembali menghidupkan beberapa industri yang dinilai berpotensi secara besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Serta sebagai bentuk persiapan lebih awal setiap pelaku industri dalam memasuki kawasan industri Sulawesi Barat kedepannya.

4.4.2 Pengembangan Inovasi

Proses pembangunan tidak terlepas dari sebuah inovasi. Dalam setiap pembangunan mengharuskan adanya inovasi-inovasi yang baru untuk menghidupkan pembangunan di suatu daerah. Terlebih dalam tujuan ke-sembilan SDGs yang menghadirkan inovasi dalam penguatan

pembangunan industri dan infrastruktur. Di Sulawesi Barat sendiri, pembangunan inovasi-inovasi disetiap pembangunan terus diupayakan, kembali menjadi kendala bahwa inovasi yang dikembangkan tetap



berdasar pada aspek lingkungan yang mana hal tersebut harus kembali dikaji secara berkala dan lebih mendalam mengingat sebagai salah satu provinsi baru, Sulawesi Barat masih butuh kajian lebih dalam pembangunannya disamping inovasi yang terus harus dikembangkan. Pemuda pendiri yayasan organisasi Tangan Edukasi Indonesia, Muh. Rifai Sahida dalam wawancara bersama dilakukan mengatakan bahwa:

“Iya betul sekali. Sulawesi Barat memang masih sangat muda dan perlu inovasi-inovasi yang lebih dalam pembangunannya. Tapi perlu diingat juga, bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasarkan pada aspek keberlanjutan. Seperti mi yang ada dalam konsep SDGs. Maksudnya adalah inovasi yang dilakukan itu ada kajiannya terlebih dahulu sebelum dilakukan terutamanya dari aspek lingkungan supaya. Pembangunan tetap berjalan dan lingkungan juga tetap aman. Selain itu, menurut saya juga inovasi yang baik itu adalah inovasi pembangunan yang didasarkan pada apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan provinsi Sulawesi Barat pada umumnya. Begitu kalau dari saya”.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Barat tengah menggarap suatu inovasi berbasis pengembangan telekomunikasi yang bekerjasama dengan beberapa Organisasi perangkat daerah yang dianggap menjadi terobosan bagi setiap wilayah yang ada di Sulawesi barat. Hal tersebut karena masih kurangnya pemerataan pembangunan yang berbasis teknologi telekomunikasi. Sedangkan patut diketahui bahwa dengan kondisi zaman yang terus berkembang, keterlibatan telekomunikasi dalam lini aspek proses pembangunan sangatlah amat penting. Terkhusus dalam pengembangan kawasan industri yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri.



dapun pengembangan inovasi tersebut dimulai terhadap pangan kawasan industri dengan sistem jaringan telepon yang oleh sentral telepon, dalam hal ini penyediaan kebutuhan telepon

untuk kawasan industri untuk menggunakan sentral telepon terdekat, dengan pertimbangan jarak lokasi STO tersebut lebih dekat dengan lokasi daripada sentral telepon lainnya sehingga dapat menghemat dalam pembangunan jaringannya. Dari sentral telepon tersebut, kemudian diteruskan ke rumah kabel, kemudian ke jaringan transmisi, ke drop wire dan akhirnya ke rumah-rumah. Gubernur Sulawesi Barat Bapak Drs. H. Andi Ali Baal Masdar M.Si dalam wawancaranya, kembali menyampaikan bahwa:

“Mengenai inovasi yang pemerintah tengah usahakan dalam proses pembangunan akhir-akhir ini adalah bagaimana usaha agar sistem jaringan baik telepon, internet, dan teknologi semua bisa dirasakan oleh semua masyarakat Sulawesi barat terlebih pada wilayah yang belum memiliki akses jaringan komunikasinya dan wilayah sekitaran rencana pembukaan kawasan industri. Hal itu agar pembangunan bisa saling terpadu satu sama lain. Tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Itu harapan terbesar saya secara pribadi. Tapi yang paling utama terlebih dahulu yang dekat ini kami sementara susun itu ialah mengenai sistem jaringan komunikasi atau telepon yang sejauh ini juga bisa saya katakan sudah berjalan sekitar 45 persen. Masih perlu untuk disusun lebih matang lagi”.

Menurut jenis konsumennya, kebutuhan jaringan telepon dapat dibagi atas 3 penggunaan, yaitu:

- Kebutuhan untuk industri
- Kebutuhan untuk fasilitas umum
- Kebutuhan bagi umum (telepon umum)

Perkiraan kebutuhan telepon didasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Perindustrian dan analogi terhadap beberapa w/zona industri yang telah ada, yaitu :



- Kebutuhan Industri adalah 20 – 40 SST/Ha
- Telepon Umum Kawasan adalah 1 SST/10 Ha
- Fasilitas pendukung lainnya adalah 1,29 SST/Ha.

Sehingga diperoleh kebutuhan penyediaan telekomunikasi dalam penyediaan satuan sambungan telepon adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Kebutuhan Telekomunikasi Kawasan

No	Jenis Kegiatan	Standar Kebutuhan SST	Kebutuhan Sambungan Telepon (SST)
1	Industri	20 - 40 SST/Ha	28,699
2	Telepon Umum	1 SST/10 Ha	72
3	Fasilitas	1.29 SST/Ha	151
Jumlah			28,921

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019.

Sistem jaringan telepon diawali oleh sentral telepon, dalam hal ini penyediaan kebutuhan telepon untuk kawasan industri untuk menggunakan sentral telepon terdekat, dengan pertimbangan jarak lokasi STO tersebut lebih dekat dengan lokasi daripada sentral telepon lainnya sehingga dapat menghemat dalam pembangunan jaringannya. Dari sentral telepon tersebut, kemudian diteruskan ke rumah kabel, kemudian ke jaringan transmisi, ke drop wire dan akhirnya ke rumah-rumah.

Di masa mendatang pengembangan jaringan kabel akan semakin berkurang, digantikan oleh menara-menara BTS untuk jaringan nirkabel. Oleh karena itu perlu regulasi khusus untuk penyediaan infrastruktur tersebut, agar perkembangan menara dapat dibatasi sehingga tidak memberikan dampak teknis maupun visual terhadap wilayah.



Berdasarkan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi bagi kawasan industri dan sarana penunjang lainnya sebesar 28.921 SST merupakan kebutuhan yang cukup besar, oleh karena itu konsep pengembangan telekomunikasi di dalam kawasan industri adalah :

- 1) Pola penyediaan telekomunikasi dilakukan oleh PT Telkom untuk dapat memenuhi kebutuhan telekomunikasi dalam kawasan industri. Adapun pola penyediaannya sebagai berikut :
 - a. Pola hibah, yaitu suatu paket kerjasama dimana konsumen (pengusaha industri) mengadakan jaringan sendiri secara lokal sampai kurun waktu tertentu konsumen tidak ditarik biaya pemakaian.
 - b. Pola bagi hibah, yaitu kerjasama dimana ongkos pasang ditanggung bersama oleh pihak PT Telkom dan pengusaha industri dan biaya pemakaian telepon ditanggung bersama untuk suatu kurun waktu tertentu.
- 2) Pola penyediaan telekomunikasi dilakukan oleh pihak operator GSM/CDMA yang bekerjasama dengan pelaku industri dalam penyediaan telekomunikasi.
- 3) Penyediaan telekomunikasi dalam kawasan industri dapat dikelola langsung penyediaannya oleh badan pengelola kawasan dengan menggunakan sistem dari penyediaan PT. Telkom maupun dari operator GSM/CDMA yang didistribusikan ke masing-masing industri.
- 4) Sistem jaringan telekomunikasi menggunakan serat optik dan berada pada jaringan tanah sehingga terkesan lebih rapih dan bersih tanpa ada kabel – kabel yang bergelantungan dipinggir jalan kawasan.

Dari gambaran perencanaan serta hasil wawancara di atas, pangan inovasi yang saat ini tengah dikembangkan di Sulawesi akan kembali dilaksanakan berjalan prosesnya seiring gunan pada kawasan industri yang dimaksud. Inovasi terkait pada



sistem jaringan telepon ini tentu menjadi salah satu terebosan agar setiap pembangunan yang dilaksanakan bisa lebih berjalan secara maksimal. Karena disadari, bahwa proses pembangunan yang dilakukan sejauh ini sebelumnya di Sulawesi Barat masih kurang dalam proses pengembangan inovasi terlebih inovasi akan teknologi komunikasi. Dengan adanya pengembangan ini, kembali bahwa dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Sulawesi Barat dengan mudahnya akses komunikasi untuk mempermudah berlangsungnya proses perekonomian.

4.4.3 Pengembangan Infrastruktur Dasar

Pengembangan infrastruktur dasar merupakan salah satu aspek dari proses pembangunan yang tentunya berpengaruh besar terhadap ketercapaian SDGs di Provinsi Sulawesi Barat terutamanya dalam tujuan ke-sembilan. Sebagai provinsi yang tergolong masih muda tentunya masih banyak terkendala dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan khususnya pada beberapa wilayah tertinggal. Hal ini disampaikan secara langsung juga oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Bina Marga, Bapak Sudra Satriadi yang mengatakan bahwa:

“Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di Sulawesi Barat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain ketersediaan anggaran pemerintah daerah untuk membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai masih sangat kurang. Kondisi lain yang juga sangat berpengaruh adalah kondisi geografis daerah tertinggal yang jauh dan sulit dijangkau sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan masyarakat. Dari kami sendiri, upaya yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan anggaran yang ada tersebut walaupun belum sepenuhnya dapat direalisasikan untuk mencapai target tahunan.”



Gubernur Sulawesi Barat Bapak Drs. H. Andi Ali Baal Masdar M.Si juga menyampaikan:

“Jika berbicara infrastruktur maka kita akan berbicara tentang pelayanan dan masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur juga sudah jelas selalu menjadi pekerjaan untuk pemerintah setiap tahunnya karena memang hal itu sangat dekat dengan masyarakat. Untuk tahun ini pengembangan infrastruktur yang sudah rampung dijalankan itu sudah mencapai 65 persen yang tersebar di beberapa kabupaten yang ada. Sebenarnya ini tidak sesuai dengan target awal yang kami rencanakan yang pada memasuki pertengahan tahun itu, seharusnya sudah rampung sekitar 80 persen. Karena diketahui bersama, kendala terbesar yang kami alami dan saya pikir juga dialami oleh Provinsi lainnya itu ialah karena akibat adanya pandemi viru covid-19 ini. Namun kami tetap optimis capaian untuk pembangunan infrastruktur ini masih bisa meningkat hingga akhir tahun 2020. Dan yang paling penting dalam perluasan dan perbaikan jalan di setiap kabupaten yang menjadi jalan provinsi.”

Adapun gambaran secara umum kondisi sarana dan prasarana di Sulawesi Barat untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan adalah sebagai berikut :

a. Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar arus transportasi darat dan kegiatan perekonomian. Kegiatan pembangunan tidak bisa terlepas dari peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke daerah lain. Jalan provinsi merupakan

na yang sangat berkontribusi terhadap kelancaran arus barang di i Barat sehingga kondisi jalan harus dalam keadaan mantap. tahun terakhir ini, berdasarkan paparan hasil kinerja dinas PUPR



Sulawesi Barat, kondisi jalan mantap provinsi mengalami peningkatan, Pada tahun 2018 kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat yang dalam kondisi mantap sebesar 34,04% (sesuai target RPJMD Sulawesi Barat 2017-2022) dan tidak mantap sebesar 65,96%, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 37,24% (juga sesuai target RPJMD Sulawesi Barat 2017-2022) kondisi mantap dan 62,76% kondisi tidak mantap. Walaupun kondisi tidak mantap masih terbilang cukup tinggi, namun persentase kondisi jalan mantap akan diupayakan dapat terealisasi lebih tinggi dari kondisi jalan tidak mantap pada tahun 2022 yang dalam RJMD Sulawesi Barat 2017-2022 sebanyak 67,65%. Bapak Sudra Satriadi lebih lanjut mengatakan bahwa:

“Kondisi jalan yang ada di provinsi Sulawesi Barat saat ini dapat kita pantau bersama. Terlebih masyarakat yang terkendala akan ganti rugi lahan ataupun konflik sosial terkait pelebaran maupun perpanjangan jalan provinsi tersebut. Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat sejauh ini telah melakukan inovasi dalam penyediaan aplikasi sistem penanganan jalan daerah. Itu dimaksudkan agar proses yang menunjang pembangunan berkelanjutan itu dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Sehingga komunikasi dan harmonisasi yang selama ini selalu menjadi permasalahan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan dapat tercipta melalui informasi yang lebih akurat didapatkan oleh masyarakatnya dan pemerintah yang lebih terbuka dalam menanggapi setiap kendala yang ada”.

Kondisi jalan yang ada juga tidak luput dari perhatian seorang aktivis lingkungan Muh. Rifai Sahida, beliau mengatakan:

“Yang saya lihat dan menjadi kendala terbesar sekarang dalam kondisi jalanta di Sulawesi Barat itu mengenai pemeliharaan dan ketersediaan tempah sampah. Karena menurutku, proses pembangunan yang baik itu ketika bisa dilaksanakan juga itu sehingga ada proses keberlanjutannya. Lihatmi sekarang kondisi



jalan, terutamanya di Ibukota Mamuju hanya ada berapa banyak tempah sampah yang tersedia dan dalam kondisi layak dan ada berapa banyak jalan umum yang tidak terawat. Hal itu juga sebenarnya karena kurangnya kajian mendalam di awal perencanaan pembangunan. Saya bukan hanya melihat kelalaian dari pemerintah daerah saja, tetapi budaya masyarakat kita juga yang memang belum sepenuhnya pada terhadap setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah”.

Dengan menganalisis terkait hasil wawancara dan uraian kondisi infrastruktur di atas, kondisi infrastruktur di Sulawesi barat masih belum dapat dikatakan cukup baik. Kendala ini terlihat dari masih kurangnya pemeliharaan jalan dan ketersediaan tempat sampah yang ada. Namun disisi yang lain, kendala yang sama dialami untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada infrastruktur di Sulawesi Barat yaitu bagaimana kebijakan atau aturan terkait pemakaian infrastruktur ini dapat lebih tegas lagi sehingga setiap kendala yang masih dialami bisa saling tertutupi dan kembali pemerintah serta masyarakat harus kembali bersama untuk melihat pembangunan yang telah ada di Sulawesi Barat hingga saat ini itu dengan melalui berbagai proses yang tidak mudah sebagai sebuah provinsi yang tergolong masih baru.

Capaian dan kondisi jalan provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel 31 dan gambar 5 berikut.



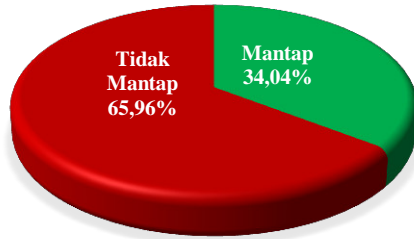
Tabel 31. Capaian kondisi jalan provinsi Sulawesi Barat 2018-2019

NO	RUAS JALAN PROVINSI	PANJANG (Km)	CAPAIAN JALAN TAHUN 2018				CAPAIAN JALAN TAHUN 2019			
			BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Salubatu– Bonehau	28,7	2.00	5.70	21.00	0.00	3.95	5.70	19.05	0.00
2	Bonehau- Kalumpang	21,97	0.00	16.92	5.05	0.00	0.00	16.92	5.05	0.00
3	Kalumpang Batuisi	15,74	3.75	0.90	3.50	7.59	3.75	0.90	3.50	7.59
4	Batuisi - Bts Luwu Utara	42,3	0.00	0.00	2.00	40.30	0.00	0.00	2.00	40.30
5	Jl. Martadinata - Sumare (Rangas) - Bts. Tapalang Bar	55	7.33	3.70	37.48	6.50	8.62	3.70	37.48	5.21
6	Batuisi – Bts Toraja	44,64	0.00	0.00	0.70	43.94	0.00	0.00	0.70	43.94
7	Lampa (Mapilli) - Matangnga	45,68	34.37	0.00	0.35	196	39.97	0.00	0.35	5.36
8	Matangnga – Keppe	31,1	0.10	20.40	3.60	7.00	0.10	20.40	3.60	7.00
9	Salutambung – Urekang	36,46	2.31	9.12	22.83	2.20	4.01	9.12	22.83	0.50
10	Urekang – Mambi	18,58	0.00	5.20	1.60	11.78	0.00	5.20	1.60	11.78
11	Tikke - Bts Sulteng	9,5	6.80	0.44	1.56	0.70	7.45	0.44	1.56	0.05
	TOTAL JALAN PROVINSI	349,67	56.654	62.388	99.661	130.967	67.844	62.388	97.711	121.727

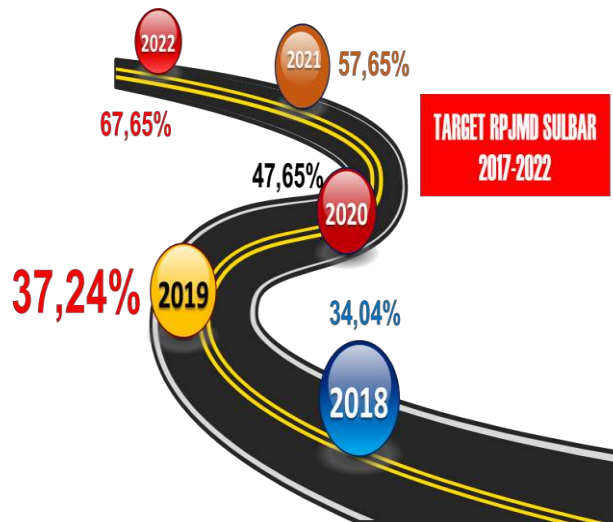


Gambar 5. Kondisi Jalan Provinsi Sulawesi Barat 2018-2019

**KONDISI JALAN
PROVINSI TAHUN 2018**



**KONDISI JALAN
PROVINSI TAHUN 2019**



Sumber: Paparan Capaian Kinerja PUPR 2019

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pola penerapan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat khususnya konektivitas antar pusat-pusat kegiatan wilayah terutamanya pengembangan infrastruktur jalan dalam menunjang kawasan industri di Sulawesi Barat serta untuk mengantisipasi perkembangan pergerakan manusia, barang dan jasa, dan sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Sulawesi Barat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan berbagai persiapan untuk

gunan jalan arteri yang disebut **Mamuju Arterial Road to Belang-belang International Port**. Dengan pertimbangan
in :



1. Mempercepat waktu tempuh antara Ibukota Provinsi Sulawesi Barat dengan outlet (Bandara Tamba Padang dan Pelabuhan Belang-belang);
2. Mendukung rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi Kota Mamuju, Bandara Tamba Padang dan Pelabuhan Belang-belang;
3. Memperbaiki geometrik jalan sesuai dengan standar Jalan Nasional agar dapat dilalui oleh segala jenis kendaraan dengan aman dan nyaman;
4. Menjadi Landmark dan pengembangan Kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat;
5. Menunjang obyek wisata bahari serta sekaligus penanggulangan abrasi pantai yang terjadi di sepanjang Kota Mamuju.



Gambar 6. Pembangunan Mamuju Arterial Road to Support Belang-belang International Port Tahap I

Sumber : Dinas PU dan PR Provinsi Sulawesi Barat



Pembangunan infrastruktur jalan tersebut dalam rangka mendukung ketercapaian pengembangan kawasan industri yang akan dikembangkan di Sulawesi Barat serta upaya untuk mewujudkan nilai indikator pembangunan ke-sembilan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Sulawesi Barat dengan target infrastruktur yang telah disusun dalam RPJMD Sulawesi barat 2017-2022 dalam tabel 32 berikut.

Tabel 32. Target Infrastruktur RPJMD Sulawesi Barat 2017 - 2022

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	2018	2019	2020	2021	Target Akhir 2022
	Awal 2017					
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	31,00	44,95	60,00	74,00	90,57	95,20
Panjang jalan kondisi baik (km)	226,17	243,79	264,42	296,00	318,02	332,89
Panjang jalan seluruhnya (km)	349,67	349,67	349,67	349,67	349,67	349,67
Rasio jaringan irigasi (%)	0,08	0,11	0,12	0,15	0,17	0,18

Adapun rencana pengembangan infrastruktur jalan terkait kawasan industri sangat diperlukan guna memperlancar arus pergerakan baik kendaraan berat, kendaraan ringan, angkutan barang dan angkutan orang.pengembangan. Dalam kaitannya tersebut dibawah ini akan diuraikan pola jaringan jalan dalam pemenuhan kebutuhan dalam industri :



a. Pola Jaringan Jalan

Kawasan industri identik dengan pembentukan kavling-kavling secara beraturan sehingga membutuhkan penanganan pola jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar kavling dengan jalan utama. Selain itu, perlu diperhatikannya pengguna jalan, dimana umumnya kendaraan yang melewati kawasan merupakan kendaraan berat pembawa bahan baku maupun hasil produksi sehingga untuk memudahkan kendaraan berat beroperasi dan terhubung dengan semua bagian blok. Berdasarkan kebutuhan pengembangan kawasan industri, maka pola yang cocok adalah dengan pengembangan pola jaringan jalan grid/grid iron/gris pattern. Dengan pola ini tapak industri akan terbagi menjadi persil-persil secara beraturan. Dan seperti pola-pola yang lainnya, pola grid iron ini memiliki keuntungan dan kerugian.

Keuntungan yang diperoleh dari pola grid iron antara lain:

- secara visual terlihat teratur dan rapi;
- akan lebih memudahkan dalam mendesain dan membangun jaringan prasarana, karena jaringan prasarana mengikuti pola jaringan jalan;
- kapling-kapling yang dihasilkan lebih banyak;
- interaksi antar kapling lebih baik dan aksesibilitas tiap kavling lebih tinggi.
- Adapun kerugian dari pola grid iron adalah:
- boros dalam penggunaan lahan untuk jaringan jalan dan prasarana lainnya;
- berkesan monoton, baik bagi pekerja maupun pengunjung yang akan memasuki kawasan tersebut;
- banyak terjadi persimpangan jalan, namun dapat diatasi dengan pengaturan hirarki dan manajemen lalu-lintas.



b. Sistem Jaringan Jalan

Jaringan yang ada pada saat ini adalah ruas jalan yang menghubungkan ibukota Mamuju dengan kecamatan-kecamatan lain sekitar yang ada di Kabupaten Mamuju maupun ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Bila dilihat dari kondisi jalan yang ada, untuk menuju lokasi Kawasan Industri Mamuju sebagian kecil sudah terlayani oleh jaringan jalan, sehingga untuk pencapaian ke lokasi Kawasan Industri menggunakan jaringan jalan yang ada baik itu melalui Kolektor Primer maupun Jalan kolektor sekunder yang ada disekitar kawasan.

Kebutuhan jaringan jalan dalam kawasan pada dasarnya dibagi menjadi Jalan Utama dan Jalan Lingkungan.

1) Jaringan Jalan Utama

Jaringan Jalan Utama merupakan jalan yang menghubungkan kawasan industri dengan jaringan jalan Kolektor Primer/ Trans Sulawesi nantinya. Dalam perencanaannya, jaringan jalan ini memiliki fungsi Kolektor Primer dengan tipikal sebagai berikut :

Rumaja	: 60 meter
Rumija	: 45 meter
Ruwasja	: 45 meter (diukur dari as jalan)
Perkerasan	: 2 jalur satu arah dengan lebar perkerasan 2 x 7 m
Median	: 7,0 meter (jalur cepat) dan 0,5 m (jalur lambat).

Jaringan jalan utama ini memiliki pola linear dan grid yang memanjang sepanjang kawasan industry, dan nantinya akan direncanakan hingga kawasan pelabuhan yang direncanakan berada di kawasan industri.

Adapun perencanaan jalan Kolektor Primer yang merupakan pengembangan jaringan jalan bagi peruntukkan di dalam kawasan industri yang terintegrasi antar kawasan / zona. Dengan Kondisi tersebut, maka

menuju kawasan dapat menjadi 2 (dua) akses pintu masuk - keluar dirancang khusus untuk kendaraan kecil (bukan Truck dan bus).



Dalam perencanaannya, jaringan jalan kolektor sekunder di rancang dengan:

Rumaja	: 32 meter
Rumija	: 18 meter
Ruwasja	: 18 meter (diukur dari as jalan)
Perkerasan	: 14 meter

2) Jaringan Jalan Lingkungan

Jaringan jalan lingkungan dalam kawasan industri adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar kavling industri dan pusat pelayanan lainnya. Jaringan jalan lingkungan memudahkan aksesibilitas internal kawasan baik yang memanjang timur - barat maupun utara - selatan. Jalan lingkungan dalam Kawasan Industri direncanakan memiliki sistem jaringan jalan berupa lokal Sekunder dengan ketentuan :

Rumaja	: 12 meter
Rumija	: 10 meter
Ruwasja	: 10 meter (diukur dari as jalan)
Perkerasan	: 8 meter

Dengan keberadaan Kawasan Industri, maka akses jalan yang digunakan yakni menggunakan Jalan Trans Sulawesi sebagai jalan utama menuju kawasan, akan tetapi keberadaan Jalan Trans Sulawesi masih kurang dimungkinkan dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat bagi peruntukan industri. Untuk itu perlu adanya rencana pengembangan antara lain:

- Perencanaan Jalan Utama di dalam kawasan kawasan guna mengakomodir akses keluar dan masuk kawasan industri. Pencanaan jalan utama tersebut dapat dimungkinkan bagi kendaraan berat dari dan ke kawasan industri hingga bobot mencapai sekitar 60 ton.



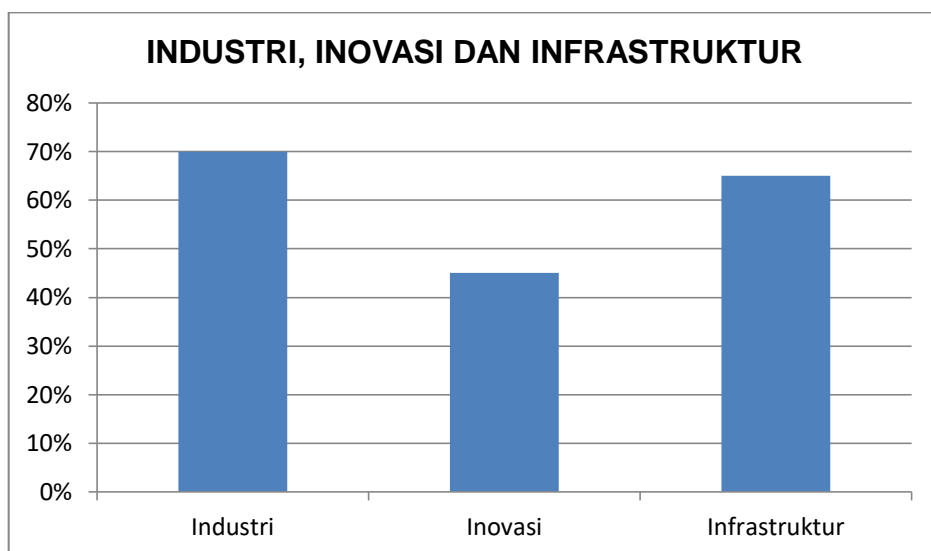
perluasan dan pelebaran Jalan Trans Sulawesi yang ada menjadi ROW 32 atau dengan perkerasan hingga 21 meter, hal tersebut dapat dimungkinkan bagi peruntukan lalu lintas kendaraan harian

maupun bagi peruntukan kendaraan industri yang melalui jalan tersebut.

- Penggunaan *traffic Light* pada tiap-tiap persimpangan kawasan dengan diluar kawasan, hal ini dimungkinkan bagi kelancaraan lalu lintas di luar kawasan dan menghindarkan terjadi kecelakaan.

Adapun hasil gambaran kondisi pengembangan industri, inovasi serta infrastruktur secara keseluruhan tahun 2020 di Sulawesi Barat³⁵ dapat dilihat pada matriks 4 berikut.

Matriks 4. Kondisi pengembangan industri, inovasi serta infrastruktur di Sulawesi barat 2020



Dengan analisis kondisi secara keseluruhan, ketercapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) sektor publik di Sulawesi Barat dapat dikatakan belum terlaksana sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh setiap tujuan di dalam SDGs terlebih pada tujuan yang kesembilan. Hasil analisis ini berdasarkan pada kendala-kendala yang telah dirangkum dengan melihat kondisi pembangunan secara langsung serta

ncara terkait bersama Pemerintah Provinsi dengan kendala antara
u terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang

hasil wawancara bersama dengan Gubernur provinsi Sulawesi Barat



pembangunan berkelanjutan secara baik, masih kurangnya sumber daya manusia serta anggaran yang dinilai masih minim untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan pembangunan terlebih proses penganggaran pada ketercapaian SDGs di Sulawesi Barat.

Namun dengan begitu, peran serta upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan hasil pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya, dan sudah dibentuknya beberapa kebijakan serta program pengembangan pembangunan yang dinilai berpengaruh sangat besar dalam menunjang ketercapaian sustainable development goals (SDGs) sektor publik di Sulawesi Barat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan sektor industri di Sulawesi Barat saat ini masih didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Sedangkan, besaran kontribusi setiap sektor akan menjadi salah satu penilaian atau aspek terhadap ketercapaian tujuan dalam SDGs. Hal ini lah yang melatarbelakangi pembangunan kawasan industri yang nantinya akan dipusatkan di Kabupaten Mamuju. Rencana pembangunan kawasan industri tersebut akan mengusung konsep “Green Industri Belang-belang Estate”. Rencana pengembangan kawasan industri tersebut telah sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten serta telah melalui berbagai kajian baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Kementerian Perindustrian dan telah dibuat *Masterplan* dan Rencana Strategis Kawasan Industri tersebut oleh pihak Kementerian Perindustrian. Dengan dikembangkannya industri nantinya dapat memperkuat struktur ekonomi daerah serta memberikan dampak positif pada daerah/kabupaten tertinggal walaupun lokasinya tidak berada pada daerah tertinggal. Dengan beroperasi kawasan industri belang-belang diharapkan akan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal di Provinsi Sulawesi



Barat. Serta sektor pemasaran produksi hasil bumi menjadi lebih baik dan berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

- 2) Proses pembangunan juga tidak terlepas dari sebuah inovasi. Dalam setiap pembangunan mengharuskan adanya inovasi-inovasi yang baru untuk menghidupkan pembangunan di suatu daerah. Terlebih dalam tujuan ke-sembilan SDGs yang menghadirkan inovasi dalam penguatan proses pembangunan industri dan infrastruktur. Di Sulawesi Barat sendiri, pengembangan inovasi-inovasi disetiap pembangunan terus diupayakan, tetapi kembali menjadi kendala bahwa inovasi yang dikembangkan tetap berdasar pada aspek lingkungan yang mana hal tersebut harus kembali dikaji secara berkala dan lebih mendalam mengingat sebagai salah satu provinsi baru, Sulawesi Barat masih butuh kajian lebih dalam pembangunannya disamping inovasi yang terus harus dikembangkan. Pengembangan inovasi ini dimulai terhadap pengembangan kawasan industri dengan sistem jaringan telepon yang diawali oleh sentral telepon, dalam hal ini penyediaan kebutuhan telepon untuk kawasan industri untuk menggunakan sentral telepon terdekat, dengan pertimbangan jarak lokasi STO tersebut lebih dekat dengan lokasi daripada sentral telepon lainnya sehingga dapat menghemat dalam pembangunan jaringannya.

Proses perencanaan pengembangannya hingga kini sudah tercapai sekitar 45%.



- 3) Pengembangan infrastruktur dasar merupakan salah satu aspek dari proses pembangunan yang tentunya berpengaruh besar terhadap ketercapaian SDGs di Provinsi Sulawesi Barat terutamanya dalam tujuan ke-sembilan. Sebagai provinsi yang tergolong masih muda tentunya masih banyak terkendala dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan khususnya pada daerah tertinggal. Pada tahun 2018 kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat yang dalam kondisi mantap sebesar 34,04% (sesuai target RPJMD Sulawesi Barat 2017-2022) dan tidak mantap sebesar 65,96%, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 37,24% (juga sesuai target RPJMD Sulawesi Barat 2017-2022) kondisi mantap dan 62,76% kondisi tidak mantap. Walaupun kondisi tidak mantap masih terbilang cukup tinggi, namun persentase kondisi jalan mantap akan diupayakan dapat terealisasi lebih tinggi dari kondisi jalan tidak mantap pada tahun 2022 yang dalam RJMD Sulawesi Barat 2017-2022 sebanyak 67,65%.



5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

- 1) **Perluasan Penggunaan Teknologi.** Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi non pemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian SDGs.
- 2) **Penguatan Koordinasi.** Pelaksanaan pencapaian SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian SDGs di daerah. BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan SDGs.
- 3) Dalam aspek **substansi program**, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan SDGs. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.



- 4) **Peningkatan Kapasitas.** Untuk melaksanakan TPB/SDGs ditingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Kementerian/Lembaga/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dandaerah.
- 5) **Strategi Komunikasi.** Agar SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen Strategi Komunikasi SDGs yang perlu dijabarkan secara lebih operasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan. Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Rahardjo Adisasmita, 2008, *Pengembangan Wilayah konsep dan teori*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setiyono, Budi. 2014, *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*, center for academic publishing service, Yogyakarta.
- Pranoto, Juni. 2011, *Strategi Pembaharuan Administrasi Dan Manajemen Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2014. *Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Francis, Tazoacha, 2001, *The Causes and Impact of Poverty on Sustainable Development in Africa*, A Paper Presented at The Conference "Poverty and Sustainable Development " Held In Bordeaux, France from November 22-23, 2001



, Djonet. 2019. *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs)*, Prakarsa, Bandung.

Website :

Bappenas.go.id, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, 17 April 2020, <<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>> (diakses, 7 Mei 2020)

Sulbarprov.go.id, *Provinsi Sulawesi Barat dalam angka 2019*, 21 Oktober 2019, <<http://bappeda.sulbarprov.go.id/product/provinsi-sulawesi-barat-dalam-angka-2019/>> (diakses, 7 Mei 2020)

Bps.go.id, *Laporan perekonomian Indonesia 2019*, 7 Oktober 2019, <<https://www.bps.go.id/publication/2019/09/16/7cc68afc43aa0d8b9e8eaf47/laporan-perekonomian-indonesia-2019.html>> (diakses, 7 Mei 2020)

Kemenperin.go.id, *Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian 2019*, 6 Oktober 2019, <<https://kemenperin.go.id/download/23369>> (diakses, 7 Mei 2020).

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Sulbar No 3 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah.

Peraturan Daerah Sulbar No 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.



LAMPIRAN



1. DATA SEKUNDER

Tabel 1 : Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR												
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional												
PROGRAM 1: Program Pembangunan Jalan dan Jembatan												
Kegiatan 1 : Pembangunan Jalan	1.1 Panjang jalan provinsi yang ditangani	Km	80,40 Km	80,40 Km	37 Km	40 Km	36 km	44 Km	12 Km	634,108	APBD	Dinas PU dan PR
Kegiatan 2 : Peningkatan Jalan (DAK)	2.1 Panjang jalan provinsi yang ditangani	Km	28,00 Km	28,00 Km	12 Km	12 Km	12 Km	13 Km	7 Km	192,297	APBD	Dinas PU dan PR
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api												
PROGRAM 1: Peningkatan Pelayanan Angkutan												
Kegiatan Koordinasi Bina Kereta Api	1. Jumlah Rapat Koordinasi Teknis dan Perhubungan Kereta Api dan SP yang diikuti	Kali	2016	1	1	1	1	1	1	400,000,000	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 2 : Tim Fasilitasi Penyiapan Lahan untuk Kereta Api	1. Jumlah Kegiatan Tim Fasilitasi Penyiapan Lahan untuk Kereta Api	-	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara												
PROGRAM 1: Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan												
Kegiatan 1 : Penyusunan Masterplan Pembangunan Bandar udara Polewali Mandar	1. Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Bandar udara Polewali Mandar	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1,500,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 2 : Penyusunan Masterplan Pembangunan Bandar udara Mamuju Utara	1. Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Bandar udara Mamuju Utara	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	750,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 3 : Penyusunan DED Pembangunan Bandar udara Polewali Mandar	1. Jumlah Dokumen DED Pembangunan Bandar udara Polewali Mandar	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	750,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 4 : Penyusunan DED Pembangunan Bandar udara Mamuju Utara	1. Jumlah Dokumen DED Pembangunan Bandar udara Mamuju Utara	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	750,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 5 : Penyusunan Dokumen Kajian Kelayakan Pembangunan Bandar udara Polewali Mandar	1. Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Pembangunan Bandar udara Polewali Mandar	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	1,500,000,000	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Kegiatan 6 : Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Bandara Mamuju Utara	1. Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Bandara Mamuju Utara	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	750,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 7 : Study Kelayakan Pembangunan Bandara Polewali Mandar	1. Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Bandara Polewali Mandar	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 8 : Study Kelayakan Pembangunan Bandara Mamuju Utara	1. Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Bandara Mamuju Utara	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 9 : Study Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Sumarorong	1. Jumlah Dokumen Study Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Sumarorong	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
PROGRAM 2: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan												
Kegiatan Pengembangan Bandara Pelalawan	Jumlah LPJU dan Bandara dan Labuhan	Paket	-	1	1	1	1	1	1	1,408,685,723.50	APBD	Dinas Perhubungan



Optimization Software:
www.balesio.com

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 2 : Pembangunan Jalan Akses Bandar Udara Tanpa Padang	1. Jalan Akses Bandar Udara Tanpa Padang yang dibangun	Paket	-	-	-	1	-	-	-	1,000,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 3 : Pembangunan Jalan Akses Bandar Udara Sumarorong	1. Jalan Akses Bandar Udara Sumarorong	Paket	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan												
PROGRAM 1: Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan												
Kegiatan 1 : Study Kelayakan Pembangunan dermaga Sungai	1. Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan dermaga Sungai	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	500,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 2 : Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan dermaga Sungai	1. Jumlah Dokumen kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan dermaga Sungai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	500,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 3 : Penyediaan Pemeliharaan dermaga	1. Jumlah Dokumen PED Pembangunan dermaga Sungai	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	500,000,000	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 4 : Penyusunan Studi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mamuju	1. Jumlah Dokumen Studi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mamuju	Dokumen	-	-	1	1	-	1	-	2,540,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 5 : Penyusunan Studi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bala balakang	1. Jumlah Dokumen Studi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bala balakang	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 6 : Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Dermaga Sungai Tanamoni	1. Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Dermaga Sungai Tanamoni	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 7 : Penyusunan Studi Pembangunan Dermaga Sungai	1. Jumlah Dokumen Studi Pembangunan Dermaga Sungai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 8 : Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Dermaga Sungai Batu Parigi	1. Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Dermaga Sungai Batu Parigi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 9 : Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Dermaga Sungai	1. Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Dermaga Sungai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Salulebbo	Dermaga Sungai Salulebbo											
PROGRAM 2: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan												
Kegiatan 1 : Pembangunan dan Penataan Akses Penyeberangan Sungai	1.Bangunan dan Penataan Akses Penyeberangan Sungai (Tersebar)	Paket	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis												
PROGRAM 1: Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan												
Kegiatan 1 : Study kelayakan pembangunan pelabuhan	1.Jumlah Dokumen Study kelayakan pembangunan Pelabuhan	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	750,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 2 : Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan	1.Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	750,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 3 : Penyusunan Master Plan Pembangunan Pelabuhan	1.Jumlah Dokumen Master Plan Pembangunan Pelabuhan	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	750,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 4 : Penyusunan Master Plan Pembangunan Pelabuhan	1.Jumlah Dokumen Master Plan Pembangunan Pelabuhan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	750,000,000	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 5 : Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan	1.Jumlah Dokumen Rencana Induk Pelabuhan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	0	APBD	Dinas Perhubungan
PROGRAM 2: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan												
Kegiatan 1 : Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Budong-Budong	1.Jalan Akses Pelabuhan Budong-Budong yang di bangun	Paket	-	-	-	-	-	1	-	1,500,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 2 : Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Pasangkayu	1.Jalan Akses Pelabuhan Pasangkayu yang di Bangun	Paket	-	-	-	-	1	-	-	1,000,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 3 : Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Belang-Belang	1.Jalan Akses Pelabuhan Belang-Belang yang di Bangun	Paket	-	-	-	1	-	-	-	1,174,793,568	APBD	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur												
9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca												
PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam												
Kegiatan Investasi Penyusunan Laporan Inventarisasi GRK		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
INDI 9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah												



Optimization Software:
www.balesio.com

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
PROGRAM 1: Program Pengembangan dan Pemeliharaan												
Kegiatan 1 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Centre	Terpenuhinya Layanan Informasi dan Transaksi Elektronik antara Pusat dan Daerah	6 Kab	Kegiatan baru		6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	9,000,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR
Kegiatan 2 : Pembangunan Gedung Data Center/Server	Tersedianya Gedung Data Center/Ruang Server	5 unit	Kegiatan baru		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,700,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR
Kegiatan 3 : Pembangunan Tower Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Tower TIK	10 unit	Kegiatan baru		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	15,000,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR
Kegiatan 4 : Pelaksanaan Penginter	Tersedianya Perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta Kualitas dan keamanan informasi Kepada pengguna layanan	6 Kab	Kegiatan baru		6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	10,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR



Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 5 : Pemeliharaan/Maintenance Jaringan Fiber Optik	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Jaringan Fiber Optik	43 OPD	Kegiatan baru		43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	3,000,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR
INDIKATOR SDGs: 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband												
PROGRAM 1: Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi												
Kegiatan 1 : Penyediaan infrastruktur dasar data center Disaster Recovery Center & TIK	Tersedianya Infrastruktur Data Center Recovery & TIK	6 Kab	Kegiatan baru		6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	12,500,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan dan Pengembangan ekosistem TIK Smart Province	Jumlah Smart Province	6 Kab	Kegiatan baru		6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	12,500,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR
INDIKATOR SDGs: 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam												
PROGRAM 2: Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa												



Optimization Software:
www.balesio.com

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)		Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 1 :Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Tersedianya Informasi dan Akses Internet	6 Kabupaten	Kegiatan baru		6 Kabupaten	6 Kabupaten	6 Kabupaten	6 Kabupaten	6 Kabupaten	10,000,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR
INDIKATOR SDGs: 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet												
PROGRAM 1: Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika												
Kegiatan 1 : Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet	Tersedianya Internet	6 Kab	Kegiatan baru		6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	6 Kab	1,775,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terbinanya jaringan Komunikasi dan Informasi	6 Kab	Kegiatan baru		1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab	2,000,000,000	APBD	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. SULBAR



1. PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN	PERNYATAAN
<p>Bagaimana perkembangan pembangunan SDGs di Sulawesi Barat saat ini?</p>	<p>Sejauh ini pembangunan yang dilakukan di Sulawesi Barat terkhususnya dalam ranah publik selalu kita usahakan agar sinergis dengan segala kebijakan maupun agenda-agenda pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah baik pusat hingga ke kabupaten/kota. Tentu itu dengan harapan, bahwa wajah Sulawesi Barat hari ini akan lebih baik kedepannya dengan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.</p>
<p>Bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam menanggapi SDGs ?</p>	<p>Periode saya dan Ibu Hj. Eni Anggraeni Anwar tersisa 2 tahun lagi, kami akan terus mengevaluasi kinerja dari setiap OPD. Tentunya untuk memastikan bahwa arah dari pembangunan ataupun program yang dilaksanakan oleh setiap OPD itu tetap menjunjung nilai-nilai keberlanjutan supaya</p>



	<p>Sulawesi barat juga bisa segera mematangkan diri dalam konsep SDGs hingga beberapa tahun kedepan. Dan untuk saat ini langkah yang sudah dilakukan oleh kami sebagai pemerintah itu dalam SDGs ialah telah rampungnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang SDGs yang kami susun. Sehingga sudah ada landasan serta pedoman yang dijadikan oleh setiap OPD untuk bergerak.</p>
<p>Mengenai pengembangan kawasan industri, sudah berapa persen kesiapannya untuk mendukung Sulawesi Barat dalam ketercapaian SDGs?</p>	<p>Proses pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat yang rencananya akan dipusatkan di kabupaten Mamuju sejauh ini sudah rampung hampir 70 persen. Sisa yang menjadi kendalanya itu bagaimana kembali pemerintah daerah untuk mendapatkan investor yang tepat untuk bisa</p>



	<p>diajak kerjasama dalam mengisi kawasan industri yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan serta menjadi tujuan dari Sulawesi Barat kedepannya. Tinggal bagaimana nanti Dinas terkait, mematangkan lagi ini perencanaan. Kami upayakan kawasan industri ini sudah bisa mulai dibangun sebelum masa periode saya bersama Ibu Hj. Eni Anggraeni berakhir. Karena harapan kami, melalui rencana pembangunan ini masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya dan masyarakat sekitar daerah pengembangan kawasan industri pada khususnya, perekonomiannya dapat lebih terangkat.</p>
<p>Bagaimana terkait dengan inovasi-inovasi dalam pembangunan yang telah</p>	<p>Mengenai inovasi yang pemerintah tengah usahakan dalam proses pembangunan</p>



dilakukan?	<p>akhir-akhir ini adalah bagaimana usaha agar sistem jaringan baik telepon, internet, dan teknologi semua bisa dirasakan oleh semua masyarakat Sulawesi barat terlebih pada wilayah yang belum memiliki akses jaringan komunikasinya dan wilayah sekitaran rencana pembukaan kawasan industri. Hal itu agar pembangunan bisa saling terpadu satu sama lain. Tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Itu harapan terbesar saya secara pribadi. Tapi yang paling utama terlebih dahulu yang dekat ini kami sementara susun itu ialah mengenai sistem jaringan komunikasi atau telepon yang sejauh ini juga bisa saya katakan sudah berjalan sekitar 45 persen. Masih perlu untuk disusun lebih matang lagi.</p>
------------	---



Bagaimana kondisi infrastruktur dasar di Sulawesi Barat saat ini?

Jika berbicara infrastruktur maka kita akan berbicara tentang pelayanan dan masyarakat.

Dalam pembangunan infrastruktur juga sudah jelas selalu menjadi pekerjaan untuk pemerintah setiap tahunnya karena memang hal itu sangat dekat dengan masyarakat.

Untuk tahun ini pengembangan infrastruktur yang sudah rampung dijalankan itu sudah mencapai 65 persen yang tersebar di beberapa kabupaten yang ada. Sebenarnya ini tidak sesuai dengan target awal yang kami rencanakan yang pada memasuki pertengahan tahun itu, seharusnya sudah rampung sekitar 80 persen. Karena diketahui bersama, kendala terbesar yang kami alami dan saya pikir juga dialami oleh Provinsi lainnya itu ialah karena



	<p>akibat adanya pandemi viru covid-19 ini. Namun kami tetap optimis capaian untuk pembangunan infrastruktur ini masih bisa meningkat hingga akhir tahun 2020. Dan yang paling penting dalam perluasan dan perbaikan jalan di setiap kabupaten yang menjadi jalan provinsi.</p>
--	---

Hasil wawancara bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Bapak

Drs. H. Andi Ali Baal Masdar M.Si

PERTANYAAN	PERNYATAAN
<p>Bagaimana kondisi proses pelaksanaan rencana pembangunan di Sulawesi barat saat ini?</p>	<p>Sejauh ini proses pembangunan yang dilakukan di Sulawesi Barat terus digenjut. Angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 5,6% sedangkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu sebesar 7%. Jika berbicara</p>



mengenai pembangunan SDGs yang sudah dilaksanakan sampai tahun ini namun ada yang belum mencapai target karena memang rata-rata pembangunannya itu kita mulai dari tahapan awal yang secara waktu pelaksanaan terkadang melebihi dari batas rencana sebelumnya. Kemudian, kendala lainnya itu adalah karena minimnya anggaran. Kita kan masih termasuk sebagai provinsi muda di Indonesia, jadi anggaran yang minim itu harus dibagi lagi ke dalam beberapa perencanaan pembangunan dan butuh strategi serta usaha yang ekstra untuk bisa capai itu.

Pembangunan yang berkelanjutan dengan mewujudkan SDGs di Sulawesi Barat juga sudah diupayakan dengan salah satunya yakni dengan adanya Rancangan Aksi



	<p>Daerah (RAD) terkait SDGs.</p> <p>Harapan kami ialah proses pembangunan di Sulawesi kini lebih terarah lagi dengan melihat sisi keberlanjutan dari sebuah pembangunan. Juga apa yang dianggap masih kurang dapat ditingkatkan lagi melalui Rancangan Aksi Daerah (RAD) ini. Sedangkan jika melihat indikator dari SDGs yang ada, memang masih jauh dari yang diharapkan. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkhusus pada indikator yang belum memiliki data</p>
--	---

Hasil wawancara bersama Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Barat Bapak Dr. Junda

Maulana, M.Si



PERTANYAAN	PERNYATAAN
<p>Bagaimana perkembangan kondisi industri di Sulawesi Barat saat ini?</p>	<p>Saat ini sektor industri di Sulawesi Barat tengah di dorong untuk menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB dengan cara membina UKM –UKM untuk siap masuk menghadapi pengembangan kawasan industri semata-mata dengan harapan sebagaimana yang saya bilang tadi. Tapi kendala selanjutnya itu, mengenai masa jabatan Gubernur & Wakil Gubernur yang hanya menyisakan 2 tahun lagi. Jadi pengerjaan terhadap rencana kawasan industri itu harus dirampungkan segera mungkin. Karena dengan adanya kawasan industri ini juga akan menjadi potensi besar bagi Sulawesi Barat untuk mendatangkan investor dan meningkatkan industrialisasi di Sulawesi Barat.</p>

wawancara bersama Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
 dan UKM Sulawesi Barat Bapak Drs. H. Amir Maricar, MM



PERTANYAAN	PERNYATAAN
<p>Bagaimana tanggapan bapak dengan rencana pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat?</p>	<p>Kalau kami dari pengusaha, sangat senang jika memang kawasan industri itu akan dibuat sama pemerintah. Apalagi selama ini juga pemerintah sudah lakukan mi beberapa kali kegiatan pembinaan-pembinaan. Jadi sangat senang kalau hal itu dilanjut lagi dalam kawasan industri. Terutama bagi teman-teman yang memang belum terlalu banyak tau tentang macam proses untuk mengolah hasil kebun supaya bisa lebih menjual. Harapan saya sendiri, semoga pemerintah betul-betul bisaji perhatikan kami sama bantu juga semua teman-teman pelaku usaha dari yang paling kecil sampai besar untuk bisa terlibat di dalam kawasan industri itu. Tidak hanya beberapa saja.</p>

Hasil wawancara bersama Bapak darius hendrik P (pelaku usaha industri perkebunan kakao)



PERTANYAAN	PERNYATAAN
<p>Bagaimana saudara melihat pembangunan di Sulawesi barat saat ini jika ditinjau dari aspek lingkungan?</p>	<p>Pembangunan di sulbar sudah bagus dari sebelumnya tetapi jika dilihat dari pembangunan lingkungannya belum ada perubahan yang signifikan dan dapat dilihat secara langsung. Dampak dari pembangunan di sulbar yang dirasakan banyak lahan hijau yang sudah dialih fungsikan sedangkan masih banyak lahan yang sudah ada yang mestinya bisa lebih dimaksimalkan.</p>
<p>Mengenai konsep pengembangan kawasan industri sendiri, bagaimana saudara menanggapi hal tersebut?</p>	<p>Kalau melihat dari konsep-konsep yang dibawa, sangat bagusmi menurutku. Apalagi ini kan kalau kita mau pandang dari <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>nya memang paling utama itu yang harus dilihat yah, keberlanjutan dan bagaimana dampaknya juga terhadap lingkungan. Dan menurut saya sendiri konsep-konsep itu sudah sangat bagus sisa bagaimana penerapannya nanti. Ini</p>



Sulawesi Barat kan masih sangat baru, kawasan terbuka hijaunya itu masih sangat berpotensi untuk dirusak jika tidak ada pengkajian yang lebih matang terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan. Terkait bagaimana dampak ke lingkungannya dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Belum lagi kalau kita bahas dari aspek sampahnya, pasti mi akan selalu terlihat ketika itu tidak diantisipasi memang di awal sama pemerintah. Karena kalau boleh jujur, kami dari kalangan teman-teman aktivis pecinta lingkungan di Sulawesi Barat terutama yang ada di Mamuju itu belum pernah dilibatkan secara langsung oleh pemerintah Provinsi dalam proses pengkajian bersama terhadap analisis dampak lingkungan terlebih terkait pembangunan kawasan industri ini. Semoga berjalan sesuai



	yang diharapkanji semua kedepannya.
Saran terkait inovasi pembangunan yang seperti apa yang seharusnya pemerintah Sulawesi Barat dapat lakukan?	Iya betul sekali. Sulawesi Barat memang masih sangat muda dan perlu inovasi-inovasi yang lebih dalam pembangunannya. Tapi perlu diingat juga, bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasarkan pada aspek keberlanjutan. Seperti mi yang ada dalam konsep SDGs. Maksudnya adalah inovasi yang dilakukan itu ada kajiannya terlebih dahulu sebelum dilakukan terutamanya dari aspek lingkungan supaya. Pembangunan tetap berjalan dan lingkungan juga tetap aman. Selain itu, menurut saya juga inovasi yang baik itu adalah inovasi pembangunan yang didasarkan pada apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan provinsi Sulawesi Barat pada umumnya.



	<p>Begitu kalau dari saya.</p>
<p>Jika terkait infrastruktur dasar seperti jalan sendiri, bagaimana saudara melihat hal itu dari sisi keberlanjutan pembangunannya?</p>	<p>Yang saya lihat dan menjadi kendala terbesar sekarang dalam kondisi jalanta di Sulawesi Barat itu mengenai pemeliharaan dan ketersediaan tempah sampah. Karena menurutku, proses pembangunan yang baik itu ketika bisa dilaksanakan juga itu sehingga ada proses keberlanjutannya. Lihatmi sekarang kondisi jalan, terutama di Ibukota Mamuju hanya ada berapa banyak tempah sampah yang tersedia dan dalam kondisi layak dan ada berapa banyak jalan umum yang tidak terawat. Hal itu juga sebenarnya karena kurangnya kajian mendalam di awal perencanaan pembangunan. Saya bukan hanya melihat kelalaian dari pemerintah daerah saja, tetapi budaya</p>



	masyarakat kita juga yang memang belum sepenuhnya pada terhadap setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah
--	---

Hasil wawancara bersama Muh. Rifai Sahida. Selaku pendiri yayasan organisasi Tangan Edukasi Indonesia

PERTANYAAN	PERNYATAAN
Bagaimana perkembangan serta kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Sulawesi barat hingga saat ini?	Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di Sulawesi Barat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain ketersediaan anggaran pemerintah daerah untuk membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai masih sangat kurang. Kondisi lain yang juga sangat berpengaruh adalah kondisi geografis daerah tertinggal yang jauh dan sulit dijangkau sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan masyarakat. Dari kami



	<p>sendiri, upaya yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan anggaran yang ada tersebut walaupun belum sepenuhnya dapat direalisasikan untuk mencapai target tahunan.</p>
<p>Infrastruktur dasar juga seperti jalan menjadi hal utama dalam proses menunjang suatu pembangunan. Bagaimana bapak melihat hal tersebut?</p>	<p>Kondisi jalan yang ada di provinsi Sulawesi Barat saat ini dapat kita pantau bersama. Terlebih masyarakat yang terkendala akan ganti rugi lahan ataupun konflik sosial terkait pelebaran maupun perpanjangan jalan provinsi tersebut. Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat sejauh ini telah melakukan inovasi dalam penyediaan aplikasi sistem penanganan jalan daerah. Itu dimaksudkan agar proses yang menunjang pembangunan berkelanjutan itu dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Sehingga komunikasi dan harmonisasi yang selama ini selalu</p>



	menjadi permasalahan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan dapat tercipta melalui informasi yang lebih akurat didapatkan oleh masyarakatnya dan pemerintah yang lebih terbuka dalam menanggapi setiap kendala yang ada
--	--

Hasil wawancara Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang

Bina Marga, Bapak Sudra Satriadi



2. DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto bersama Gubernur Sulawesi Barat



Foto bersama Pelaku Industri Perkebunan Kakao di Kabupaten

Mamuju Sulawesi Barat





Foto bersama Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan UKM Sulawesi Barat



Foto Bersama Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Sulawesi Barat





Foto bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Barat



**Foto bersama Pendiri Organisasi Yayasan Pecinta Lingkungan
“Tangan Edukasi Indonesia”**

